

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 14/2013



NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISME

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

PELAYANAN

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman

KESEMPURNAAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

Daftar Isi

4 LIPUTAN UTAMA *Penyusunan APBN 2013*



37 GERAI BPPK *Program Diklat Unggulan BDK CIMAHI tahun 2012*



PROFIL 28



Tuntunan Hidup Agus Hermawan

46 SERAMBI ILMU



Assessment Ratio (Menguji Akurasi Nilai Jual Objek Pajak)

Liputan Utama	4
Liputan Khusus	25
Profil	28
Gerai BPPK	32
Serambi Ilmu	46
Mata Air	54
Selasar Alumni	57
Klinik Sehat	58
Pojok IT	61
Kalender Diklat	64
Resensi Buku	66
Kang Edu	67
Galeri BPPK	68

Salam Redaksi

Para pembaca yang budiman, awal tahun yang menyenangkan. Majalah Edukasi Keuangan terus berbenah dalam rangka menghadirkan informasi tentang keuangan Negara yang lebih berkualitas dan komprehensif kepada seluruh pembaca. Seiring dengan tuntutan tersebut majalah kami telah memperkuat jajaran redaktur dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu kami juga berupaya untuk menghadirkan informasi keuangan Negara yang lebih *credible* dengan melakukan wawancara langsung kepada pemangku kepentingan utama (Dirjen Teknis). Pandangan dari pihak akademisi juga dihadirkan dalam rangka menambah wawasan tentang keuangan Negara dalam perspektif yang lebih beragam.

Selanjutnya mengingat sambutan yang luar biasa dari pembaca akan kebutuhan informasi keuangan negara yang lebih komplit, maka majalah edukasi pada tahun 2013 ini akan hadir enam kali dalam setahun. Upaya membenahi *lay out* supaya lebih sesuai dengan kelas majalah yang modern juga terus diupayakan. Semua hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita majalah Edukasi Keuangan 2013 yaitu "Menjadi Majalah Keuangan Negara Terbaik Di Lingkungan Kementerian Keuangan". Diharapkan kedepannya benar-benar dapat menjadi majalah Keuangan Terbaik di Republik ini.

Edisi perdana di tahun 2013 mengangkat tema utama tentang APBN 2013 yang dihadirkan dari berbagai sudut pandang. Wawancara dengan Pejabat nomor satu di lingkungan Ditjen Anggaran tersaji dalam format deskriptif yang santai. Suara pakar pada edisi kali ini menyajikan wawancara dengan pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Revrison Baswir.

Informasi dan kegiatan BPPK juga tidak luput dari edisi kali ini. Sajian informasi kesehatan setia hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara sederhana kepada pembaca yang sekalian. Lembar mata air semakin menambah kesejukan majalah ini.

Kami menunggu partisipasi Anda dengan mengirimkan artikel, kritik maupun saran melalui email di edukasikeuangan@depkeu.go.id, walaupun tidak semua artikel dapat kami muat karena keterbatasan yang ada.

Selamat membaca.

Susunan Redaksi



Edisi 14/2013

Penasehat

Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Redaktur

Iqbal Soenardi

Tanda Setiyo

Suroso

Sumini

Sampurna Budi Utama

Bambang Widjajoso

Noorcholis Madjid

Bambang Sancoko

Daniel Pangaribuan

Indrayansyah Nur

Agus Suharsono

Gathot Subroto

Agus Hekso P.

Efi Dyah Indrawati

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Sera Betania

Yohana Tolla

Desain Grafis dan Fotografer

Muhammad Fath Kathin

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi* 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sambutan Menteri Keuangan



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Insan Kementerian Keuangan yang kami cintai.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga pada Tahun Anggaran 2013 ini kita dapat terus berkarya dan berkinerja untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta.

Setelah melalui proses yang panjang dan menuntut kesungguhan dalam segala hal, akhirnya pada akhir bulan Oktober 2012 pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang APBN 2013. Sebuah hasil yang patut disyukuri khususnya bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang terlibat sangat *intens* dalam penyusunan APBN tersebut.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, APBN 2013 memiliki nuansa yang khusus. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010–2014 mulai digambarkan. Kebutuhan dana untuk persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkan. Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat semakin meluas.

Insan Kementerian Keuangan yang kami banggakan, Dalam kondisi seperti itu, peranan dan kontribusi APBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang

terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil berkualitas tinggi. Dengan kerangka pikir ini, kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan merespons perkembangan ekonomi global dan domestik, termasuk permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi, menjadi unsur utama dalam penyusunan APBN 2013. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas kebijakan, rencana program dan alokasi anggaran, serta hasil pelaksanaan APBN 2013, meskipun kondisi ekonomi makro dan respons positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting.

Dari perspektif global, ketidakpastian kondisi ekonomi Eropa, ketegangan politik di beberapa kawasan dunia seperti di Timur Tengah, perubahan iklim dan bencana alam, serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2013.

Sinyal perkembangan positif kinerja ekonomi global maupun domestik tetap dapat dijadikan momentum untuk melangkah lebih optimistis. Kita harus dapat memanfaatkan semua peluang dan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga perlu ditempuh kebijakan antisipatif dan responsif melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan *prudent* dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi masih berkaitan dengan upaya untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama.

Kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan saya kembali mengingatkan untuk bekerja lebih keras dengan tetap menjunjung tinggi serta mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kita harus bekerja dengan hati, memegang integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara, membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, meningkatkan pelayanan terhadap pemangku kepentingan, dan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang serta memberikan yang terbaik menuju kesempurnaan.

Akhirnya saya ucapkan selamat membaca informasi yang disajikan oleh Majalah Edukasi Keuangan BPPK. Semoga bermanfaat.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Foto: Eros L. Mursalin

PENYUSUNAN APBN 2013

OLEH: TANDA SETIYA

2013, *Majalah Edukasi Keuangan* berhasil mewawancari Pejabat nomor satu di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu Bapak Herry Purnomo, MSoc.Sc. Berikut dituturkan hasil dari wawancara eksklusif tersebut.

Siang itu, bertempat di ruang tamu Dirjen Anggaran diantara kesibukan Dirjen Anggaran dalam rangka mempersiapkan Renstra DJA 2014-2019 dan Rapat dengan DPR-RI, dengan senyum khasnya Dirjen Anggaran berkenan meluangkan waktunya untuk sesi wawancara dengan *Majalah Edukasi Keuangan*. Topik APBN 2013 menjadi bahasan utama dalam wawancara tersebut.

Pejabat karir asli Kementerian Keuangan ini mengawali wawancara dengan menjelaskan garis besar dari penyusunan APBN 2013. Penyusunan APBN 2013 sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 2012. Pada tahap awal, Kementerian Keuangan (DJA) bekerjasama dengan para *stakeholder*, baik di internal kementerian maupun dengan kementerian lain/pihak lainnya, untuk menyusun *resource envelope* dan rencana awal postur APBN 2013 dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait anggaran pada tahun 2013. Kemudian bersama-sama dengan Bappenas menajamkan alokasi belanja kementerian/lembaga yang dituangkan dalam pagu indikatif kementerian/lembaga di bulan Maret 2012. Selanjutnya, Kementerian Keuangan menyusun Pokok-pokok Kebijakan Fiskal pada bulan Mei 2012 tentunya dengan mempertimbangkan situasi perekonomian global dan juga domestik. Pada akhir Juni 2012 alokasi belanja tersebut dimutakhirkan datanya dan ditetapkan dalam Pagu Anggaran Kementerian/lembaga tahun 2013.

Pemerintah dengan koordinasi Menteri Keuangan menyusun Nota Keuangan dan APBN, serta Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2013. Pada tahap ini proses koordinasi di level pemerintah haruslah intens dan efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sudah benar-benar melalui pertimbangan dan penilaian yang baik. Untuk belanja kementerian/lembaga sudah memiliki perencanaan matang untuk dituangkan

Penyusunan APBN Tahun 2013 membutuhkan pikiran, tenaga dan waktu yang luar biasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 ini memiliki nuansa khusus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 mulai digambarkan. Kebutuhan dana untuk persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkan dalam APBN 2013.

Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi semakin meluas dan membesar. Dalam kondisi seperti itu, peranan dan kontribusi APBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat.

Dalam rangka menyajikan informasi yang berkualitas terkait APBN

ke dalam RKA-KL, dengan demikian penggunaan keuangan negara benar-benar efisien dan akuntabel.

Pada pertengahan bulan Agustus, Presiden/pemerintah menyampaikan RUU APBN serta Nota Keuangan (NK) dan RAPBN kepada legislatif (DPR) untuk kemudian dibahas bersama agar dihasilkan APBN yang akuntabel, efisien dan memiliki efek yang optimal bagi perekonomian dan stabilitas negara. Hasil pembahasan tersebut kemudian digunakan untuk mengupdate alokasi belanja yang terdapat dalam RUU serta NK dan RAPBN, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi UU APBN dan NK dan APBN 2013.

Peranan DJA sebagai unit Eselon I memiliki peran yang sangat vital dalam

adalah penerbitan DIPA yang sebelumnya dilaksanakan di Ditjen Perbendaharaan, maka mulai APBN 2013 dilaksanakan di Ditjen Anggaran. Dengan demikian proses penerbitan DIPA serta penyerahannya kepada masing-masing pengguna anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Peran DJA dalam melakukan penyusunan APBN disesuaikan dengan siklus APBN. Berdasarkan siklus APBN, tahap awal penyusunan APBN dimulai pada bulan Januari dengan kegiatan melakukan penyusunan konsep usulan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Setelah itu, pada bulan Maret dilakukan kegiatan penyusunan *resource envelope*, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif dengan *output*

hap awal tersebut, DJA tidak berdiri sendiri tetapi melibatkan banyak *stakeholders*, yaitu melibatkan berbagai instansi/unit baik unit eselon I lainnya yang berada di lingkungan internal Kementerian Keuangan, seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), maupun instansi lainnya yang berada di luar Kementerian Keuangan, seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya.

DJA mempunyai peran yang aktif dalam setiap Panitia Kerja yang dibentuk. Panja A yang membahas asumsi dasar makro ekonomi dan pendapatan negara,

7 (tujuh) ciri menonjol (khas) APBN 2013

- 1) Pendapatan negara meningkat lebih cepat daripada belanja negara sebagai bukti komitmen untuk memperkuat kemandirian APBN;
- 2) Peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur sebagai bukti kuatnya komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja;
- 3) Peniadaan Pasal Larangan Penyesuaian Harga BBM dan Pengendalian Subsidi Listrik yang merupakan komitmen kuat pemberian fleksibilitas dan deskresi kepada Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi;
- 4) Transfer ke daerah meningkat lebih cepat dari Belanja Pemerintah Pusat, yang menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah, memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemertaaan pembangunan;
- 5) Defisit menurun sebagai salah satu bukti kuatnya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan menjaga kesehatan APBN;
- 6) Pengutamaan pembiayaan dalam negeri untuk meneguhkan tekad membangun dengan kekuatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri; serta
- 7) sarat langkah-langkah antisipasi ketidakpastian ekonomi global dengan pasal-pasal antisipasi krisis dalam UU APBN 2013.

penyusunan APBN 2013. Peran DJA dalam penyusunan APBN 2013 dapat dikatakan cukup vital, hal ini dikarenakan DJA mengikuti dari proses awal, yaitu penyusunan *resource envelope*, proses utamanya yaitu penyusunan Nota Keuangan (NK) dan RAPBN serta proses pembahasannya di DPR, sampai dengan proses penerbitan DIPA.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan untuk mengefisienkan proses penganggaran, segera setelah penetapan UU APBN, maka dimulailah proses penelaahan di DJA. Salah satu langkah terobosan pada APBN 2013

berupa SEB Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Mei, Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro dan RKP ke DPR, untuk kemudian pada bulan Juni s.d Juli disusun pagu sementara APBN yang akan menjadi dasar dalam penyusunan pagu definitif RAPBN. Pagu definitif tersebut akan disampaikan Presiden pada pertengahan Agustus kepada DPR dalam bentuk RUU APBN beserta Nota Keuangan dan RAPBN.

Dalam penyusunan APBN pada ta-

Panja B yang membahas Belanja Pemerintah Pusat, Panja C yang membahas belanja untuk Transfer ke Daerah, dan Tim Perumus yang membahas mengenai RUU APBN.

Setelah proses pembahasan di DPR dan APBN ditetapkan, DJA memiliki tugas untuk menelaah dokumen anggaran bersama dengan Kementerian/Lembaga untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Demikian urai Pejabat Eselon I yang mengawali karir PNS-nya di KPPN Jambi ini.

Secara garis besar, dalam struktur

APBN terdapat tiga komponen utama yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Terkait kebijakan Pendapatan dalam APBN 2013 semakin ditingkatkan dengan berbagai kebijakan, baik kebijakan dalam perpajakan maupun kebijakan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan penerimaan pajak dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk upaya ekstensifikasi diantaranya: (a) tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak nasional; (b) memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya; (c) melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara dan praktek-praktek korupsi; (d) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalian potensi pajak; serta (e) memperbaiki kualitas SDM dan menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia. Selanjutnya, upaya intensifikasi dilakukan melalui peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan menangani masalah *transfer pricing*.

Selain itu, terdapat beberapa tambahan kebijakan insentif perpajakan, yaitu : (a) kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat pendapatan rendah melalui peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun; (b) kebijakan perpajakan yang diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPhBM untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (*Hybrid and Low Cost Green Car*); serta (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPhBM terhadap Barang Kena Pajak (BKP) untuk eksplorasi hulu migas dan panas bumi.

Di sisi lain, kepabeanan dan cukai juga merupakan sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi yang besar, dengan beberapa upaya kebijakan sebagai berikut: (a) pelayanan

kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu; (b) rencana pengenaan cukai atas minuman bersoda dan berpemanis; (c) tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor modern dengan penerapan prinsip pelayanan yang baku; (d) informasi dan teknologi yang terintegrasi bagi pelayanan kepabeanan dan cukai; (e) otomasi administrasi piutang bea dan cukai; serta (f) penerapan *billing system* untuk pelayanan cukai.

Selanjutnya, untuk kebijakan PNBP, terdapat beberapa langkah optimalisasi, diantaranya: (a) efisiensi *cost recovery*; (b) pencapaian target *lifting* migas; (c) optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi); (d) optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN; serta (e) terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP.

Alumnus Birmingham University ini lebih jauh memaparkan tentang kebijakan pengeluaran dalam APBN 2013. Titik tekan APBN 2013 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat melalui upaya pengendalian subsidi dan peningkatan belanja infrastruktur. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan belanja diarahkan antara lain untuk:

- Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung *domestic connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata;
- Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*) melalui dukungan



Foto: Eros L. Mursalin

LANGKAH TEROBOSAN PADA APBN 2013 ADALAH PENERBITAN DIPA YANG DILAKSANAKAN DI DJA

anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;

- Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
- Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi;
- Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui

Foto: Eros L. Mursalin



TAHUN DEPAN JUGA DIRENCANAKAN BAHWA TIDAK ADA LAGI DISTRIBUSI DIPA *HARD COPY*

pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian BBN;

- Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional.

Pemerintah, dengan persetujuan DPR, pada APBN 2013 masih menetapkan

kebijakan anggaran defisit, dalam rangka memberikan stimulus dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui serangkaian program dan kegiatan Pemerintah.

Pembiayaan anggaran tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp153,3 triliun, yang terdiri atas pembiayaan nonutang negatif Rp8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp161,5 triliun. Pembiayaan nonutang terdiri dari perbankan dalam negeri sebesar Rp14,3 triliun dan nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp22,5 triliun. Perbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman Rp4,3 triliun dan SAL Rp10,0 triliun. Sedangkan nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan aset Rp475,0 miliar, dana investasi Pemerintah sebesar negatif Rp12,2 triliun, dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp5,0 triliun, dan dana kewajiban penjaminan negatif Rp706,0 miliar. Sementara itu, pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara/SBN (neto) Rp180,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp19,5 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) Rp500,0 miliar.

Penyusunan APBN dari tahun ke tahun terus dilakukan penyempurnaan. Terkait penyusunan APBN tahun 2013, menurut Herry Purnomo penyempurnaan yang penting yaitu adanya keterbukaan proses pembahasan, yaitu mekanisme/kriteria penggunaan anggaran hasil optimalisasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L) dilakukan dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Pemerintah secara terbuka, semua orang dapat mengikuti. Hal ini dilakukan untuk lebih menjamin transparansi.

Pada Kementerian Keuangan, ada

yang spesial dalam penyusunan APBN 2013. Salah satunya adalah penyatuan pengesahan DIPA. Pada awalnya, pengesahan DIPA dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPNB) selaku Bendahara Umum Negara agar dapat digunakan sebagai dokumen dasar pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara.

Mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tugas pengesahan DIPA dialihkan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Bagian terpenting dalam proses pengalihan tersebut adalah penyesuaian proses bisnis (alur kerja) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, yang semula berada pada 2 unit eselon I (DJA dan DJPB) menjadi satu kesatuan proses bisnis di DJA.

Disamping itu dengan penyatuan ini DIPA diterbitkan dengan lebih cepat dan lebih efisien. DIPA yang ditandatangani basah oleh DJA hanya DIPA induk. Untuk tahun 2013 hanya 300 DIPA saja yang ditandatangani basah. Sedangkan DIPA untuk masing-masing Satker, DIPA petikan, bukti pengesahan menggunakan *security cleansing* dengan *barcode*. Hal ini juga sejalan dengan UU ITE bahwa dokumen tidak mesti tanda tangan basah, namun *database* dijaga dan dikuatkan. Tahun depan juga direncanakan bahwa tidak ada lagi distribusi DIPA *Hard Copy*, desain DIPA dapat dicetak masing-masing di KPPN dimanapun dengan *password* tertentu sebagai bentuk pengamanan.

Beberapa pertimbangan pengalihan fungsi tersebut antara lain adalah penyerahan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan serta perubahan fokus peran DJPB. DJPB akan semakin fokus menjalankan peran dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara yang meliputi *treasury/cash management*, *budget execution*, dan *spending review*. Secara menyeluruh, nilai tambah yang diharapkan dari pengalihan fungsi ini

antara lain adanya efisiensi biaya (*cost effective*), peningkatan kualitas layanan (*better quality of service*), percepatan waktu layanan (*quick service time*). Pengalihan fungsi ini menyebabkan beberapa perubahan/penyesuaian proses bisnis dan penyesuaian aplikasi. Perubahan/penyesuaian proses bisnis yang terjadi di DJA meliputi proses penerimaan RKA-KL, mekanisme penelaahan, penerbitan Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) RKA-KL serta diperkenalkannya istilah DIPA Induk dan DIPA Petikan. Di DJPB terjadi penyesuaian proses bisnis di Kantor Wilayah dan KPPN serta satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Namun disadari bahwa proses penyatuan DIPA dalam satu atap yaitu (hanya) di DJA merupakan hal baru, sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi catatan saat implementasi DIPA satu atap ini yaitu:

- Dari sisi IT, hal ini harus bisa meng-cover seluruh Indonesia, padahal dalam beberapa ujicoba terdapat beberapa tempat yang mengalami *blank spot*. Namun hal ini sudah diidentifikasi dan sudah diantisipasi oleh tim IT
- Terkait dasar hukumnya. Sistem ini baru diatur dalam PMK, sehingga agar lebih kuat perlu peraturan yang lebih tinggi. Meskipun saat ini ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi khusus untuk cetak jarak jauh ini perlu dukungan peraturan perundang-undangan secara khusus
- Sistem pengamanan. Saat ini sistem pengamanan sudah dimaksimalkan, antara lain dengan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (LSN), *password* dan pengamanan khusus. Namun demikian DJA tetap perlu mewaspadai apabila ada *hacker* yang mencoba menembus sistem keamanan.
- Dengan adanya penyatuan DIPA satu atap dan tersedianya *single database*, maka hal ini mempercepat proses penerbitan DIPA sehingga diharapkan akan mempercepat proses pencairan.

Harapan kedepan terkait pengelolaan APBN, Dirjen Anggaran menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait penyusunan APBN pengembangan mekanisme penganggaran dilakukan dengan melanjutkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memegang prinsip bahwa APBN adalah instrumen pendorong pertumbuhan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan akan berupaya untuk mengoptimalkan peran dalam penyusunan anggaran, dimulai dengan memberikan koridor-koridor peningkatan efisiensi dan alokasi untuk kegiatan yang produktif mulai sejak Pagu Indikatif.

Pelaksanaan APBN merupakan tahap yang penting, diharapkan setiap belanja yang berasal dari APBN tidak hanya memiliki dampak perekonomian, namun juga didukung dengan administrasi yang akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran sebenarnya telah didelegasikan kepada Kementerian/Lembaga. Dengan adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam hal pengusulan pada waktu penelaahan Anggaran hingga proses pencairan dana sebenarnya bentuk dari tanggungjawab tersebut. Hal ini sebagai sebuah pembelajaran bahwa tanggung jawab pelaksanaan anggaran itu pada K/L bukan kepada Kementerian Keuangan lagi, ini juga sebagai bentuk mitigasi resiko dengan membuat resiko yang lebih aman. Ini yang terus kita edukasikan kepada K/L selaku Pengguna Anggaran.

Setiap K/L diharapkan bisa membelanjakan dengan kualitas yang bagus, tidak asal *spending*. Efisien dan sasaran tercapai. Diharapkan ada *disbursement plan*, sesuai dengan kontrak dan target penyelesaian kontraknya, sesuai dengan rencana realisasinya. Perencanaan harus lebih bagus kedepan. Jangan sampai uang sudah disediakan namun perencanaan belum ada sehingga akan dibintang/diblokir oleh DJA. *Mark up* diharapkan untuk dihindari, dan pemahaman terhadap revisi, juga perlu diperhatikan karena ada perubahan regulasi. “Dan saya

pesankan agar mobil dinas menggunakan BBM tidak bersubsidi”, imbuh Pejabat Eselon I yang pernah menjabat Dirjen Perbendaharaan ini dengan tersenyum lebar.

Salah satu permasalahan dalam hal penyerapan anggaran adalah menumpuknya pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran. Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa hal dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran (agar penyerapan pada semester I dapat lebih besar), melalui penyempurnaan peraturan pengadaan barang dan jasa dan juga membentuk TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran).

Diakhir wawancara, ketika ditanya terkait dengan pengembangan SDM DJA dalam rangka pengelolaan APBN, beliau menjelaskan bahwa pengembangan SDM pada DJA dilakukan dengan jalur *Degree* maupun *Non Degree*. Pendidikan dengan gelar sangat dikedepankan dan bagi pegawai DJA dengan jurusan yang memang dibutuhkan oleh DJA. Sedangkan *non degree*, dilakukan dengan Diklat. Untuk diklat dilakukan bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran. DJA banyak berharap ke Pusdiklat. Kita butuh kemampuan bernegosiasi, PBB secara lengkap, belajar IT yang terus berkembang. DJA juga memerlukan hal-hal yang sifatnya strategis dan *applicable* dengan tugas. Kedepan kita berharap dapat duduk dengan BPPK untuk membuat diklat yang memang lebih strategis bukan hal-hal yang detail lagi. Namun beliau berharap agar kualitas widyaiswara ditingkatkan khususnya terkait dengan *update* regulasi dan kebijakan baru di DJA. DJA siap memfasilitasi membuka pintu apabila para widyaiswara akan memutakhirkan pengalaman dan pengetahuannya di DJA. Pimpinan DJA akan siap memberikan hal-hal terbaru kepada para Widyaiswara. Demikian imbuh Bapak yang telah dikaruniai dua putri ini ketika menutup sesi wawancara eksklusif dengan Majalah Edukasi Keuangan.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Ilustrasi: V.M.I Bimo Adh

OLEH: ACHMAD ZUNAIDI

INI PERTAMA KALINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK TEMBUS DI ANGKA SERIBU TRILIUN

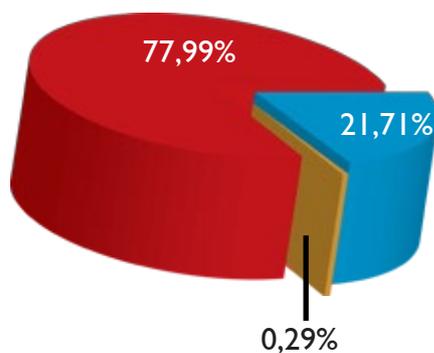
Target penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp 1.042 triliun, tidak termasuk cukai. Ini pertama kalinya target penerimaan pajak tembus di angka seribu

triliun. Angka ini tumbuh 24,79 persen dari realisasi penerimaan pajak pada 2012. Tentunya dengan angka sebesar ini, pemerintah berharap lebih leluasa dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Pajak sebagai unsur utama pendapa-

tan negara, keberadaannya sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Pajak berfungsi dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai dan pemeliharaan aset negara. Dengan pajak, roda pembangunan dapat berjalan dan membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini pajak juga berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. Dengan pajak, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Stabilitas dilakukan dengan mengatur peredaran uang, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

Namun demikian pajak bukanlah satu-satunya unsur dalam pendapatan Negara. Masih ada pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak, keduanya tidak boleh diabaikan. Dalam hal penerimaan pajak dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berarti penerimaan bea dan cukai termasuk di dalamnya. Semua penerimaan ini harus dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, komposisi unsur pendapatan negara sebagaimana grafik di bawah ini.



- Pajak
- PNBP
- Hibah

Sedangkan rincian lengkap perkembangan pendapatan negara sampai dengan tahun 2013 sebagaimana grafik di bawah ini.

Pengelolaan pemerintah atas pendapatan negara di atas tercermin melalui kebijakan-kebijakan yang akan

sumber penerimaan hibah tidak dapat ditargetkan secara presisi, mengingat lebih banyak tergantung pihak lain (pemberi hibah).

Kendala dan Tantangan Kebijakan Pendapatan Negara 2013

ber-sumber pendapatan pajak, terutama dari sektor-sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara.

Dari sisi perdagangan internasional, berbagai tantangan berpotensi mem-

Uraian	2007 Real.	2008 Real.	2009 Real.	2010 Real.	2011 Real.	APBNP Outlook	
I. Penerimaan Dalam Negeri	706,1	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.357,4	1.366,4
1. Penerimaan Perpajakan	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.021,8
a. Pajak dalam Negeri	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	968,3	970,9
i. Pajak Penghasilan	238,4	327,5	317,6	357,0	431,1	513,7	499,0
1. PPh Migas	44,0	77,0	50,0	58,9	73,1	67,9	76,6
2. PPh Nonmigas	194,4	250,5	267,6	298,2	358,0	445,7	422,4
ii. Pajak Pertambahan Nilai	154,5	209,6	193,1	230,6	277,8	336,1	347,3
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	23,7	25,4	24,3	28,6	29,9	29,7	31,7
iv. BPHTB	6,0	5,6	6,5	8,0	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	44,7	51,3	56,7	66,2	77,0	83,3	87,9
vi. Pajak Lainnya	2,7	3,0	3,1	4,0	3,9	5,6	5,0
b. Pajak Perdagangan Internasional	20,9	36,3	18,7	28,9	54,1	47,9	50,9
i. Bea Masuk	16,7	22,8	18,1	20,0	25,3	24,7	26,1
ii. Bea Keluar	4,2	13,6	0,6	8,9	28,9	23,2	24,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	341,1	344,6
a. Penerimaan SDA	132,9	224,5	139,0	168,8	213,8	217,2	220,2
i. Migas	124,8	211,6	125,8	152,7	193,5	198,3	201,1
1. Minyak Bumi	93,6	169,0	90,1	111,8	141,3	150,8	144,5
2. Gas Alam	31,2	42,6	35,7	40,9	52,2	47,5	56,6
ii. Non Migas	8,1	12,8	13,2	16,1	20,3	18,8	19,0
1. Pertambangan Umum	5,9	9,5	10,4	12,6	16,4	15,3	15,3
2. Kehutanan	2,1	2,3	2,3	3,0	3,2	3,1	3,1
3. Perikanan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
4. Pertambangan Panas Bumi	0,0	0,9	0,4	0,3	0,6	0,3	0,5
b. Bagian Laba BUMN	23,2	29,1	26,0	30,1	28,2	30,8	30,8
c. PNBP Lainnya	56,9	63,3	53,8	59,4	69,4	72,8	73,2
d. Pendapatan BLU	2,1	3,7	8,4	10,6	20,1	20,4	20,4
II. Hibah	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	0,8	6,0
Pendapatan Negara dan Hibah	707,8	981,6	848,7	995,2	1.210,5	1.358,2	1.529,6



dijalankan tahun 2013 ini. Melalui kebijakan pendapatan negara inilah, rakyat dapat melihat bagaimana pemerintah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, usaha apa yang dilakukan untuk mengoptimalkannya, serta kendala yang dihadapinya.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, penjelasan mengenai kebijakan pendapatan akan lebih difokuskan pada penerimaan perpajakan dan PNBP. Kedua sumber penerimaan tersebut mempunyai besaran angka yang signifikan. Sedangkan sumber penerimaan hibah, kurang signifikan. Disamping itu

Tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara tahun 2013, diperkirakan semakin kompleks. Di satu sisi, tuntutan kebutuhan alokasi anggaran semakin meningkat sebagai persiapan babak akhir RPJMN 2009—2014. Di lain pihak, pendapatan negara justru menghadapi perkembangan ekonomi makro yang tidak sepenuhnya berpengaruh positif terhadap penghimpunan pendapatan negara.

Dalam hal penerimaan pajak, tantangannya ialah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. Pemerintah perlu mulai menggali sum-

berikan dampak negatif bagi pendapatan negara. Dalam menjawab tantangan menuju perdagangan bebas, Indonesia semakin banyak menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain, baik perjanjian regional maupun bilateral. Perdagangan regional ini seperti *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*, dan *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*. Sedangkan perjanjian bilateral ini seperti *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Penandatanganan

perjanjian tersebut akan berpengaruh pada menurunnya kebijakan tarif bea masuk rata-rata Indonesia.

Namun demikian, perjanjian perdagangan internasional tersebut akan membuka akses pasar untuk produk Indonesia sehingga pendapatan bea masuk dari impor bahan baku dapat semakin meningkat. Harapannya, devisa ekspor yang berasal dari produk-produk Indonesia juga akan semakin meningkat.

Dari sisi ekspor, pengenaan bea keluar atas komoditas ekspor Indonesia yang bersifat hulu atau barang mentah, berpotensi untuk menghambat ekspor sehingga akan berdampak negatif terhadap pendapatan bea keluar. Namun, devisa dari ekspor akan semakin bertambah bila produk Indonesia dapat diekspor dalam bentuk barang jadi atau barang hasil olahan, bukan barang mentah. Berdasarkan kondisi terkini dapat diketahui bahwa terjadi keberhasilan dalam hilirisasi industri di dalam negeri terutama atas komoditas CPO, yaitu sudah mulai terjadi pergeseran komoditas ekspor dari komoditas CPO menjadi turunannya.

Tantangan lainnya ialah pendapatan bea keluar dapat berfluktuasi sesuai dengan harga barang ekspor di pasar internasional. Hal tersebut terjadi karena tujuan dari bea keluar bukan sebagai instrumen untuk menunjang pendapatan negara melainkan lebih kepada tujuan untuk: (a) pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri; (b) menjaga kelestarian sumber daya alam; (c) menjaga kestabilan harga komoditas tertentu di dalam negeri; dan (d) mengantisipasi peningkatan lonjakan harga yang tinggi untuk komoditas ekspor tertentu di pasar internasional.

Dalam hal penerimaan dari PNB, tantangan yang dihadapi pemerintah beragam wujudnya. Peningkatan pembinaan dan pengawasan sumber daya alam nonmigas sebagai upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut; penetapan *pay out ratio* yang tepat dalam optimalisasi dividen BUMN; dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNB serta menyempurnakan mekanisme penge-

lolaan PNB, terutama untuk PNB Kementerian/lembaga.

Untuk menjawab tantangan dan kendala di atas, pemerintah akan melaksanakan beberapa kebijakan bidang pendapatan negara tahun 2013. Kebijakan ini dapat dibagi menjadi tiga sesuai unsur-unsurnya dalam postur APBN: pajak, PNB, dan hibah. Sebagai gambaran, Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan negara pada sampai dengan 2013.

Kebijakan Perpajakan

Secara umum, sejumlah strategi akan dilaksanakan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2013. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kebijakan perpajakan, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan di bidang pendukung.

Dalam hal kebijakan, pemerintah merencanakan pengenaan pajak baru bakal diterbitkan tahun ini, antara lain pajak usaha kecil beromzet besar dan pajak pertambahan nilai bagi kegiatan membangun sendiri. Tentunya ini harus dibarengi dengan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

Dalam hal peningkatan kepatuhan, pemerintah berencana memanfaatkan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berbasis sektoral. Pemerintah juga berencana menyempurnakan sistem administrasi perpajakan.

Dua kebijakan di atas akan disokong dengan kegiatan pendukung yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Yakni penggunaan jaringan IT yang terintegrasi di seluruh kantor pajak di Indonesia; dan penggunaan aplikasi *approval web* untuk mengoptimalkan kerja layanan masyarakat.

Secara rinci, pemerintah akan melaksanakan beberapa langkah kebijakan perpajakan (termasuk cukai) tahun 2013 di bawah ini.

Untuk kebijakan di bidang pajak penghasilan (PPh), pemerintah akan memperluas perluasan basis pajak dan sekaligus perbaikan daya beli golongan

masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini dilakukan melalui penyesuaian pendapatan tidak kena pajak, penyerhanaan metode pengenaan PPh atas golongan usaha tertentu sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuan ekonominya, dan penyesuaian tarif PPh final atas penghasilan dari transaksi ekonomi tertentu.

Dalam hal kebijakan bidang pajak pertambahan nilai (PPN), pemerintah akan menyesuaikan pemungutan PPN dan aturan pengukuhan pengusaha kena pajak, termasuk melakukan registrasi ulang bagi pengusaha kena pajak dan penyempurnaan sistem informasi dan monitoring PPN.

Untuk penggalan potensi pajak, pemerintah akan memperbaiki metodenya atas beberapa komoditas pertanian dan pertambangan. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus Bidang Pertambangan dan Migas termasuk di dalamnya.

Disamping itu juga pemerintah mengembangkan satuan/unit *quality assurance* perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Kebijakan ini akan didukung oleh pengintegrasian Sistem IT Ditjen Pajak dari seluruh KPP di wilayah Indonesia, termasuk pengintegrasian dengan program PINTAR (*Project for Indonesia Tax Administration Reform*).

Dalam kaitannya dengan pemutakhiran data wajib pajak, kegiatan Sensus Pajak Nasional akan dilakukan dengan metode yang lebih efektif dan akses pasar yang lebih luas, termasuk perbaikan sistem perekaman dan pengolahan data perpajakan yang berbasis IT.

Untuk melindungi kepentingan nasional dalam soal perdagangan, pemerintah juga akan melakukan renegotiasi *Tax Treaty* dengan beberapa negara. Ini mengacu pada kepentingan nasional dan mencegah penghindaran pajak, termasuk penerbitan peraturan terkait *transfer pricing* serta mendorong perjanjian MAP (*Mutual Agreement Procedure*) dan APA (*Advance Pricing Agreement*).

Sejalan dengan seluruh kebijakan di atas pemerintah juga akan melaksanakan langkah berupa: pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang Minerba dalam bentuk mentah (bijih) yang bertujuan menjaga pasokan dalam negeri dan pemurnian barang tambang dalam negeri; pemberian insentif fiskal berupa pembebasan/pengurangan PPNBM bagi pengembangan industri kendaraan bermotor dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan (*hybrid dan Low Cost Green Car*); ekstensifikasi Cukai dan Bea Keluar; renegotiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; Otomatisasi administrasi piutang bea dan cukai; dan penerapan *billing system* untuk pelayanan cukai.

Kebijakan PNBPN

Ada tiga upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari PNBPN: 1) Optimalisasi PNBPN dari SDA dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup; 2) Optimalisasi penarikan dividen BUMN; dan Perbaikan pemungutan dan penyetoran PNBPN K/L.

Upaya pertama, optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas juga tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas telah diatur bahwa dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tersebut juga diwajibkan kepada setiap kontraktor untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan operasi yang berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pascaoperasi kegiatan usaha hulu migas, terutama dalam hal perbaikan lingkungan di wilayah kerja yang ditinggalkan.

Beberapa upaya akan dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan optimalisasi PNBPN SDA. Upaya ini meliputi peningkatan *lifting* migas, pengembangan lapangan gas baru dan percepatan sik-

lus produksi gas, penambahan wilayah kerja pertambangan migas, peningkatan penerimaan pertambangan umum melalui revisi tarif dan jenis, serta penyelesaian renegotiasi kontrak pertambangan.

Dalam hal peningkatan *lifting* migas, pemerintah mengupayakan penurunan *cost recovery* terhadap *gross revenue*. penentuan besaran *cost recovery* ini berdasarkan pedoman/peraturan yang berlaku yakni PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Migas. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai *negative list* komponen biaya yang dapat di-*recovery* yang penentuannya didasarkan pada kaidah teknik dan kelayakan biaya sesuai *best practices* yang ada. Di samping itu, pembayaran atas *cost recovery* tersebut didasarkan pada hasil audit yang ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan *gross revenue* dari sektor hulu migas merupakan data awal yang digunakan dalam perhitungan penerimaan migas. Perhitungan penerimaan migas dalam APBN mengacu kepada asumsi *lifting* dan harga migas yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN. Dengan demikian besaran *gross revenue* akan tergantung kepada besaran *lifting* dan asumsi harga yang ditetapkan.

Upaya berikutnya, optimalisasi penarikan dividen BUMN melalui penetapan *payout ratio* mengacu pada *business plan* BUMN. Kebijakan *pay out ratio* dalam RAPBN 2013 dirumuskan dengan mempertimbangkan bidang usaha, kebutuhan investasi BUMN dan strategi pengembangan BUMN secara terpadu.

Dengan kebijakan tersebut, BUMN diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi melalui peningkatan *capital expenditure* maupun penyisihan laba yang ditahan, dalam rangka peningkatan kinerja BUMN. Kebijakan penarikan *pay out ratio* dari dividen BUMN didasarkan kepada kepemilikan saham mayoritas Pemerintah pada BUMN serta pertimbangan kebutuhan investasi BUMN (rencana bisnis BUMN). Selain itu, penarikan dividen kepada masing-

masing BUMN juga mempertimbangkan kesehatan BUMN serta sumbangan laba BUMN kepada APBN untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Kebijakan *pay out ratio* dividen BUMN yang ditarik oleh Pemerintah adalah sebagai berikut: (a) *pay out ratio* 0 persen-25 persen untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi, dan BUMN dengan akumulasi rugi; (b) *payout ratio* 5 persen-55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi; (c) *pay out ratio* 40 persen-45 persen untuk Pertamina, dan 30 persen untuk PT PLN; (d) untuk BUMN yang mendapatkan laba tetapi kesulitan *cash flow*, tidak diminta dividen agar BUMN tersebut dapat menstabilkan *cash flow*-nya, sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional BUMN. Selain itu, BUMN diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (*capital expenditure*) BUMN, terutama dari penyisihan laba yang ditahan, dalam rangka peningkatan kinerja BUMN.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Pemerintah tidak menarik *pay out ratio* terlalu tinggi pada BUMN (dominan lebih kecil dari 55 persen), agar BUMN tetap mempunyai ruang gerak untuk menggunakan labanya bagi kegiatan investasi dalam rangka pengembangan perusahaan ke depan.

Upaya terakhir melakukan perbaikan pemungutan dan penyetoran PNBPN kementerian/lembaga. Upaya ini dilakukan melalui revisi berbagai peraturan yang mengatur tarif dan jenis PNBPN serta mekanisme pengelolannya.

*Penulis adalah Kasi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal pada Direktorat Jenderal Anggaran

PENINGKATAN & PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT dengan BELANJA NEGARA yang **TEPAT**

OLEH: NOOR C. MADJID

Enam puluh tujuh tahun sudah Indonesia merdeka. Masa yang seharusnya cukup untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Ribuan triliun belanja negara telah dialokasikan dan dihabiskan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat negeri ini. Impian para pejuang di masa kemerdekaan tentang negeri yang “sejahtera adil dan makmur” ternyata masih belum tergapai. Kenyataan yang dihadapi dari generasi ke generasi, dari orde satu ke orde berikutnya tidak seindah mimpi dan cerita “negeri merdeka” yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Salah satu syarat mewujudkan cita-cita kemerdekaan adalah **fondasi ekonomi yang kuat**.

Belanja Negara Yang Berkualitas

Pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu negara tercinta ini diharapkan memiliki ekonomi yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas,

serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. Secara teoritis, ekonomi yang kuat dan kemajuan suatu bangsa ditandai oleh tingginya tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar tingkat PDB maka ekonomi negara dianggap sema-



Ilustrasi: V.M.I. Bimo Adi

kin kuat. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-16 negara dengan PDB terbesar di dunia. Diharapkan pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan, Indonesia menduduki peringkat lima besar dunia. Namun harus tetap diingat tingginya PDB harus disertai dengan pemerataan sehingga pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat. PDB tinggi tanpa diiringi pemerataan akan memicu kesenjangan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial yang berbahaya.

Pendorong pertumbuhan ekonomi (tercermin dari peningkatan PDB) merupakan akumulasi tingkat konsumsi masyarakat, investasi, belanja negara, ekspor dikurangi dengan import. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, belanja negara akan meningkatkan pendapatan negara. Itulah sebabnya peran belanja pemerintah sebagai salah satu penghela pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting.

Belanja negara dalam jumlah yang besar dan berkualitas sangat menentukan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Belanja negara dikatakan berkualitas apabila belanja tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Pengeluaran negara untuk infrastruktur, belanja modal serta belanja barang untuk mempertahankan fasilitas publik yang ada, diyakini lebih berkualitas dibandingkan dengan belanja negara untuk subsidi, belanja barang habis pakai dan belanja pegawai.

Pada tahun 2012 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 6,2-6,3 persen. Meski sedikit di bawah target APBN 2012 sebesar 6,5 persen, capaian pertumbuhan pada kisaran 6,3 persen merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi karena dicapai pada saat perekonomian global mengalami perlambatan.

Ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global didorong oleh tingginya permintaan domestik yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. pengeluaran pemerintah yang juga merupakan kom-

ponen pendukung pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor impor juga mengalami penurunan sebagai akibat perlambatan ekonomi di negara-negara. Dalam kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di bawah Cina, dan bahkan mampu melampaui India.

Kebijakan Belanja Negara Dalam APBN 2013

Tema APBN 2013 adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mencapai tema tersebut,

“MEMPERKUAT
PEREKONOMIAN
DOMESTIK BAGI
PENINGKATAN
DAN
PERLUASAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT”

dari sisi belanja APBN pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Untuk menjaga agar belanja Negara berkualitas langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah:

1. Menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan.
2. Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui *flat policy* pada belanja ba-

3. Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung *domestic connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata;
4. Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial;
5. Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi;
6. Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi baik subsidi energi maupun subsidi non-energi;
7. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal;
8. Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional;
9. Menyempurnakan pelaksanaan *Performance Based Budgeting* (PBB) dan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (*quality of spending*);

Tantangan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan APBN 2013 berbagai tantangan berat harus dihadapi oleh pemerintah. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah:

- a) **Pelemahan ekonomi di benua Eropa dan Negara-negara maju.** Resesi ekonomi akan menyebabkan permintaan terhadap produk Indonesia akan berkurang. Pengurangan produksi selanjutnya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja dan selanjutnya meningkatkan

pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus mampu mengantisipasi penurunan ekspor dengan peningkatan investasi dalam negeri dengan membangun dan membuat sektor riil tetap berjalan normal, serta mengendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru. Untuk masyarakat yang “kalah” diperlukan proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi.

b) **Alokasi Anggaran infrastruktur yang terbatas.** Porsi anggaran infrastruktur dalam APBN 2013 sebesar 12 persen (201,3 triliun), lebih kecil dibandingkan porsi subsidi energi yang sebesar 16,3 persen (274,7 triliun). Kualitas infrastruktur yang handal diyakini akan mendorong investasi dalam negeri. Biaya logistik harus dapat terus diturunkan, hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, juga dilakukan untuk menghindari *middle income trap*. Sehingga Indonesia luput dari stagnasi pembangunan seperti yang dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.

c) **Subsidi BBM yang kian meningkat.** Salah satu belanja yang senantiasa menjadi polemik yang luas adalah belanja subsidi. Kuota BBM bersubsidi membengkak menjadi 45,27 juta kiloliter dari kuota 2012 sebesar 40 juta kl. Subsidi BBM dalam RAPBN 2013 sebesar Rp. 193,8 triliun, naik 41 persen dibandingkan APBN-P 2012, dengan kuota sebesar 46 juta kiloliter. Bagi pengusung paham perekonomian pasar bebas, subsidi yang tidak tepat adalah “dosa” yang harus dihindari karena subsidi mendistorsi pasar, dan dari sisi pemerintah subsidi menimbulkan biaya ekonomi yang besar. Dalam jangka panjang subsidi juga dapat menimbulkan

efek ketidak-mandirian bagi bangsa. Pada sisi lain subsidi juga diyakini sebagai salah satu “katup pengaman” terhadap gejala politik dan sosial. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan kepada warganya yang “kalah” dan perwujudan perlindungan bagi mereka yang kalah tersebut adalah

SEBAGAIMANA SUMBER DAYA YANG LAIN, KARAKTERISTIK UTAMA DARI ANGGARAN ADALAH JUMLAHNYA YANG TERBATAS

subsidi. Permasalahan yang harus dijawab oleh pemerintah adalah bagaimana kebijakan subsidi dijalankan dengan tepat untuk melindungi mereka yang “tersingkir dan kalah” tanpa harus mendistorsi pasar dan menimbulkan permasalahan baru.

d) **Menjaga Fiscal Sustainability.** Dalam pengelolaan fiskal yang sehat, keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan



Sumber: *blog.timesunion.com*

stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (*prudent*) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Subsidi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang gerak anggaran (*fiscal space*) sehingga perlu penataan kembali besaran subsidi dalam APBN agar subsidi tepat sasaran dan tepat jumlah. Pengendalian subsidi BBM yang sehat ditengah naik turunnya harga minyak dunia, perlu dilakukan tanpa harus merugikan rakyat.

Sebagaimana sumber daya yang lain, karakteristik utama dari anggaran adalah jumlahnya yang terbatas. Langkah pertama untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan menetapkan prioritas. Selanjutnya dari sisi belanja, seharusnya anggaran diarahkan untuk belanja yang berkualitas melalui upaya efisiensi, menjamin penggunaan anggaran sesuai konsep anggaran berbasis kinerja, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran. Dengan kebijakan belanja negara yang berkualitas, cita-cita masyarakat adil dan makmur Insyaallah tidak akan berhenti hanya diatas kertas.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kebijakan Pembiayaan *Dalam* APBN 2013

OLEH: TANDA SETIYA

Defisit Anggaran dalam APBN 2013 sebesar Rp153,3 T. Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran nominal defisit tersebut dalam UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013. Secara sederhana defisit dapat dimaknai bahwa jumlah pendapatan (T) dibanding belanja (G) untuk APBN 2013 masih lebih kecil, untuk itu perlu ditutup dengan kebijakan pembiayaan.

Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL), dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kenapa pemerintah menempuh kebijakan defisit dalam APBN? Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2013, alasan pemerintah masih menempuh kebijakan defisit APBN adalah mengingat kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi kedepan, kebijakan fiskal pada tahun 2013 diperkirakan masih akan tetap ekspansif, dimana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara.

Hal tersebut diperlukan terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepannya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi menuju titik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini, disertai dengan keyakinan pemerintah akan lebih baiknya kondisi perekonomian kedepan. Dalam tahun 2013, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen, diharapkan dapat mendukung penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing menjadi sebesar 5,8-6,1 persen dan 9,5-10,5 persen.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB). Secara umum kebijakan fiskal tahun 2013 masih bersifat ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Kebijakan pendapatan negara; (2) Kebijakan belanja negara; dan (3) Kebijakan pembiayaan.

Menurut Robert Barro (1989) defisit anggaran dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka mempercepat pembangunan maka diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Jika dana dalam negeri tidak mencukupi, maka negara melakukan pinjaman ke luar negeri daripada menaikkan pajak yang membebani masyarakat. Karena negara memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya maka langkah ini ditempuh.

2. Pemerataan pendapatan masyarakat

Kebijakan defisit diperlukan dalam rangka pemerataan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya dengan pemberian subsidi dan program-program lainnya untuk daerah yang miskin dan terpencil, sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju.

3. Melemahnya nilai tukar

Negara yang melakukan pinjaman luar negeri, akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Hal ini disebabkan nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

4. Pengeluaran akibat krisis ekonomi

Apabila terjadi krisis ekonomi maka akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, sementara itu penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu. Sebagaimana diketahui bahwa negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Maka negara terpaksa menambah pengeluarannya untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

5. Realisasi tidak sesuai dengan rencana

Namanya perencanaan, tidak ada yang bisa menjamin pada presisi yang tepat. Apabila realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka berarti beberapa

kegiatan proyek atau program harus dipotong. Ternyata pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena ada kaitannya dengan proyek lain untuk mencapai kinerja pembangunan. Untuk itu pemerintah harus menutupi kekurangan tersebut, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

6. Pengeluaran karena inflasi

Penyusunan anggaran negara didasarkan pada standar harga yang ada. Dalam kenyataan selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat juga dapat menurun. Apabila terjadi inflasi (kenaikan harga-harga) berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Kondisi ini apabila dibiarkan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Pemerintah terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga yang telah ditetapkan.

Dari beberapa latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan anggaran defisit ditempuh dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu sesuai tujuan pemerintah.

Bagaimana menutup defisit APBN 2013

Berdasarkan UU APBN 2013, bahwa pendapatan negara dialokasikan sebesar Rp 1.529,7 T sedangkan belanja negara dialokasikan sebesar Rp 1.683,0 T sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 153,3 T yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran.

Pembiayaan anggaran secara umum diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) pembiayaan anggaran dalam negeri dan luar negeri; (2) pembiayaan anggaran utang dan nonutang; (3) pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran.

Pembiayaan anggaran dalam dan luar negeri merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber pembiayaan baik sumber pembiayaan dalam negeri maupun sumber pembiayaan luar negeri. Pembiayaan

PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2013
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah *)
A. Pembiayaan Dalam Negeri	172.792,1
1. Perbankan Dalam Negeri	14.306,6
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj. (RDI)	4.306,6
b. SAL	10.000,0
2. Non Perbankan Dalam Negeri	158.485,5
a. Hasil Pengelolaan Aset	475,0
b. Surat Berharga Negara (neto)	180.439,9
c. Pinjaman Dalam Negeri	500,0
d. Dana Investasi Pemerintah dan Restrukturisasi BUMN	(12.223,4)
e. Kewajiban Penjaminan	(706,0)
f. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5.000,0)
g. Cadangan Pembiayaan Investasi	(5.000,0)
B. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(19.454,2)
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	45.919,1
1. Pinjaman Program	6.510,0
2. Pinjaman Proyek	39.409,1
II. Penerusan Pinjaman	(6.968,3)
III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(58.405,0)
JUMLAH	153.337,9
%Defisit terhadap PDB	(1,65)

Sumber: Data Pokok APBN 2013 (diolah)

dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sementara itu, pembiayaan luar negeri bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Pembiayaan anggaran utang dan nonutang merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh melalui penerbitan utang dan pembiayaan nonutang. Pembiayaan anggaran utang terdiri dari Surat Berharga Negara (Netto), pembiayaan luar negeri (Netto), dan pinjaman dalam negeri (Netto). Pembiayaan nonutang bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri.

Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran merupakan

klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan karakteristik *cash inflow* (penerimaan pembiayaan) dan *cash inflow* (pengeluaran pembiayaan). Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan nonutang dan penerimaan pembiayaan utang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari pengeluaran utang dan pengeluaran nonutang.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013, Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan sumber pembiayaan luar negeri. Untuk pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 T dan pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp 19,5 T (tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional).

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 T dipenuhi dari perbankan dalam

negeri sebesar Rp14,3 T. Non Perbankan dalam negeri sebesar Rp 158,4 T. Sumber pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri didominasi oleh Surat Berharga Negara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 180,4 T. Sedangkan pembiayaan luar negeri Netto sebesar negatif Rp 19,5 T dipenuhi dari penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 45,9 T; penerusan pinjaman negatif Rp 6,9 T serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp 58,4 T.

Apabila ditilik dari sudut pandang sumber pembiayaan dari utang dan nonutang, APBN 2013 masih menitikberatkan pada pembiayaan utang. Pembiayaan dari utang diperkirakan sebesar Rp 226,8 yang terdiri dari SBN Netto Rp 180,4 T; Pinjaman Luar Negeri Bruto sebesar Rp 45,9 T dan Pinjaman Dalam Negeri Netto sebesar Rp 0,5 T.

Pembiayaan Nonutang untuk TA 2013 diperkirakan sebesar Rp 18,8 T. Sebagian besar berasal dari SAL sebesar Rp 10,0 T, diikuti oleh penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman Rp 4,3 T dan hasil pengelolaan aset sebesar Rp 0,5 T.

Pembiayaan anggaran defisit juga dapat dilihat dari sudut pandang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk APBN Tahun Anggaran 2013, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 241 T. Penerimaan tersebut berasal dari Non Utang sebesar Rp 14,3 T dan Utang sebesar Rp 226,8 T.

Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 88,3 T digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Non Utang sebesar Rp 22,9 T dan pengeluaran pembiayaan utang sebesar Rp 65,4 T. Pengeluaran pembiayaan Non Utang digunakan untuk Dana Investasi Pemerintah dan PMN sebesar Rp 12,2 T. Dana Pengembangan Pendidikan sebesar Rp 5,0 T. Kewajiban penjaminan sebesar Rp 0,7 T dan Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp 5,0 T.

Sedangkan dana pengeluaran pembiayaan utang sebesar Rp 65,4 T digunakan untuk penerusan pinjaman sebesar Rp 6,97 T dan untuk pembayaran cicilan Pokok Utang Luar Negeri sebesar Rp 58,4 T.

Kebijakan Pembiayaan APBN 2013

Kebijakan yang kentara dilakukan oleh Pemerintah terkait pembiayaan APBN 2013 dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama kebijakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari utang dan kedua kebijakan terhadap sumber pembiayaan APBN dari non-utang.

Pembiayaan melalui utang dalam APBN 2013 dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung.

Pemenuhan pembiayaan melalui

utang pada tahun 2013 harus diperseimbangkan (1) strategi umum pengelolaan utang; (2) proyeksi kondisi perekonomian dan pasar keuangan di tahun 2013; (3) isu-isu terkini dalam pengelolaan utang; serta (4) kebijakan pembiayaan utang 2013.

Adapun kebijakan pembiayaan melalui utang di tahun 2013 adalah: (1) menggunakan pinjaman luar negeri secara cermat terutama untuk pembiayaan proyek dan prosesnya tanpa agenda politik dan dengan persyaratan yang dapat diterima; (2) mempertahankan kebijakan *net negative flow* pinjaman luar negeri; (3) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 21–23 persen pada akhir tahun 2013; (4) mengembangkan instru-

men SBSN atau Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur; (5) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali; (6) melakukan konversi surat utang Pemerintah di BI, yang tidak dapat diperdagangkan menjadi SBN yang dapat diperdagangkan; dan (7) dalam hal K/L akan menggunakan sumber pembiayaan yang bersifat *tied loan* hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi terkait di DPR.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri di saat yang bersamaan Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan *multiplier* perekonomian nasional.

Terkait sumber pembiayaan nonutang pada tahun 2013, sedikit berbeda dibandingkan dengan sumber pembiayaan non-utang tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi ketersediaan dana masing-masing sumber pembiayaan serta kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan sumber pendanaan tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2013, kebijakan pembiayaan nonutang yang ditempuh oleh Pemerintah meliputi:

1. Pemanfaatan dana SAL, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN dan membiayai defisit anggaran
2. Mengarahkan penggunaan dana investasi pemerintah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas investasi pemerintah, terutama untuk pengambilalihan PT Inalum
3. Pengalokasian dana PMN untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program KUR, modal awal BPJS, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/Lemba-

PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2013 Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan (Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	Jumlah *)
Surplus Desfisit	153
PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2013	153
A. Penerimaan Pembiayaan	240,9
1. Non Utang	14,0
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj. (RDI)	4,0
b. SAL	10,0
2. Utang	226,9
a. Surat Berharga Negara (neto)	180,4
b. Pinjaman Luar Negeri Bruto	46,0
c. Pinjaman Dalam Negeri Neto	0,5
B. Pengeluaran Pembiayaan	88,3
I. Non Utang	22,9
1. Dana Investasi Pemerintah dan PMN	12,2
a. PIP	1,0
b. Penyertaan Modal Negara	6,4
c. Dana Bergulir	5,0
2. Dana Pengembangan Pendidikan	5,0
3. Kewajiban Pinjaman	0,7
4. Cadangan Pembiayaan Investasi	5,0
II. Utang	65,4
a. Penerusan Pinjaman	7,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	58,4
JUMLAH	153

Sumber UU APBN 2013 (Diolah) *Angka Pembulatan

- ga Keuangan Internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF)
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan melakukan alokasi investasi secara selektif melalui dana investasi pemerintah
 5. Menambah dana bergulir untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal, pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

donesia. Sehingga kebijakan pembiayaan APBN 2013 dapat dikatakan terkendali.

Risiko Fiskal

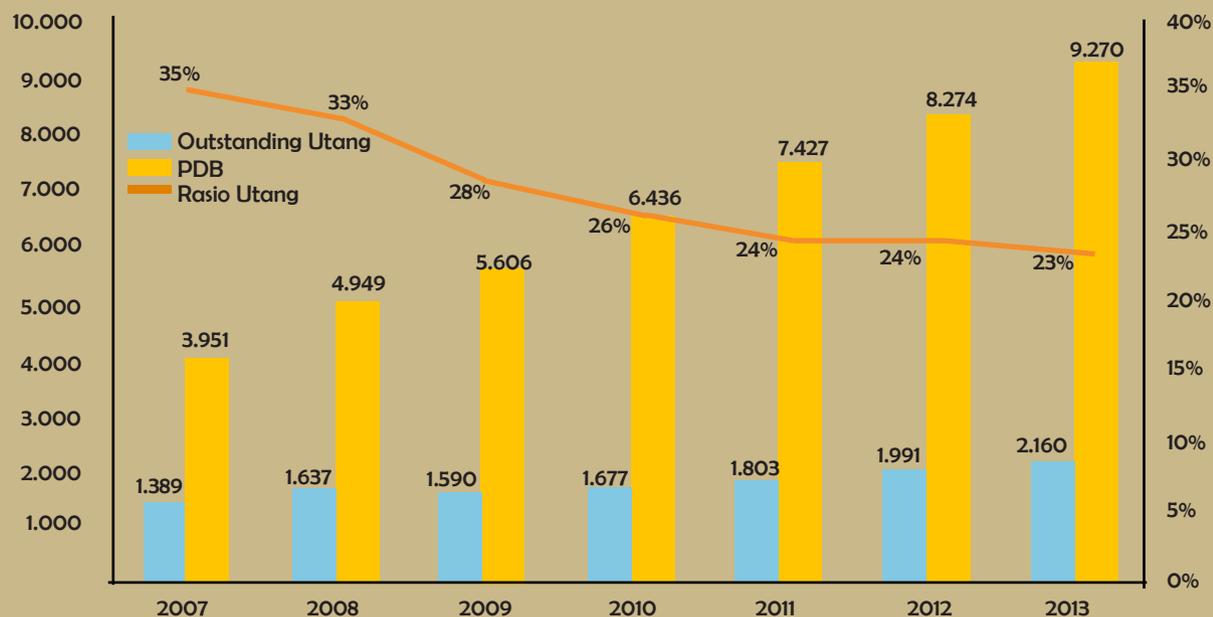
Pada bagian akhir artikel ini juga disampaikan pemahaman tentang risiko fiskal. Hal ini penting dipahami karena dalam kenyataannya, risiko fiskal sangat berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang ditempuh pemerintah. Risiko Fiskal adalah segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN.

Definisi ini berubah dari definisi sebelumnya dimana risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit

gung jawab fiskal (*fiscal accountability*); serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pada tahun 2013, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko utang pemerintah pusat; (3) kewajiban kontinjensi pemerintah pusat; dan (4) risiko pengeluaran negara yang dimandatkan atau diwajibkan (*mandatory spending*).

Mengingat pentingnya kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal. Maka mendorong Pemerintah untuk melaksanakan



Sumber : Ringkasan APBN 2013, Kementerian Keuangan

- Menengah (KUMKM)
6. Pengalokasian dana kewajiban penjaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Secara umum besaran rasio defisit APBN 2013 sebesar 1,65 % dibanding PDB masih dibawah 3 % terkategori aman. Sedangkan rasio jumlah utang dibanding dengan PDB relatif masih kecil yaitu 23 %. Angka ini jika dibandingkan dengan APBN tahun-tahun sebelumnya semakin menurun dan dapat menjadi indikator semakin membaiknya perekonomian In-

APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasari atas kondisi bahwa risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan.

Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*); (3) meningkatkan tang-

pengelolaan risiko fiskal dan mengungkapkannya risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Surplus?

“SUDAH SAATNYA KITA BERPIKIR
ANGGARAN SURPLUS”

OLEH: TANDA SETIYA

Membahas APBN merupakan hal yang menarik. Sehari sejak APBN 2013 ditetapkan, berbagai komentar lalu lalang di media masa mulai dari talk-show di TV, seminar di kantor-kantor LSM hingga komentar di media cetak. Ini menandakan bahwa membicarakan APBN memang memiliki nilai tersendiri dan membuktikan bahwa APBN memang penting.

Dalam rangka memperkaya khasanah informasi kepada publik, terkait APBN 2013, Majalah Edukasi Keuangan berhasil melakukan wawancara dengan Dr. Revrisond Baswir dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Berikut dituturkan kembali kepada pembaca yang budiman, hasil wawancara tersebut.

Tanya (T): UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013 telah ditetapkan. Terkait dengan Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,529 T ditempuh dengan upaya meningkatkan pendapatan pajak, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Menurut Bapak bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik ?

Jawab (J): Kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebaiknya dikaitkan secara langsung dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui, indeks Gini kita akhir-akhir ini terus membesar. BPS mengemukakan angka 0,41 untuk tahun 2012. Namun sementara kalangan menduga angka itu sesungguhnya sudah membengkak mencapai 0,46. Sehubungan dengan itu, kebijakan perpajakan yang bersifat lebih progresif ada baiknya dipertimbangkan.

T: Masih terkait dengan perpajakan salah satu langkah yang ditempuh dengan memberikan insentif perpajakan. Insentif perpajakan ini diberikan dengan meningkatkan Pendapatan Tidak Kena Pajak/PTKP Rp15.840.000/tahun menjadi Rp24.300.000/tahun dan yang lainnya berupa kebijakan perpajakan yang

diarahkan pada industri yang ramah lingkungan melalui pembebasan/pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor ramah lingkungan (Hybrid and Low Cost Green Car). Bagaimana menurut pendapat Bapak supaya program insentif pajak tersebut dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai ?

J: Terkait insentif pajak untuk kendaraan bermotor, perhatian sebaiknya tidak hanya dibatasi pada sifat ramah lingkungan dari kendaraan bermotor tertentu. Tetapi sudah sewajarnya bila dikaitkan secara langsung dengan masalah kepadatan lalu lintas yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia. Sejauh ini, jika dibandingkan dengan banyak negara lain, tarif pajak kendaraan bermotor di Indonesia (PPnBM) mungkin sudah tergolong cukup mahal. Namun kenyataannya, tingkat permintaan kendaraan bermotor terus membengkak. Sebab itu, kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor yang bersifat progresif perlu mendapat perhatian.

T: Upaya yang dilakukan pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan kebijakan Kapabeanaan dan Cukai. Upaya tersebut diantaranya dengan adanya pelayanan kepabeanaan 24 jam sehari 7 hari seminggu, tahun 2013 seluruh kantor Bea dan Cukai sudah beroperasi sebagai kantor modern dengan penerapan prinsip pelayanan yang baku dan beberapa kebijakan lainnya terkait pengenaan tarif. Menurut pendapat Bapak langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah (DJBC) terkait upaya untuk meningkatkan penerimaan dari kepabeanaan dan cukai ?

J: Khusus untuk DJBC, masalah pengawasan perlu terus ditingkatkan. Ini tidak semata-mata karena DJBC tergolong rentan dengan berbagai bentuk kejahatan kepabeanaan, namun juga erat kaitannya dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil pungut bea dan cukai

benar-benar mencapai target sebagaimana dianggarkan. Terkait dengan itu, pembenahan dalam lingkungan DJBC saja mungkin belum mencukupi. Pembenahan lebih lanjut dalam tata kelola kepelabuhan mungkin perlu mendapat perhatian.

T: Langkah untuk meningkatkan pendapatan diluar pajak dilakukan dengan optimalisasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diperkirakan angkanya mencapai Rp332,2 T. Salah satu kebijakan yang perlu dicermati adalah dengan optimalisasi investasi untuk efisiensi BUMN. Bagaimana menurut Bapak terkait kebijakan ini supaya berjalan dengan baik ?

J: Masalah mendasar yang membelit BUMN adalah sangat banyaknya kepentingan yang secara terus menerus mengintervensi penyelenggaraan BUMN pada hampir semua tahap kegiatannya. Mulai dari rekrutmen komisaris dan direksi, rekrutmen pegawai, pengelolaan usaha, hingga ke berbagai jenis kegiatan non reguler lainnya. Hal itu tidak hanya berdampak pada merosotnya moral kerja seluruh jajaran BUMN, tetapi cenderung menjadi pembenar untuk memelihara inefisiensi BUMN. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, seluruh jajaran pemerintah wajib mengubah perilaku mereka dalam menyikapi keberadaan BUMN. Jika memungkinkan, ada baiknya bila independensi penyelenggaraan BUMN segera dilakukan, yaitu dengan membentuk BUMN *superholding* sebagai Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Cara penyelenggaraan BUMN sebagai berlangsung selama ini tidak hanya terbukti gagal dalam meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga terbukti gagal dalam mengurangi jumlah BUMN yang tergolong tidak sehat

T: Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2013 nilainya mencapai Rp1.683 T. Rp201,3 T dialokasikan untuk Belanja Infrastruktur. Menurut Bapak infrastruktur apa yang sepatutnya dibangun oleh Pemerintah untuk saat

ini agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dicanangkan dalam target asumsi makro 2013 ?

J: Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara makro. Tetapi harus diletakkan pula dalam konteks usaha mengurangi kesenjangan ekonomi yang cenderung semakin melebar. Bahkan, ada baiknya bila dikaitkan pula dengan berbagai persoalan lain, seperti upaya menggeser pembangunan ke daerah tertinggal, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Secara khusus, saya lebih cenderung bila pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk sektor pertanian dan perdesaan. Ini tidak hanya penting dalam rangka melakukan pemerataan, tetapi juga penting untuk memfasilitasi proses hilirisasi dan mempercepat tumbuhnya industrialisasi pedesaan.

T: Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp115,5 T untuk penanggulangan kemiskinan, Rp336,8 T untuk pendidikan, 55,9 T untuk kesehatan masyarakat, Rp63,2 T untuk ketahanan pangan. Menurut Bapak program-program yang bagaimanakah yang perlu dijalankan oleh pemerintah agar upaya meringankan beban masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat tercapai ?

J: Sejalan dengan jawaban saya sebelumnya, pada dasarnya pemerintah perlu memiliki cetak biru yang bersifat menyeluruh (*grand strategy*) dalam mengalokasikan dan menyalurkan berbagai jenis dana tersebut. Sebagai misal, pelaksanaan berbagai program yang terkait dengan penyaluran dana-dana itu harus dikaitkan dengan upaya terus menerus untuk memperkuat pemerintah daerah dan menggeser pelaksanaan pembangunan ke luar Jawa. Bahkan, jika memungkinkan, pelaksanaan program-program tersebut dikaitkan secara langsung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagai

misal dengan mendorong penyelenggaraan sistem anggaran partisipatif. Dengan demikian, pengalokasian dana-dana tersebut sebaiknya tidak hanya dilihat berdasarkan besar atau kecilnya jumlah dana yang disalurkan, tetapi dikaitkan secara langsung dengan lokasi dan metode pengelolaannya.

T: Untuk TA 2013 Pemerintah ternyata masih menerapkan kebijakan defisit. Defisit pembiayaan sebesar Rp153,3 T. Kebijakan yang ditempuh dengan pembiayaan dalam negeri sebagai faktor utamanya. Menurut Bapak upaya yang perlu dilakukan untuk menutup defisit tersebut dengan langkah apa saja ?

J: Saya sudah sejak lama mengusulkan agar kita segera menghentikan kebiasaan menyusun anggaran yang bersifat defisit. Sebab itu, yang perlu dipikirkan bukanlah soal bagaimana cara menutup defisit, melainkan bagaimana cara meniadakan defisit atau menyusun anggaran secara berimbang. Secara khusus, dilihat dari

sudut pendapatan dan belanja negara, termasuk dengan menyimak realisasinya, saya sama sekali tidak melihat adanya urgensi untuk menyusun anggaran defisit. Lain halnya bila dilihat dari sudut pembiayaan. Hemat saya, anggaran defisit selama ini disusun karena adanya kebutuhan terus menerus untuk menutup defisit pembiayaan. Sebagaimana diketahui, transaksi utang luar negeri kita selalu mengalami selisih negatif. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pembiayaan dalam negeri, jelas sekali kelihatan betapa kita cenderung terjebak dalam praktek gali lobang tutup lobang. Sebab itu, alih-alih mencari jalan untuk menutupi defisit, mungkin ada baiknya bila kita belajar menyusun anggaran surplus, sehingga selisih lebihnya dapat digunakan untuk menutupi selisih negatif yang terjadi pada sisi pembiayaan. [TS]

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Dr. Revrisond Baswir

Lahir pada 28 Februari 1958.

Bidang Keahlian : "Ekonomi Kerakyatan dan Keuangan Publik

Pekerjaan:

- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 1984 sampai sekarang
- Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2005 – 2007 dan 2013 - sekarang

Pendidikan

- S3 ilmu ekonomi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Cooperative Attachment Program, Singapore Cooperative Federation, Singapura, 2001
- Local Government Financial Management Trainning, Institute of Local Government Studies, University of Birmingham, Inggris, 1994
- MBA general bussines, Graduate School of Bussines, Western Michigan University, AS, 1991.

Kegiatan dan Tulisan Ilmiah, antara lain:

- Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Bahaya Neoliberalisme, Pustaka Pelajar, 2009
- Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Di Bawah Ancaman IMF, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, dll.





Ilustrasi: V.M.I Bimo Adi

Dari *OUTPUT* Ke *OUTCOME*: REORIENTASI LAYANAN DAN KINERJA BPPK

OLEH: GANTI LIS ARIYADI & NOOR C. MADJID

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh *stakeholders*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada akhir Desember 2012 melaksanakan Rapat Dinas (Radin) di Yogyakarta. Radin yang dibuka oleh Menteri Keuangan di Gd B, Jalan Purnawarman 99 diikuti oleh pejabat eselon I, II, III serta perwakilan Widyaiswara di lingkungan BPPK.

Tema Rapat Dinas

Rapat Dinas pada akhir tahun 2012 dan sekaligus akhir masa jabatan Bapak Kamil Sjoieb sebagai Kepala BPPK, dilaksanakan untuk menciptakan koordinasi internal yang lebih kuat dan identifikasi kebutuhan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis BPPK. Koordinasi internal yang lebih kuat sangat diperlukan guna menyiapkan dan mengimplementasikan peralihan fokus layanan dan kinerja BPPK dari *outcome-oriented* ke *outcome-oriented*. Peralihan fokus tersebut membutuhkan strategi implementasi dan rencana aksi pencapaian sasaran-sasaran strategis. Sesuai dengan tujuan BPPK untuk meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada *outcome*, tema yang dipilih dalam Radin BPPK 2012 adalah: “**Redefinisi Layanan dan Kinerja BPPK yang Berorientasi pada Outcome melalui Penyempurnaan Strategi Pengelolaan Training**”.

Peningkatan kualitas layanan yang

memperbaiki kualitas layanan dan penyempurnaan strategi pengelolaan *training*.

Layanan dan Kinerja Berorientasi Outcome

Pembahasan tiap-tiap siklus diklat ditekankan pada tiga fase: pemetaan *current position*; penetapan *expected standard*; dan perancangan strategi *quality assurance* menuju training berkualitas. Selanjutnya, disusun indikator, rencana aksi dan target pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah dibakukan sebagai output dari Rapat Dinas. Hasil dari Rapat Dinas ini selanjutnya diusulkan sebagai salah satu acuan bagi pimpinan BPPK untuk membuat kebijakan yang diperlukan.

Dari identifikasi dan pemetaan yang dilakukan, untuk mencapai pelayanan dan kinerja BPPK yang fokus pada *outcome* maka setiap tahapan diklat dapat didefinisikan *output* (*outcome* antara) yang harus dicapai dari setiap siklus diklat sebagai berikut:

Perencanaan	Penyelenggaraan	Evaluasi
Program Diklat Sesuai Kebutuhan	Pengajar yang Berkualitas	Hasil Evaluasi Diklat Memberikan Rekomendasi yang Dapat Mendukung Perubahan Perilaku
“Kurikulum Yang Tepat”	Sarana dan Prasarana yang Memadai (Atk, Kelas, Asrama, fasilitas lain)	Ketepatan antara Alat Evaluasi Hasil Belajar dengan Perilaku-perilaku yang Diharapkan Muncul dari Sebuah Diklat
“Metode dan Media Pembelajaran Efektif”	Pelayanan Prima oleh Penyelenggara (Petugas Piket, Pegawai, <i>Security</i> , <i>Cleaning Service</i>)	
Materi Pembelajaran (Bahan Tayang, Modul, dll) Valid dan Mutakhir”	Pelayanan Administrasi yang Cepat dan Tepat	

berorientasi pada *outcome* mensyaratkan seluruh siklus diklat harus tertata. Permasalahan dan solusi bagi peningkatan kualitas layanan pun harus segera teridentifikasi. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat dipetakan kembali dengan cermat sebagai dasar untuk

Selanjutnya, dari masing-masing output per siklus kegiatan diklat dirinci indikator keberhasilan dengan lebih detail beserta *action plan* untuk mencapai *output* dan selanjutnya *outcome* yang dikehendaki.

Kelembagaan BPPK-STAN

Selain membahas kegiatan diklat di lingkup BPPK, Rapat Dinas juga membahas masalah integrasi BPPK-STAN. Agenda ini sesuai amanat Menteri Keuangan pada pembukaan Rapat Dinas. Di masa mendatang, diwacanakan adanya suatu institusi yang mengintegrasikan fungsi pendidikan tinggi dengan pelatihan aparatur. Institusi tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM yang komprehensif di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk mencapai kondisi tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi adalah:

- Peraturan perundang-undangan terkait pembinaan fungsi pendidikan tinggi dan fungsi diklat aparatur, saat ini masih terpisah.
- Terdapat regulasi yang masing-masing berdiri sendiri:
- Undang-Undang Kepegawaian,
- Undang Undang Kementerian Negara,
- Undang Undang Keuangan Negara;

dan

- Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Tantangan spesifik yang dihadapi transformasi kelembagaan BPPK-STAN sebagai institusi pengembangan SDM yang komprehensif di lingkungan Kemen-

Wacana yang Mengemuka Terkait Rencana Kelembagaan BPPK-STAN

SUBYEK	KETERANGAN
KELEMBAGAAN	
Peraturan Perundang-undangan*	UU tentang Pendidikan Tinggi beserta peraturan pelaksanaannya vs UU tentang Kementerian Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan UU tentang Kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya
Bentuk Lembaga	Organisasi mandiri setara eselon I di Kementerian Keuangan
Bentuk dan Tata Kelola	Universitas vs Institut vs bentuk lainnya.
Kepemilikan dan Pembinaan non akademis	Kementerian Keuangan
Pembina Akademis	Kemendikbud
Program Studi dan Kegiatan operasional	Akademis, Vokasi dan Diklat
Fokus Kekhasan	Pengembangan dan penerapan pengetahuan dan teknologi informasi di bidang Keuangan Negara
Subyek	Bidang Akademik dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Output	Degree dan Non Degree (Vocational dan Training)
Peserta didik (<i>degree</i>)	CPNS/PNS dan Umum
Peserta diklat	Fokus pada Kementerian Keuangan, Kementerian/lembaga lain, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta
Pengguna Lulusan	Kementerian Keuangan, Kementerian/LPNK lainnya, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta.
Status Lulusan (<i>degree</i>)	Ikatan Dinas dan Non Ikatan Dinas
SUMBER DAYA MANUSIA	
SDM Manajemen	Kementerian Keuangan
SDM Staf	PNS Kementerian Keuangan dan Swasta
Pengajar Tetap	Dosen
Pengajar Tidak Tetap	PNS dan Swasta
Institusi Pembina Pengajar Tetap	Kemendikbud
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
Sumber Dana*	APBN, Jasa Layanan dan Hibah
Asset	Kementerian Keuangan
Status Kelembagaan	Satker BLU

terian Keuangan adalah disharmonisasi antara Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Penutup

BPPK sebagai *learning organization* harus mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (*self learning*), sehingga BPPK me-

iliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Hasil-hasil pemikiran dari warga BPPK merupakan sumbangan berharga sebagai landasan BPPK untuk secara terus menerus mentransformasi diri menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah tugas seluruh warga BPPK untuk mengimplementasikan hasil pemikiran dan kesepakatan yang telah dihasilkan untuk mewujudkan harapan menjadi lembaga pendidi-

kan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab.

*Ganti Lis Ariyadi adalah Kasubbag Organisasi pada Sekretariat BPPK

*Noor Cholis Madjid adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Foto: Eros L. Mursalin
Digital Imaging: Gathot Subroto

TUNTUNAN HIDUP AGUS HERMAWAN

OLEH: SHERA BETANIA & HANIK RUSTININGSIH

Mengawali wawancara kami dengan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai yang baru, Agus Hermawan, ia berujar, “Kalau iklan itu kan bilang *life is never flat*, kalau saya ya *flat* saja tidak ada yang *extraordinary*”. Sebuah kesederhanaan yang terungkap dari satu kalimat beliau. Namun dibalik perjalanan hidupnya, tersimpan suatu cerita menarik dan pelajaran hidup yang justru kami rasa menarik dan ‘tidak flat’.

Tuntunan Itu Mulai Terasa

Seorang Agus muda menghabiskan masa kecil dan masa muda di daerah Garut. Sukahaji nama desanya. Sama seperti anak kecil pada umumnya, bermain di sawah, menangkap belut, bersekolah, namun tetap membantu orang tua yang saat itu memiliki penggilingan padi. Sepulang sekolah, Agus kecil membantu sang ibu di penggilingan padi. Setelah lulus sekolah SMA, ia mulai menempuh bangku perkuliahan. Sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB), ia tidak pernah bercita-cita untuk berkuliah di IPB. “Jadi saya kuliah itu bukan karena cita-cita saya ingin masuk ke IPB. Saya tidak begitu mengenal IPB. Dulu cita-cita saya ingin jadi akuntan. Salah satunya saya ingin masuk ke STAN”. Namun, permasalahan ekonomi menuntut Agus muda untuk tidak mengikuti tes masuk STAN yang saat itu berlangsung di Jakarta. Akhirnya ia mengikuti seleksi Proyek Perintis II (yang saat ini dikenal dengan SNMPTN). Memilih IPB sebagai salah satu perguruan tinggi yang dipilih juga bukan didasarkan atas keinginannya. Teman-temannya yang mendaftarkan ke IPB. Hal itu dilakukan untuk mengurangi persaingan diantara temannya yang ingin masuk ke IKIP. Setelah mengikuti seleksi, ternyata tak satupun dari teman-temannya yang lolos Proyek Perintis II ke IKIP.

Awal berkuliah di IPB, Agus muda mulai merasa tidak kuat untuk melanjutkan kuliah karena bimbang dalam memilih jurusan yang harus diambil. Belum lagi kesulitannya dalam menghafal dan lemah di kimia dan biologi. Bahkan memasuki tingkat satu, ia sempat memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah,

“Saya sampai bilang ke ibu bahwa saya tidak kuat, ibu hanya bilang kan kemarin sudah kontrak rumah setahun, ya habisin itu saja”. Jadi ibu juga tidak memaksakan saya di situ karena cita-cita saya dulu yang jadi ahli ekonomi”. Menurut orang-orang sekitarnya, ia menonjol di matematika dan fisika. Maka dari itu, di tingkat kedua saat masa penjurusan, ia memilih jurusan yang tidak ada kimianya, dan keputusan dijatuhkan kepada jurusan Kehutanan. Hingga akhirnya menyelesaikan kuliah dengan gelar Sarjana Kehutanan.

Lulus dari IPB, ia pernah ditawarkan untuk menjadi dosen di IPB. Tawaran tersebut ditampik karena kelemahannya yang sulit menghafal serta tidak rajin membaca. Agus Hermawan memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan/kayu di daerah Palembang. Hampir setahun lamanya ia bekerja di sana. Namun, sebagai seorang sarjana kehutanan, ada hal-hal yang mengusik nuraninya dalam pekerjaan ini sehingga ia memutuskan untuk berhenti. “Masalahnya ya itu, masalah hati. Saya harus melawan hati nurani. Saya harus melakukan hal yang bersifat koruptif dalam pengelolaan hutan”. Karena hal itulah, dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan kembali ke Jakarta. Setelah itu ia bekerja di sebuah konsultan Kehutanan. Ia berharap bahwa dengan bekerja di konsultan akan terlepas dari sifat-sifat manipulatif perusahaan. Namun yang dilihatnya tidaklah demikian.

Membaca lowongan di sebuah media cetak bahwa sebuah instansi pemerintah membutuhkan tenaga kerja dari berbagai disiplin ilmu salah satunya sarjana kehutanan, ia pun mengirimkan surat lamaran. Ia yakin nantinya akan bekerja di Perhutani, mengingat latar belakangnya yang seorang Sarjana Kehutanan. Namun yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan yang diterima, justru ia terdaftar untuk menjadi pegawai Depkeu (Kemenkeu-red.). “Saya tidak pernah berpikir tentang Bea Cukai dan tidak tahu tentang Bea Cukai”, ceritanya tentang saat-saat mengetahui ia diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Mengikuti

berbagai tes pada level Departemen (Kementerian-red.), kemudian ditempatkan di DJBC.

Di awal pengabdianya sebagai pegawai DJBC, seluruh pegawai baru diwajibkan mengikuti diklat di Pusdiklat. “Sudah dihajar habis-habisan sama Pelatih, saya sempat terbersit juga, dulu saya di Palembang gaji saya Rp 350.000 net, rumah sudah disediakan, makan sudah disediakan, kalau ke lapangan ada uang turun lapangan lagi, dengan posisi sebagai asisten manajer pengelolaan hutan. Sampai di sini digaji Rp 54.000, saya sambil guling-gulingan disini, bulan puasa lagi. ‘Saya ngejar apa sih?’ pikir saya”, ceritanya mengenang masa pertama menjadi pegawai DJBC. Perubahan drastis dirasakannya, terutama dari sisi ekonomi (gaji). Namun ia terus merasa dituntun. “Ya itu tadi, karena hidup saya seperti ada yang nuntun, saya coba bertahan”, imbuhnya. Industri kehutanan yang makin menu-run karena hutannya semakin habis juga membuatnya menemukan jawaban atas pilihannya tersebut.

Tuntunan Dalam Karir

Menempuh tahun pertama di kantor pusat, di Subdit Pertambangan, kemudian mutasi ke Bitung, Sulawesi Utara. Saat itu ia sudah berencana untuk menikah, bahkan sudah menyebarkan undangan pernikahan. Alhamdulillah, atasannya (Kasubdit Pertambangan) saat itu menunda keberangkatan selama sebulan agar ia dapat melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Tiga hari setelah menikah, ia berangkat ke Bitung. Saat itu ia tidak pindah ke Bitung bersama sang istri karena sang istri masih bekerja. Namun, sebulan setelah menikah, sang istri memutuskan untuk ikut sang suami pindah ke Bitung dan meninggalkan pekerjaannya saat itu.

Setelah dua tahun di Bitung, ada penawaran beasiswa. Ia pun mengikuti seleksi beasiswa. Ia mengatakan bahwa ia termasuk orang yang beruntung karena selama mengikuti tes, ia tidak sepenuhnya lancar dalam menjalaninya karena harus mengikuti tes ulang untuk TOEFL. “Ya saat itu seperti ada yang

menuntun saya saja”, lagi-lagi tuntunan dirasakannya. Termasuk saat mengikuti *pre-departure* di Jurangmangu, Sosok Wijanarko menjadi salah satu pendorongnya dalam usaha melanjutkan usahanya untuk meneruskan mengikuti program beasiswa. Saat *pre-departure* tersebut, ia merasa bahwa skor TOEFL yang dimilikinya tidak dapat meningkat lagi, sosok Wijanarko-lah yang mampu meyakinkannya bahwa ia mampu meningkatkan skor TOEFL untuk bisa memilih kampus di Amerika. Saat itu, Agus mulai bimbang. Ketika sedang berada di Garut, ia menerima telepon dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa ia akan dikirim untuk kuliah di Jepang. Rasanya setengah tidak percaya saat itu, ia kembali ke Jakarta untuk melakukan wawancara dengan pihak calon universitas. Saat wawancara, ia dihadapkan pada dua orang professor Jepang yang datang langsung dari kampus dimana nantinya ia akan berkuliah. Persiapan selama tiga hari dapat dikatakan sangat singkat, ia membuat *statement of purpose* dan *Research proposal* mengenai PCA (*Post Clearance Audit*) yang idenya didapatkan dari temannya. Iapun lolos wawancara dan diterima berkuliah di International University of Japan. Akhirnya ia dapat menempuh perkuliahan di bidang ekonomi dan berhasil lulus dengan gelar *Master of Arts in Economics*.

Kembali ke Indonesia pada tahun 1998. Salah satu program DJBC saat itu adalah menempatkan para lulusan beasiswanya di Pusdiklat terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Saat itu, ia ditempatkan sebagai pelaksana di bagian penyelenggaraan. Tak lama, ia naik jabatan menjadi Kasubbid Tenaga Pengajar, dan pada tahun berikutnya berpindah meja menjadi Kasubbid Evaluasi. “Hal ini yang membuat saya komplit di BPPK, saya pernah merasakan di setiap bidang yang ada di Pusdiklat”, ujar beliau. Pada tahun 2001 ia menjadi PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) di Tanjung Priok. Namun setahun kemudian kembali ke kantor pusat, ditempatkan di Bagian Kepegawaian, selama hampir 4 tahun. Pada tahun 2005,

dari Bagian Kepegawaian; ia mutasi ke salah satu daerah terpencil di Indonesia, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Amamapare di Papua. Kemudian di tahun 2007 ia menjadi Kepala Bidang pada Kanwil VI DJBC Banten. Selama hampir 6 bulan menjadi kepala bidang di Banten, Agus Hermawan dipindahtugaskan ke Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Program (sekarang Renbangdik). “Tapi, selama perjalanan karir saya, memang tidak lepas dari pusdiklat. Jadi walaupun saya di kepegawaian, saya masih *ngajar* disini. Kecuali waktu di Amamapare memang susah *ya* karena jauh. Kemudian saya ke Kanwil Banten, saya masih *ngajar*. Sampai akhirnya saya ke Bidang Perencanaan dan Program, sudah gak boleh *ngajar* lagi,” imbuhnya. Selama hampir 21 tahun masa tugasnya, sepertiganya atau selama 7 tahun lebih ia habiskan di Pusdiklat (BPPK). “Karena saya dulu juga di sini, *ngajar* di sini. Yang membuat saya senang *ngajar*, karena saya senang ketemu orang banyak, suka melayani orang”. Ia menambahkan pula bahwa ia jarang berlama-lama di dalam ruangan kecuali jika ada tamu atau pegawai yang menghadap.

Bekerja Dengan Kesungguhan Hati

Menjawab pertanyaan seputar perbedaan situasi dan perasaan saat di DJBC dan Pusdiklat BC, beliau menanggapi bahwa sesungguhnya kodrat seseorang itu, dimanapun ia berada pasti mampu menyesuaikan diri. Ia menceritakan pengalamannya saat harus mengajar Diklatpim IV dalam kondisi ia belum pernah mengikuti Diklatpim IV. Namun, saat Surat Tugas sudah diterima maka tugas itupun harus dijalankan. Saat itu Agus Hermawan harus mengajar mengenai teknik presentasi. Beruntung, ia mengajar pegawai yang banyak berasal dari DJBC sehingga mampu menyesuaikan diri dengan peserta diklat. “Segala penyesuaian itu tergantung kita, mau atau tidak untuk belajar. Dimanapun kita ditempatkan, sepanjang kita mau belajar, tidak ada masalah,” tambah beliau. Ia menjelaskan bahwa saat masuk ke suatu pekerjaan, yang membuat masalah

terjadi justru adalah diri sendiri, belum mencoba tapi sudah merasa berat. Pendidikan formal itu tidak semua kontennya dapat diaplikasikan, tapi bagaimana membentuk pola pikir. “Dasar pengetahuan memang penting, tapi jangan dijadikan sebagai patokan harga mati. Kalau kita menghadapi pekerjaan jangan melihat beratnya dulu. Jangan bilang ‘*waaahhh gimana nih...*’, begitu sudah bilang seperti itu berarti itu doa buat kita bahwa kita tidak bisa mengerjakan. Kita hadapi dulu. Hasil itu bukan kita yang menentukan. Tapi kewajiban kita melakukan”, imbuhnya. “Saya pernah membaca, bahwa hidup itu adalah rangkaian masalah, jadi kalau tidak ada masalah *ya* berarti sudah tidak benar-benar hidup. Hidup saya terkesan datar tapi ada yang menuntun”, tambahnya.

Salah satu prinsip hidupnya adalah bersedia ditempatkan diposisi manapun, “Dimana saya harus bekerja, *ya* saya harus kerjakan dengan hati. Kalau tidak dengan hati, kerja ringan akan terasa berat. Jadi *ya* saya nikmati.”

Seorang Agus Hermawan juga memiliki prinsip bahwa hubungan di kantor adalah hubungan profesional kerja. Apa yang pimpinan lihat atas seseorang adalah kinerjanya, sesuai dengan kemampuannya. Ia terus mendekatkan diri dengan para pegawainya, terutama pelaksana, karena masa kerja para pelaksana yang umumnya berusia muda masih lama dan para pelaksana inilah yang melaksanakan langsung segala kebijakan Pusdiklat. “Kerja harus sungguh-sungguh, kita juga harus berusaha, seberat apapun atau sekecil apapun pekerjaan kita harus dikerjakan dengan hati. Maka dari itu pekerjaan kita harus dikerjakan dengan hati untuk kepentingan organisasi dan user. Sehebat apapun kita, kalau tidak untuk kepentingan *user* dan nantinya ditinggalkan *user ya* apa gunanya. Kalau ada kritik, jangan dibuat sebagai beban tapi sebagai koreksi atas kinerja kita. Berikan hal yang terbaik dengan segala *constraints* yang ada”, jelasnya.

Peningkatan kompetensi pegawai terus dilakukan di Pusdiklat BC, semuanya un-

tuk satu tujuan yaitu memuaskan user (DJBC). Peningkatan kualitas diklat juga terus dilakukan agar seluruh kebutuhan diklat untuk *user* serta kepuasan siswa diklat dapat dirasakan. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas keperluan siswa, terutama untuk siswa yang berasal dari daerah dan tidak dapat memanfaatkan ijin bermalam. Selain itu, sambil terus berkoordinasi dengan kantor pusat DJBC, pusdiklat memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kolam renang, lapangan bola dan sarana olahraga lainnya. Peningkatan permintaan diklat di tahun 2013 ini menuntut Pusdiklat BC untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam hal penyelenggaraan diklat. Dari 1500 siswa di tahun 2012 menjadi 2200 siswa di tahun 2013, membuat Pusdiklat BC memiliki kalender diklat yang cukup padat dari awal hingga akhir tahun. Belum lagi dengan keinginan DJBC yang meminta agar kegiatan-kegiatan *workshop* lebih sering diadakan di Pusdiklat Bea dan Cukai. Agus Hermawan menjelaskan bahwa semuanya perlu disiapkan, mulai dari modul, pengajar serta fasilitas pendukungnya.

Tuntunan dalam Keluarga

Ibu adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia sangat salut dengan kedua orangtuanya yang sangat moderat dan memprioritaskan pendidikan dalam mendidik kesebelas anaknya. Sebagai keluarga besar dengan penghasilan yang seadanya, kedua orangtua Agus Hermawan dapat menyekolahkan seluruh anak-anaknya. Sebagai seorang anak, Agus Hermawan berkeinginan mewujudkan mimpi orangtuanya yaitu Naik Haji. Hal itulah yang mendorong Agus Hermawan untuk menabung dari uang yang didapat saat sekolah di Jepang. Termasuk saat ingin memiliki rumah sendiri, ia mampu mewujudkannya, semuanya hasil selama sekolah. "Jadi memang, kalau kita punya niat baik, pasti tercapai. Walau secara hitungan itu tidak masuk akal. Terlalu sombong kalau saya menganggap itu semua adalah hasil kerja saya sendiri, semua terjadi karena itu tadi, ada yang



Foto: Spesial

menuntun,"ujarnya.

Keluarga kecil bahagia. Kalimat tersebut mungkin bisa menjelaskan keluarga Agus Hermawan. Menikah dengan Nurmah dan dikaruniai dua orang putra yang sudah beranjak dewasa. Putra pertama saat ini menginjak bangku kuliah dan putra kedua masih berada di bangku kelas III SMP. Ia mendidik kedua anaknya sama seperti saat ia kecil, dengan penuh perhatian, kasih sayang dan moderat. Cara mendidik inilah yang akhirnya membuat anak-anaknya memiliki prestasi yang baik secara pendidikan serta dekat dengan keluarga. Dalam mendidik kedua anaknya ia menanamkan nilai-nilai positif agar dapat menjadi pribadi yang jujur dan mau bekerja keras, "Saya ingin mendidik bahwa segala keinginan harus dilakukan dengan usaha. Saya tidak ingin memberikan kasih sayang dengan materi secara berlebihan yang akan membuat mereka jadi pemalas. Saya tidak mau mendidik anak-anak untuk memperoleh keinginannya terlalu mudah tanpa ada usaha." Dukungan istri dan kedua anaknya memampukannya untuk terus berkarya. Hingga saat ini ia merasa bahagia dan bangga terhadap istri dan anak-anaknya.

Perjalanan hidup yang terkesan datar ternyata tetap memiliki banyak makna dan nilai-nilai kehidupan di

Dimana saya harus bekerja, ya saya harus kerjakan dengan hati. Kalau tidak dengan hati, kerja ringan akan terasa berat. Jadi ya saya nikmati."

dalamnya. Seorang Agus Hermawan adalah bukti nyata dimana loyalitas, kerja keras, memberikan yang terbaik, serta ketulusan hati mampu menguatkan diri menghadapi segala masalah dan tantangan. Ikhlas pada tuntunanNya, berserah pada rencanaNya. Baginya, hidup terasa datar-datar saja namun terasa seperti ada yang membawa. "Saya tidak pernah merasa apa yang saya capai itu kehendak saya sendiri, semuanya ada yang mengendalikan", jelasnya. Justru tuntunan itulah yang membawanya kepada kesuksesan karir dan kebahagiaan keluarga hingga saat ini.

*Shera Betania adalah Pelaksana pada Bagian TIK- Sekretariat BPPK
* Hanik Rustiningsih adalah Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Internalisasi NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

OLEH: RIZKA AGUSTINA

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Ke-lima nilai tersebut tentu sudah bukan hal yang asing lagi di telinga para pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada umumnya, dan BPPK khususnya. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011, ke-lima nilai tersebut telah ditetapkan sebagai nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Sebagai implementasi dari KMK 312/KMK.01/2011, BPPK menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di lingkungan BPPK. Kegiatan internalisasi diawali dengan mengadakan *Training of Trainer (ToT) Change Agent* untuk perwakilan Sekretariat Badan dan Pusdiklat/STAN (9 dan 10 Juli 2012) dan BDK (29 dan 30 Agustus

2012). Dengan itu, maka jumlah *change agent* nilai-nilai Kementerian Keuangan pun kian bertambah. Tiap perwakilan unit diwajibkan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di unitnya masing-masing.

Sepanjang bulan November dan Desember 2012 lalu, kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan telah dilaksanakan di tiap balai diklat keuangan. Dengan jadwal yang telah disepakati antara BDK dan Kepegawaian Sekretariat Badan, kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber dari BDK sendiri ditambah dengan *change agent* dari sekretariat badan/pusdiklat/STAN.

Secara garis besar, kegiatan yang berlangsung dalam dua hari ini, dan satu hari untuk beberapa BDK memiliki format kegiatan yang sama karena mengadopsi format acara *TOT Change*

Agent perwakilan BDK. Inti kegiatan ini adalah menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan ke seluruh pegawai di balai diklat keuangan. Tak sedikit balai yang juga mengikutsertakan petugas keamanan dan petugas *cleaning service* dalam acara ini.

Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di BDK pertama kali diadakan di BDK Pekanbaru tanggal 1 dan 2 November 2012. Dipandu langsung oleh Kepala BDK Pekanbaru, Mardial, widyaiswara BDK Pekanbaru, Deddy Candra, dan *change agent* dari pusdiklat, Kuwat Slamet dan Noor Cholis Madjid. Bertempat di Labersa Grand Hotel & Convention Center Riau, kegiatan internalisasi berlangsung dengan lancar. Acara sengaja diformat secara santai sehingga peserta diperbolehkan menggunakan kaos kerah dan celana *jeans*. Para peserta tampak

rileks mengikuti rangkaian kegiatan yang isinya tidak hanya menyampaikan materi saja, namun juga disertai dengan *games* yang masih berhubungan dengan nilai-nilai Kemenkeu.

Demikian pula dengan internalisasi selanjutnya di BDK Pontianak pada tanggal 13 November 2012 yang diadakan di Hotel Orchardz Pontianak. Meskipun hanya berlangsung selama satu hari, kegiatan yang dipandu oleh Sampurna Budi Utama dan Ariefina Sri Indaryani selaku *change agent* dari pusdiklat ini juga disampaikan dengan menarik, tidak hanya materi slide namun juga menyertakan *games* yang berhubungan dengan nilai-nilai Kemenkeu. Sama halnya dengan internalisasi di BDK lain, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan materi slide namun juga disertai dengan *games* agar peserta tidak merasa bosan dalam menerima materi yang disampaikan.

Selanjutnya internalisasi diadakan di BDK Palembang (12 dan 13 November 2012), BDK Yogyakarta (13 November 2012), BDK Makassar (13 dan 14 November 2012), BDK Magelang (21 dan 22 November 2012), BDK Manado (21 dan 22 November 2012), BDK Denpasar (26 dan 27 November 2012), BDK Medan (29 November 2012), BDK Cimahi (3 Desember 2012), BDK Balikpapan (4 Desember 2012), dan terakhir di BDK Malang (6 dan 7 Desember 2012).

Pusdiklat, STAN, dan Sekretariat

Selain di BDK, internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan juga telah diadakan di Sekretariat Badan dan Pusdiklat/STAN yang merupakan tang-

gung jawab dari para *change agent* yang telah mengikuti *TOT* pada tanggal 9 dan 10 Juli 2012 lalu. Beberapa unit bahkan telah merancang program budayanya saat melakukan internalisasi ini.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah merumuskan program budayanya, seperti Forum Keterbukaan, AKI (Agenda Kegiatan Individu), SABAR (sarapan bareng), 4S (Senyum, Salam, Sapa, Service), dan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi).

Program budaya di Pusdiklat KNPK meliputi Happy Call, Sesajen Jumat Ceria, Megah (Menarik dan Gagah), Kotak Misteri, Embun Pagi/Morning Briefing dan Papan Kinerja (Bintang Kami).

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pun telah mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan, melalui:

1. Briefing di pagi hari setiap akan

melaksanakan kegiatan harian.

2. Menjaga kebersihan ruangan dengan menjalankan sistem *reward* bagi pegawai dengan meja paling tidak rapi, dengan tujuan dikemudian hari dapat lebih teratur.
3. Briefing di kalangan mahasiswa.
4. Briefing di kalangan petugas keamanan dan kebersihan.
5. Implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui kegiatan *Capacity Building* untuk seluruh pegawai termasuk Widyaiswara di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dilaksanakan pada awal Desember 2012.

Sementara implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan adalah sebagai berikut.

Bagian	Implementasi Nilai-Nilai Kemenkeu
 Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada <i>change agent</i> turunan di masing-masing subbagian yang dinilai jadi model (pelaksana). 2. Program budaya 3R. 3. Setiap minggu ada monitoring dan evaluasi terkait pemahaman nilai-nilai. 4. Pegawai yang berulang tahun diberi kado dan ucapan. 5. <i>Family gathering</i> untuk kebersamaan. 6. Monitoring kerapian untuk arsip dan meja kerja. 7. Siraman rohani dan presentasi terhadap aturan-aturan baru. 8. Bendera merah dan hijau untuk yang terbaik dan terburuk bagi setiap pegawai. 9. Arisan
 TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan periodik tentang nilai-nilai Kemenkeu. 2. Aplikasi per-subbagian hanya formalitas tapi bekerja didasarkan pada <i>teamwork</i>, ketua tim tidak harus dari subbagian tertentu namun berdasarkan keahlian.
 Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon IV adalah <i>change agent</i>. 2. Pegawai makan di ruang makan khusus, tidak boleh makan di ruang kerja. 3. Setiap hari Rabu terdapat <i>knowledge sharing</i>. 4. Papan pengumuman untuk catatan dan informasi kegiatan setiap subbag. 5. Tidak memakai sandal di lingkungan kerja.
 OTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan "Hikmah Pagi" dan "Hikmah Sore" yang dilakukan setiap hari dengan tema bebas. 2. Kegiatan pagi mengingatkan agenda harian dan progress, kegiatan sore melakukan evaluasi. 3. Makan bersama di ruang tamu.

*Rizka Agustina adalah Pelaksana pada Bagian Kepegawaian Sekretariat BPPK



Intermediate Leadership Training: Menggapai Militansi Pejabat Pajak

OLEH: BAMBANG WIDJAJARSO

Tahun 2012 yang telah lewat memberikan pengalaman sangat berharga pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), BPPK, ketika berhasil melaksanakan *Intermediate Leadership Training* (ILT) bagi pejabat eselon IV Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dalam dua angkatan. Tulisan ini ditujukan untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan ILT tersebut, yang mencakup apa sebenarnya ILT itu, apa kekhasan ILT dibanding diklat lainnya, maupun pernik-pernik pencapaian diklat, termasuk proses perancangan dan pelaksanaan ILT.

Apa itu ILT?

Sejatinya ILT adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), yang selama ini rutin diselenggarakan oleh PPSDM bagi para pejabat eselon IV dan eselon III dengan kurikulum dari

Lembaga Administrasi Negara (LAN), namun dirancang secara khusus untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi dari biasanya. *Stakeholders* Kementerian Keuangan berharap bahwa setelah mengikuti ILT ini peserta diklat (saat ini masih ditujukan khusus untuk Direktorat Pajak) akan mempunyai tingkat militansi yang maksimal bagi pejabat-pejabat *front liner* di DJP. Wow? Sedahsyat itu-kah? Iya, DJP harus diakui sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penerimaan negara. Pada konteks inilah, kesadaran akan pentingnya DJP dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui perpajakan sangat penting bagi kelangsungan hidup pengelolaan roda pemerintahan negeri ini, khususnya di bidang pembiayaan pembangunan. Dari interaksi dengan pihak terkait, aspek militansi setidaknya

harus dimaknai dengan penuh integritas dan kenegarawan. *Mindset* itulah yang dirasa perlu disamakan antara para pemimpin Kementerian Keuangan ini dengan seluruh pejabat, khususnya di Ditjen Pajak.

Dari awal, sentuhan para *stakeholders* inilah yang dijadikan dasar perancangan diklat agar cocok dengan kebutuhan para pengguna alumni diklat nantinya. Menteri Keuangan sendiri sangat menaruh harapan besar pada BPPK agar diklat ini dapat mencapai tujuan dahsyat tersebut dan dapat diselenggarakan dengan substansi, metode yang lebih berkualitas, dan pengajar yang lebih punya kapasitas selain teori juga praktek. Penamaan *Intermediate Leadership Training* untuk diklatpim sendiri berasal dari ide langsung Menteri Keuangan, Agus Dermawan Wintarto Martowardoyo. Perlu pembaca ketahui juga bahwa konteks kepemimpi-

nan pejabat ini termasuk dalam pantauan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP atau UKP4), yang mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek yang termasuk dalam prioritas nasional, khususnya reformasi birokrasi dan tata kelola, sehingga sangat masuk akal jika Menteri Keuangan terlibat penuh sejak persiapan maupun pemantauan pasca diklat.

Apa kekhasan ILT dibanding diklatpim?

ILT merupakan modifikasi dari program diklatpim rancangan LAN, sehingga kurikulum LAN tetap dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun pihak LAN. Seperti diklatpim regular rancangan LAN pada umumnya, mata diklat dalam diklatpim dikelompokkan ke dalam empat area, yakni kajian sikap dan perilaku, kajian manajemen publik, kajian pembangunan dan aktualisasi. Jadi, peserta diklat tetap mempunyai tugas pokok mengikuti proses tatap muka diklat, termasuk penugasan-penugasan untuk studi lapangan, pembuatan *action plan* dalam Rencana Aksi Perorangan (RAP) maupun kelompok.

Namun demikian, muatan-muatan lokal yang terutama isu-isu hangat yang ada di DJP dijadikan modifikasi kurikulum dan proses pembelajaran. Area pembelajaran dimodifikasi menjadi lima tema, yakni Integritas dan Etika, Manajemen Strategik, Kemampuan Manajerial, Pemberdayaan dan Aktualisasi.

Adapun kekhasan lainnya dari diklat ILT ini adalah:

1. Sejak awal, keterlibatan para *stakeholders* yang mempunyai ekspektasi jauh lebih tinggi dari diklat-diklat yang selama ini diselenggarakan oleh BPPK sudah intens, termasuk *training need analyses* (TNA) dihasilkan oleh mereka. PPSDM-BPPK bertugas menindaklanjuti hasil TNA ini yang kemudian berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, khususnya Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Komisi Pengawas Perpajakan dan tentunya pihak Lembaga

Administrasi Negara. Rekrutmen peserta ILT dilakukan oleh unit DJP, bukan sekedar undangan normatif dari BPPK, sehingga peserta merupakan pejabat yang punya prestasi (setidaknya ekpektasinya tinggi) untuk menjadi pejabat yang mempunyai tingkat militansi yang tinggi.

2. Kurikulum ILT sangat khusus. Kalau selama ini PPSDM hanya sebagai penyelenggara diklatpim yang kurikulumnya murni dari LAN, kali ini PPSDM terlibat penuh dalam perancangan kurikulum, khususnya untuk muatan-muatan lokal dan disesuaikan dengan kepentingan DJP, seperti: 1. Assesment & Counselling, 2. Visi, Misi, dan Penerapan Shared Value, 3. Penyelesaian Pengaduan Perpajakan, 4. Pengendalian Early Warning System & Pengawasan, 5. Operasionalisasi Quick Win Program, 6. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan dan Extra Effort, 7. Change Management, dan 8. Performance Appraisal.
3. Koordinasi intensif dilakukan oleh PPSDM dengan pihak LAN, Komwas Perpajakan dan KITSDA, DJP. PPSDM juga memperoleh bantuan luar biasa dari Pusdiklat Pajak dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). LAN sangat menyambut baik modifikasi program diklatpim, namun LAN mengingatkan untuk tetap dalam koridor kerangka dari LAN.
4. Biasanya, suatu diklat disampaikan oleh pengajar – baik widyaiswara maupun pejabat lain – hanya dari BPPK. Untuk ILT ini, para pengajar selain berasal dari BPPK (Pusdiklat PSDM, Pusdiklat Pajak dan STAN) juga berasal dari unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya. Sebagai contoh, dua wakil Menkeu, yakni Dr Anny Ratnawati dan Dr Mahendra Siregar terlibat dalam proses penyampaian materi diklat. Selain itu ada juga pengajar berasal dari luar Kementerian Keuangan. Seperti Dr Denny Indrayana, wakil Menteri Hukum dan HAM. Beberapa

5. Penentuan kelulusan ILT ini sungguh sangat berbeda dari diklat lainnya. Jika dalam diklat biasanya sertifikat kelulusan disampaikan segera setelah selesainya diklat atau segera setelah dinyatakan lulus, dalam ILT ini, penyelenggara akan menyampaikan sertifikat kelulusan baru akan disampaikan setelah lewat enam bulan. Itupun, hanya akan diberikan setelah ada evaluasi pasca diklat yang ditujukan untuk melihat peningkatan kompetensi dan, menurut Wali Amanah, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan nyata kompetensi pejabat yang bersangkutan.

Pernik-Pernik Pelaksanaan ILT

Jika dilihat dari kekhasan yang ada pada ILT ini, tentunya begitu banyak harapan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara ILT ini, yakni PPSDM.

Setidaknya, para narasumber menunjukkan *surprise* atas penyelenggaraan diklatpim dengan model baru seperti ini. Mereka menunjukkan apresiasi dan mempunyai ekspektasi yang meningkat atas alumni diklat ini, karena materi *leadership* mempunyai porsi yang cukup tinggi. ILT ini sangat relevan diselenggarakan khususnya untuk pejabat pengelola perpajakan di negeri ini mengingat kondisi DJP yang saat ini sedang dibenturkan dengan aspek kepentingan, aspek psikologis aparat negara secara keseluruhan dan aspek hukum pidana dan perdata. Militansi pejabat pajak dalam pelaksanaan tugas yang suka tidak suka perlu segera dikelola, selain kepemimpinan yang berintegritas dan berkompetensi manajerial lainnya.

Kedua, kesiapan pengelola ILT yang hiruk pikuk dan tiada henti bekerja. Sejak menerima amanah dari Menteri Keuangan secara langsung untuk menyelenggarakan diklat ini, BPPK yang dimotori oleh Pusdiklat PSDM segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti LAN dan Komwas Perpajakan. Salah satu tugas yang cukup berat adalah ketika memper-

siapkan materi muatan lokal yang paling pas untuk target kompetensi bagi pejabat pajak. Diklatpim ini selain harus berisi materi tentang pengetahuan kepemimpinan dan aspek manajerial untuk pengambilan keputusan, ketrampilan mengaktualisasi konsep, ide dan pemikiran sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini, juga harus diisi dengan materi sikap dan perilaku yang menjadi tuntunan hidup dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai, norma dan etika yang berlaku sehingga membentuk sosok pemimpin yang berintegritas dan militan. Dalam prosesnya, Kementerian Keuangan dan Komwas Perpajakan relatif mempunyai *mindset* yang tidak jauh beda. Tantangannya menyangkut pihak lain khususnya Lembaga Administrasi Negara karena LAN lah yang mempunyai otoritas meng-endorse program ini. Dalam berbagai kesempatan, LAN menyampaikan bahwa meski modifikasi diklatpim sangat diapresiasi, LAN sangat mempertimbangkan aspek standarisasi dengan Kementerian dan Lembaga lain-

nya. Ditengah usaha negosiasi dengan pihak LAN, *Intermediate Leadership Program* dilaksanakan dalam dua angkatan dan akhirnya MOU berhasil ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala LAN jauh setelah ILT dilaksanakan.

Tantangan lainnya adalah dalam penyiapan materi bahan ajar atau modul oleh widyaiswara dan pejabat lainnya. Terjadi multi tafsir atas materi yang dipersiapkan, sementara penyiapan modul dikejar oleh *deadline* penyelenggaraan diklat ini. Dalam berbagai seminar modul, argumentasi antar penyusun bahan ajar terjadi sangat dinamis dan saling memberi tantangan satu sama lain. Untunglah, para widyaiswara dari Pusdiklat PSDM, Pusdiklat Pajak dan STAN sangat kooperatif sehingga kerjasama dengan pejabat dari Komwas Perpajakan bisa dilakukan sangat intens dan sangat baik.

Pernik-pernik lainnya dari penyelenggaraan ILT ini diantaranya menyangkut psikologi para peserta diklatpim ini. Meskipun para peserta merasa sangat kikuk dipandang pejabat istimewa, mereka

mempunyai daya juang yang luar biasa dalam setiap penugasan.

Pertanyaan yang hampir selalu muncul dari peserta diklat, penyelenggara maupun para *stakeholders* Kementerian Keuangan dari ILT ini adalah berapa seberapa militan nantinya bagi pejabat pajak atau seberapa berdampak pada perilaku pejabat pajak alumni ILT ini dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Mungkin, pertanyaan yang sama juga muncul dari pembaca yang budiman. Penulis yakin - yang selalu diyakinkan oleh para pimpinan Kementerian Keuangan - bahwa berhasil tentunya tidak sekedar wacana *output* atau *outcomes* dari sebuah kegiatan, namun juga wacana proses. Jika proses menjadi titik kunci kualitas ILT, tak perlu diragukan lagi roda terus berputar, diklatpim lain terus bergulir, termasuk ILT bagi eselon III yang sebentar lagi akan dilaksanakan di tahun 2013 ini.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENGAJAR PENGAJAR

1. Dr Ir Anny Ratnawati, M.S NIP, Wakil Menteri Keuangan, pernah menjabat Dirjen Anggaran dan Kepala BPPK, yang lulusan dan dosen IPB, doktor di bidang ilmu pertanian
2. Dr Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan, mantan Wakil Menteri Perindustrian
3. Drs Kamil Sjoeb MA, Kepala BPPK saat itu
4. Dr Ahmad Fuad Rahmany, Dirjen Pajak saat ini, mantan Ketua Bapepam LK, pernah menjadi *Deputy for Budgeting and Accountancy* Badan Rehabilitasi dan Konstruksi NAD-Nias
5. Dr Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia
6. Dr Anwar Supriyadi, Ketua Komwas Perpajakan, pernah menjadi Dirjen Bea Cukai, Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Dirut PT KAI
7. Dr Abdullah Anshari Ritonga, Wakil Ketua Komwas Perpajakan, pernah menjabat Ketua Pengadilan Pajak, Dirjen Anggaran maupun Dirjen Pajak
8. Prof Hikmawanto Juwana, SH, L.L.M, PhD, Guru Besar hukum internasional UI
9. Wahyu Karya Tumakaka, eselon II DJP
10. Djoko Prhardono, Direktur Bidang Fiskal & Investasi BPKP
11. Marina R Tusin, *Managing Director TASS Consulting* (mitra kerja Kementerian Keuangan dalam proses transformasi budaya)
12. Petrus Tambunan, Eselon II DJP
13. Bambang Tri Muljanto, Eselon II DJP
14. Imam Arifin, Kepala Pusdiklat Pajak
15. Safuadi, Kepala Pusdiklat PSDM
16. Pengajar lain: Widyaiswara PSDM, Pusdiklatpim Magelang, Pusdiklat Pajak, STAN, Komwas Perpajakan



Diklat Unggulan BDK CIMAHI 2012

OLEH: PUJO HARIANTO

Tahun anggaran 2012 telah berakhir, kalender diklat telah berganti dan catatan kinerja telah dibukukan. Tanpa mengesampingkan daya tarik dan manfaat program-program diklat yang lain, berikut ini 6 (enam) program diklat unggulan BDK Cimahi Tahun Anggaran 2012.

1. DKK *Public Speaking for Professional Leaders*

Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai Kementerian Keuangan dalam hal *public speaking* untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika. Sebagaimana diklat *soft competencies* lainnya, diklat ini terasa sangat menarik karena 70% materinya berupa praktek, yaitu berbicara di depan publik langsung. Dengan dipandu pengajar profesional yang sangat berpengalaman, Bapak Fonda Rafael dari LPP TVRI Bandung dan tim, tugas diklat yang muncul tiap malam untuk menyiapkan materi *public speaking* serta mempraktekkannya pada siang harinya menjadi hal yang terasa ringan dan menyenangkan bagi peserta. Bahkan hampir tiap hari pembelajaran molor lebih dari 1 (satu) jam dari jadwalnya dikarenakan peserta masih asyik berdiskusi dan meminta *advise* dari pengajar yang memang seorang praktisi *public speaking* dengan jam terbang tinggi ini.

Penyelenggaraan DKK *Public Speaking for Professional Leaders* di BDK Cimahi pada T.A. 2012 merupakan tahun kedua, setelah sebelumnya juga diselenggarakan pada T.A. 2011. Antusiasme peserta untuk mengikuti diklat ini sangat tinggi merupakan sebagian alasan untuk kembali menyelenggarakan diklat ini. Namun, hal yang cukup disayangkan adalah ketidakhadiran beberapa peserta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada panitia, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan menjadikan beberapa kursi kosong, padahal masih banyak cadangan peserta yang ingin mengikuti diklat ini. Secara umum peserta diklat ini berkomentar, "*semua pegawai, semua pejabat harus mengikuti diklat ini*". Pada T.A. 2013 pun, BDK Cimahi kembali akan menyelenggarakan diklat ini. Ada yang mau ikut?

2. DTU Kesamaptaaan Bea dan Cukai

Diklat dasar yang bertujuan untuk membentuk watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisiplinan, ketahanan mental dan fisiky yang baik, serta jiwa korsa

pegawai DJBC ini, juga bukan program baru bagi BDK Cimahi pada T.A. 2012. Namun, untuk pertama kalinya BDK Cimahi berhasil menyelenggarakan diklat ini dengan tenaga pengajar dari Satuan Komando Pasukan Khusus, yang merupakan salah satu satuan yang direkomendasikan Pusdiklat Bea dan Cukai dalam standar diklatnya. Tenaga pengajar diklat ini berasal dari Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus (Pusdikpassus) Batujajar Jawa Barat. Sedangkan lokasi pelatihan meliputi area yang cukup lengkap, yaitu:

- Area jelajah medan Pusdikpassus di sepanjang perbukitan Batujajar sampai Margasih Bandung. Lokasi ini digunakan untuk materi Minggu Penyegaran pada 3 (hari) pertama penyelenggaraan diklat.
- Waduk Saguling untuk materi berenang dan sebagainya.
- Area latihan perang hutan di Situ Lembang. Di lokasi yang tanpa sinyal seluler ini peserta mengikuti materi Latihan Berganda dan Menembak. Termasuk juga materi survival, di mana peserta belajar mengenali dan mencari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan makan hari itu. Kegiatan survival juga dikombinasi dengan praktik navigasi darat, di mana peserta mencari bahan makanan mentah yang disembunyikan oleh pelatih.
- Basis latihan di markas Pusdikpassus Batujajar untuk materi lainnya.

Pada T.A. 2012 jumlah peserta diklat ini di BDK Cimahi sebanyak 90 orang yang diselenggarakan dalam 2 (dua) periode diklat. Sedangkan pada T.A. 2013 BDK Cimahi kembali akan menyelenggarakan diklat ini sebanyak 1 (satu) periode dengan target peserta sebanyak 60 orang.

3. DF Pemeriksa Pajak Menengah

Diklat ini diselenggarakan BDK Cimahi pada tanggal 2 - 13 April 2012 selama 10 (sepuluh) hari, diikuti oleh para pejabat fungsional Pemeriksa Pajak Pertama. Pengajar diklat ini merupakan kombinasi antara Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Widyaiswara BDK Cimahi, Pejabat di lingkungan Direktorat Penyidikan dan Pemeriksaan DJP,

Selain itu, diklat ditunjang dengan materi cash flow games dari "Tim Bankir" LP2ES Daarut Tauhid Bandung, serta motivasi dari da'i kondang, KH. Abdullah Gymnastiar alias AA Gym.

pejabat di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, dan auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat.

Pada diklat ini, selain pembelajaran berupa tatap muka kelas, juga dilakukan PKL di Kanwil DJP Jawa Barat I. PKL dilaksanakan dalam format kunjungan dan *talkshow* antara peserta diklat dengan para narasumber dari Kanwil DJP Jawa Barat I yang mewakili seksi-seksi di KPP, pemeriksa/penyidik pajak senior dan penalaah keberatan. Format ini merupakan hasil diskusi antara panitia diklat dengan Kanwil DJP Jawa Barat I, dengan tujuan selain meningkatkan pemahaman peserta juga untuk membangun sinergi seluruh organ di KPP. BDK Cimahi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Kanwil DJP Jawa Barat I yang telah memberikan pejabat-pejabat terbaik di bidangnya sebagai narasumber *talkshow*.

4. DTU Persiapan Purnabhakti

Diklat ini ditujukan untuk menunjang kesiapan peserta diklat dalam memasuki masa pensiun, baik dari sisi psikologis, kesehatan dan keuangan serta kewirausahaan, agar peserta diklat dapat memasuki pensiun dengan bahagia, sehat dan sejahtera. BDK Cimahi menyelenggarakan diklat ini sebanyak 2 (dua) periode pada T.A. 2012 dengan peserta masing-masing 30 orang. Diklat yang dikemas interaktif dan menarik ini, 80% materinya berupa pengenalan peluang usaha dalam bentuk kunjungan lapangan dan seminar/*talkshow* dengan para pelaku bisnis. Narasumber diklat ini meliputi para psikolog, dokter/herbalis, praktisi keuangan, dan praktisi/pelaku bisnis. Selain itu, diklat ini juga ditunjang dengan materi *cash flow games* dari "Tim Bankir" LP2ES Daarut Tauhid Bandung, serta motivasi dari da'i kondang, KH. Abdullah Gymnastiar alias AA Gym.

Beberapa lokasi bisnis yang dikunjungi antara lain:

- a. *Home industry* tahu susu: Lembang dan Cihanjuang.
- b. *Home industry* bandrek: Cintek – Cihanjuang.
- c. Budidaya jamur: Jayagiri.
- d. *Home industry* kue: Ina Cookies.
- e. Perdagangan retail: SMM Swalayan
- f. *Jasa laundry*,
- g. Agrowisata *resto and resort*,
- h. Waralaba,
- i. dan lain-lain.

Hal unik dari diklat ini adalah rata-rata peserta mengusulkan agar keikutsertaan diklat juga termasuk keluarga, minimal suami/istri. Hal ini mengingat pemahaman terhadap masa pensiun

juga sangat penting diketahui bersama anggota keluarga lainnya, karena sering kali masalah *post power syndrom* juga akibat ketiadaan pemahaman dari anggota keluarga atas perubahan kondisi pasca pensiun. Bagaimana, bisakah BPPK mengakomodasi hal ini?

5. DTSS Pengelolaan BMN

Perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, terutama dalam pelaporan aset, mendasari BDK Cimahi untuk menyelenggarakan DTSS Pengelolaan BMN ini secara reguler dalam beberapa tahun anggaran terakhir. Pada T.A. 2012 BDK Cimahi menyelenggarakan diklat ini sebanyak 1 (satu) periode. Materi diklat ini meliputi pemahaman peraturan dan prosedur terkait pengelolaan BMN dan pengenalan aplikasi-aplikasi terkait pengelolaan BMN. Diklat ini diakhiri dengan ceramah dan penutupan oleh Bapak Syamsu Syakbani (Kepala Pusdiklat KNPK). Sedangkan untuk T.A. 2013, ketika sebagian besar satker di wilayah kerja BDK Cimahi sudah pernah mengirimkan peserta untuk diklat ini, tahun ini BDK Cimahi akan berganti menyelenggarakan DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, yang juga merupakan pendalaman terhadap salah satu siklus dalam pengelolaan BMN.

6. Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/ Jasa Khusus PPK

Diklat Penyegaran PBJ Khusus PPK ini merupakan diklat pembuka T.A. 2012 di BDK Cimahi, dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Januari 2012. Diklat yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia ini merupakan upaya *crash program* untuk para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Diklat ini permintaan Biro Perlengkapan Setjen Kementerian Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang tertera dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Selain diikuti oleh para PPK, beberapa peserta diklat ini adalah KPA yang masih merangkap sebagai PPK.

Diklat ini diakhiri dengan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 20 Januari 2012. Sayangnya belum semua peserta lulus dalam ujian sertifikasi ini. Diklatnya kurang efektif atau soalnya yang terlalu rumit atau ada hal non teknis lain ya?

*Penulis adalah Pelaksana pada BDK Cimahi





Foto: Pusdiklat AP

Organisasi & Kepemimpinan : KEPEMIMPINAN adalah SENI

Kepemimpinan (*leadership*) adalah seni. Keith Grint dalam Armstrong (2009) mengatakan bahwa kepemimpinan tidak dapat dipahami dengan pendekatan ilmiah karena pada dasarnya merupakan proses konstitutif. Pemimpin membentuk dan dibentuk oleh situasi mereka berada. Oleh karena itu Grint menyarankan kita harus berpikir bahwa kepemimpinan merupakan suatu seni. Beberapa pemimpin/manajer, meskipun tanpa pendidikan khusus, mempunyai jiwa kepemimpinan yang sanggup mengembangkan kreasi, ekspresi, dan intuisinya dalam memimpin, sehingga para bawah-

annya mengakui kualitas kepemimpinan mereka.

Senada dengan Grint, Handoko (1991) menyatakan bahwa manajemen merupakan kombinasi ilmu dan seni. Pada umumnya manajer lebih efektif mempergunakan pendekatan ilmiah untuk pembuatan keputusan. Di lain pihak manajer berhubungan dengan manusia sehingga harus juga menggunakan pendekatan artistik (seni).

Dalam organisasi, pemimpin itu membawahi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengorganisasian sumber daya manusia jauh lebih sulit

OLEH: AGUS HERMANTO

dibandingkan sumber daya lainnya karena karakteristiknya yang lebih kompleks. Mengelola manusia tidak sama dengan mengelola sumber daya lain yang notabene benda mati. Mengelola manusia melibatkan banyak aspek, seperti kinerja, perilaku, motivasi, dan sebagainya.

Memimpin itu berarti menginspirasi, mempengaruhi, dan memandu. Kepemimpinan menurut Armstrong adalah proses membuat orang untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) Kompetensi Kepemimpinan yaitu :

1. *Atensi (attention)*
Kemampuan mengungkapkan visi yang koheren dan menggugah.
2. *Pemaknaan (meaning)*
Kemampuan mensosialisasikan dan menjelaskan visi kepada orang lain.
3. *Kepercayaan (trust)*
Kemampuan menempatkan diri sebagai pribadi yang dapat diandalkan atau memberi keteladanan.
4. *Pengembangan diri (self development)*
Kemampuan mengembangkan potensi diri dan melaksanakan hasil pengembangan tersebut secara efektif.

Blanchard (2007) mengumpamakan kepemimpinan adalah sebuah perjalanan. Blanchard mengatakan bahwa “Jika Anda dan orang-orang Anda tidak tahu tempat tujuan Anda, kepemimpinan Anda tidak mempunyai arti apapun.” Oleh karena itu, visi bagi seorang pemimpin merupakan hal yang mutlak.

Carol A. O'Connor dalam bukunya *Successful Leadership in a Week* (1992) mengatakan bahwa visi adalah lampu jarak jauh yang dapat memberikan arah untuk setiap upaya. Jika jelas dan cemerlang maka perhatian orang akan tertarik dan minat serta keingintahuannya pun akan terangsang. Bahkan sekalipun rinciannya samar-samar atau tidak jelas, namun visi dapat digunakan sebagai penguat.

Visi yang meyakinkan akan menciptakan karakter yang kuat dimana energi yang dimiliki semua orang dalam organisasi akan menyatu. Hasil dari visi itu adalah kepercayaan, kepuasan pelanggan, pekerja yang memiliki semangat dan komitmen, dan hasil yang diinginkan.

Pemimpin harus mengetahui dengan jelas elemen kunci visi. Jesse dan Drea dalam Blanchard (2007) menguraikan tiga elemen kunci visi yang meyakinkan yaitu: tujuan utama, gambaran masa depan, dan nilai-nilai yang jelas.

Tujuan utama organisasi harus selalu diingatkan oleh pemimpin kepada bawahannya. Tujuan bukan sekedar menjelaskan apa yang harus dilakukan. Tujuan merupakan alasan keberadaan organisasi

itu sendiri. Maka tugas paling penting yang diemban pemimpin adalah memastikan bagaimana sumber daya yang ada selalu berada dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Pemimpin kadang-kadang bukanlah orang yang paling pintar dalam organisasi, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab organisasi sendiri. Pemimpin selalu mempertimbangkan setiap potensi yang dimiliki bawahannya serta mampu memotivasi bawahan. Selain itu pemimpin harus mampu mendiagnosa dengan baik situasi yang ada, dan kemudian mengubah perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi, dan memperlakukan bawahan sesuai dengan tingkat kematangannya atau kedewasaannya (*mature*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan pemimpin. Seringkali bawahan merupakan orang-orang pintar dan berpengalaman. Tetapi kadang potensi kekuatan mereka tidak keluar dalam organisasi sehingga organisasi tidak mendapat kontribusi yang positif. Inilah tugas pemimpin untuk mengeluarkan kekuatan yang tersembunyi dalam diri bawahannya. Pemberdayaan menurut Blanchard adalah proses melepaskan kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang – pengalaman, pengetahuan, dan motivasi – dan mengarahkan kekuatan tersebut untuk mencapai hasil-hasil positif bagi perusahaan (organisasi).

Dalam memberdayakan bawahannya, pemimpin dapat memberikan otoritas kepada orang-orang yang sesuai dengan bidang dan levelnya. Otoritas bukan berarti mereka menjadi bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka juga perlu diberikan pemahaman bahwa pemberian otoritas mempunyai konsekuensi adanya tanggung jawab dan risiko yang harus diambil. Oleh karena itu dalam pemberian otoritas, pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.

Pemimpin yang ingin sukses harus menjadikan pemberdayaan sebagai kultur dalam organisasi. Bagaimana kultur pemberdayaan ini dijalankan? Ada tiga

kunci pemberdayaan yang ditawarkan Blanchard: berbagi informasi kepada sesama, menciptakan kemandirian lewat batasan-batasan, dan mengganti birokrasi lama dengan individu dan tim yang mandiri.

Salah satu cara terbaik dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab adalah berbagi informasi. Pemimpin dapat membagi informasi yang dibutuhkan bawahannya untuk mengambil keputusan atau melaksanakan tugasnya. Memberi informasi penting kepada bawahan dapat juga mengandung makna pemimpin memberi kepercayaan kepada bawahan. Hal ini akan membawa pengaruh kepada bawahan untuk menjaga kepercayaan ini dengan menjadi lebih bertanggung jawab. Blanchard memberikan premis tentang berbagi informasi sebagai berikut :

“Orang-orang yang tidak memiliki informasi yang akurat tidak dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, orang-orang yang memiliki informasi yang akurat merasa wajib untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab.”

Berbagi informasi tidak selalu dari pemimpin kepada bawahan. Pemimpin dapat menggali informasi dari bawahan. Seringkali bawahan karena ada di lapangan mempunyai banyak informasi yang berhubungan dengan organisasi. Maka pemimpin perlu juga mendengarkan bawahan. Bahkan kalau perlu, pemimpin harus mau mendengarkan bawahannya sekalipun dari pegawai paling bawah.

Kunci pemberdayaan kedua adalah pemimpin menciptakan kemandirian dengan membuat batasan-batasan baru. Batasan-batasan baru ini harus berbeda dengan batasan dalam budaya birokrasi lama. Dalam birokrasi lama, batasan seperti pagar besi yang dialiri listrik. Pagar ini membatasi orang-orang yang berada di dalamnya agar tidak pergi kemana-mana. Kadang-kadang batasan ini bisa membuat orang yang punya potensi besar menjadi frustrasi. Batasan-batasan baru ini dapat merupakan suatu perubahan atas hal-hal yang “seperti biasanya”

dilakukan. Contoh kasus dari hal sederhana, misalnya untuk memenuhi kebutuhan atas ATK/peralatan perkantoran seorang pegawai harus menyampaikan kebutuhan secara tertulis yang ditandatangani atasannya, dimana pihak terkait tidak dapat menyediakan kebutuhan yang diperlukan secara cepat, sehingga pegawai merasa “terhambat” pekerjaannya. Semestinya hal seperti ini tidak perlu terjadi apabila seorang pemimpin mampu memberikan suatu batasan yang fleksibel dalam arti tetap memenuhi koridor aturan, koridor kebijakan serta koridor riil di lapangan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan dalam kultur organisasi yang baru dapat diibaratkan seperti karet gelang. Batasan dapat meregang seiring dengan kebutuhannya sehingga setiap orang dapat mengambil tanggung jawab tetapi tidak keluar dari organisasinya. Batasan ini harus bisa memberi tahu kapan seseorang dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab, bukan hanya membuat larangan-larangan bagi bawahan yang membuat mereka takut bertindak. Blanchard menggambarkan batasan seperti garis di lapangan tenis, batasan membantu pemain untuk terus mencetak nilai dan meningkatkan permainan mereka.

Organisasi semakin lama akan semakin besar. Permasalahan pun akan semakin kompleks. Sehingga organisasi tidak boleh lagi bergantung hanya kepada pemimpin. Lalu, harus bagaimana mengurangi ketergantungan ini? Jawabannya merupakan kunci terakhir dalam pemberdayaan yaitu mengganti birokrasi lama dengan individu dan tim yang mandiri.

Informasi telah dibagi dan batasan telah dibuat. Selanjutnya, orang-orang dalam organisasi bekerja secara mandiri sesuai tugas dan levelnya. Seorang pemimpin harus mampu memahami ada di level mana SDM yang dipimpinya :

1. SDM yang tidak tahu akan adanya suatu pekerjaan.
2. SDM yang hanya mengamati atas suatu pekerjaan.
3. SDM yang pasrah menerima peker-



Foto: Pusdiklat AP

jaan.

4. SDM yang mampu membuat sesuatu atas suatu pekerjaan.

Tipe yang keempat tersebut merupakan SDM yang mampu membuat sesuatu terjadi melalui proses kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Hal ini sangat diperlukan oleh organisasi yang bersifat pelayanan, sehingga pemimpin di dalamnya tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk melayani hal-hal yang bersifat teknis maupun klerikal.

Bagi organisasi yang tipenya pelayanan kepada pelanggan, sangat tidak efektif apabila petugas pelayanan bukan individu yang mandiri. Setiap ada keluhan dari pelanggan ditanyakan kepada pemimpin. Energi pemimpin akan habis untuk melayani pertanyaan atau keluhan yang sifatnya teknis. Pemimpin akan kehabisan energi untuk memikirkan hal-hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu orang-orang dalam organisasi harus dididik menjadi individu yang mandiri, tahu tugasnya dan tahu bagaimana menyelesaikannya.

Mungkin individu-individu tersebut mampu bekerja secara mandiri, tetapi kadang ada hal-hal di luar kemampuan mereka. Maka pemimpin dapat membentuk tim-tim yang bertugas menan-

gani hal-hal yang spesifik. Pemimpin dapat mengumpulkan orang-orang yang ahli di bidang tertentu dalam suatu gugus tugas (tim). Sementara orang-orang yang mempunyai keahlian lain dikumpulkan dalam tim lain.

Jadi, secara ringkas seorang pemimpin harus mampu menerapkan seni untuk dapat menyesuaikan tipe kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapinya, yaitu situasi yang mencakup waktu, tuntutan pekerjaan, kemampuan bawahan, pimpinan, teman sekerja, kemampuan dan harapan-harapan bawahan, tujuan organisasi serta tujuan individu dalam organisasi.

Sebagai penutup tulisan ini, secara sederhana terdapat 5 (lima) ciri-ciri pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi bawahannya :

1. Enak diajak berdiskusi
2. Mempunyai keputusan-keputusan yang terarah serta focus/tajam
3. Seorang konseptor yang baik dan rapi
4. Memiliki gaya komunikasi yang baik
5. Memiliki hubungan kedekatan dengan bawahan

*Penulis adalah Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Ilustrasi: Gathot Subroto

PIMPINAN YANG DICINTAI

OLEH: BUDI SETIAWAN

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Salah satu terobosan itu berlabel IKU atau Indikator Kinerja Utama. IKU adalah sebuah alat ukur yang mengendalikan tercapainya tujuan organisasi atau satuan kerja. Dengan IKU, setiap level kegiatan bisa diukur tingkat keberhasilan mulai dari pucuk pimpinan sampai ke level pelaksana. IKU ini juga mengikat setiap level pimpinan untuk memenuhinya, sebuah mekanisme yang di era sebelum reformasi tidak terjadi. Dampaknya adalah para pimpinan saat ini tidak bisa bekerja tanpa capaian yang jelas, mereka diamanahi sebuah target yang akan menentukan karir bahkan kehidupan mereka selanjutnya.

Hal inilah yang membuat mereka se-jatinya mengendalikan setiap tugas yang menjadi wewenangnya agar capaian IKU sesuai kontrak kerja yang sudah ditanda tangani. Salah satu variabel terpenting dari hal ini adalah bagaimana mengelola Sumber Daya Manusia yang ada di bawah tanggung jawabnya. Pegawai memang bukan segalanya tetapi segalanya berawal dari kinerja pegawai. Bagaimana seorang pimpinan mampu menciptakan kondisi dimana semua pegawai mau bergerak ke arah yang sama dengan penuh kesadaran dan gairah yang tinggi. Kiat-kiat berikut ini semoga bisa membantu kita mencapai kondisi tersebut.

1. Spritualisme

Kisah Ponari, seorang anak tanpa keistimewaan apapun yang tiba-tiba dalam waktu singkat menjadi jutawan karena “telunjuk ajaibnya”. Atau kisah Jepang sebagai Negara super modern seketika tak berdaya oleh tsunami yang sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Kedua kisah tadi menunjukkan bahwa ada kekuasaan tak terbatas yang menembus logika dan kemampuan umat manusia. Seringkali kita melupakan bahwa bagi-NYA semua mudah untuk diwujudkan

dengan syarat kita percaya pada kebesaran Tuhan. Hukum dan aturan Tuhan berlaku untuk semua ciptaan-Nya. Jika hati kita bersih dan ikhlas maka semua kesulitan akan kita hadapi dengan optimis, itu hukum Tuhan. Jika kita mengasihi manusia maka semua makhluk ciptaan-NYA juga akan mengasihi kita itu juga janji-NYA. Begitu juga jika kita bekerja 10 poin maka Tuhan akan membalasnya minimal 10 poin. Maknanya jika pimpinan bekerja eks-

Pimpinan adalah sumber solusi, dia sejatinya adalah tumpuan bagi para pegawainya di setiap kebuntuan ide dan kemandegan kreativitas.

tra dengan ikhlas dalam mewujudkan kebaikan organisasi dan mengayomi himpunan manusia di dalamnya, maka Tuhan tidak akan mengurangi sedikit-pun balasannya dalam berbagai wujud (solusi/jalan keluar, kesehatan, anak buah yang penurut, lingkungan yang menyenangkan, banyak teman, dsb). Sebaliknya pimpinan yang culus, korup, tidak jujur pastilah akan mendapat balasan setimpal tanpa dikurangi sedikitpun. Konsep spritualisme ini mutlak diyakini oleh semua pimpinan. Bagi seorang muslim sholat berjamaah di masjid, membayar zakat minimal 2,5%, banyak mengingat kematian dan sebagainya merupakan bagian dari ritual yang harus diwujudkan sebagai bukti keyakinannya akan kemahakuasaan Tuhan. Begitu juga perilaku-perilaku terpuji seperti rendah hati, membantu tanpa pamrih, risih kalau dipuji, tidak bergunjing, tidak merendahkan orang dan banyak lagi akan memunculkan rasa cinta dari orang seki-

tarnya terhadap pimpinan. Spritualisme mutlak dimiliki oleh setiap pimpinan pada saat dia melangkah untuk mencapai tujuan organisasi karena ketika Tuhan bersamanya maka tidak akan ada yang mampu menyurutkan langkah-langkah kebaikannya.

2. Cerdas dan Terbuka

Pimpinan adalah sumber solusi, dia sejatinya adalah tumpuan bagi para pegawainya di setiap kebuntuan ide dan kemandegan kreativitas. Dia harus mampu berpikir logis, mampu menyusun kembali “potongan-potongan gambar yang berserakan” karena perbedaan sudut pandang dan egoisme anggota organisasi. Perhitungannya detil dan cermat, tidak tergesa-gesa menyimpulkan fakta. Sangat berhati-hati dalam menggali informasi dan objektivitas selalu menjadi kaca mata yang memperjelas segala keraguan. Tetapi dia juga arif, banyak mendengar dan sangat terbuka dan toleran terhadap semua ide. Tipe manusia pembelajar dan tidak ragu atau malu untuk berguru pada yang lebih muda. Pimpinan seperti ini akan menciptakan kampus alami di lingkungan kantornya, dimana para pegawainya tidak pernah ragu untuk menunjukkan kelebihannya dan sebaliknya tidak rendah diri untuk bertanya hal-hal sedang-kgal apapun dihadapan pimpinannya. Suasana produktivitas kerja yang bergelora dinaungi dengan kehausan akan perbaikan kompetensi dan wawasan akan muncul jika pimpinan mampu menjadi “kepala sekolah” yang digandrungi. Akan muncul beragam solusi yang tak terduga. Kisah ditemukannya ide gila coklat putih (jelas-jelas coklat tapi warnanya putih) ternyata berasal dari seorang *office boy* yang tanpa ragu dan takut memberikan ide itu kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Suasana seperti inilah tentunya kita harapkan akan muncul di kantor karena pimpinan juga punya keterbatasan dalam memberikan solusi jitu untuk setiap masalah yang ada. Jangan sampai terjadi sebaliknya, kebanyakan pegawai “mati gaya” karena pimpinannya tidak memberikan apresiasi/pujian serta ruang untuk ide-ide pegawainya.

3. Komunikasi dan Empati

Mulutmu adalah hariamaumu. Lidah tak bertulang. Ungkapan ini mengajari kita betapa berbahayanya sebuah perkataan atau bahasa tubuh jika tidak dikelola dengan bijak. Kisah seorang anak yang diperintahkan oleh ayahnya menancapkan sebuah paku pada tembok kamarnya setelah dia menyakiti temannya akibat perkataannya. Setelah melihat begitu hancurnya tembok di kamarnya, sang ayah meminta dia untuk mencabut setiap paku sembari meminta maaf kepada teman yang dilukai, maka saat itu sang anak tertegun ketika menyadari bekas paku itu menimbulkan lubang yang membuat tembok itu tidak seperti sedia kala.

Hati yang tersakiti akan menghilangkan kepercayaan dan penghormatan kepada kita. Komunikasi lisan yang santun dibalut bahasa tubuh yang “enak dipandang” akan meluluhkan hati lawan bicara kita, apalagi kalau kita melakukannya untuk pegawai yang tingkatannya di bawah kita. Kata-kata “terima kasih” dan “mohon maaf” yang diucapkan dengan tulus kepada pegawai (kalau kepada atasan sudah pasti akan dilakukan) terbukti akan memunculkan penghormatan kepada kita. Bahkan jika dalam kondisi lelah atau galau sekalipun sikap ini tetap kita pertahankan, percayalah, semua orang akan nyaman berada di dekat kita dan puncaknya kehadiran kita akan dirindukan pegawai kita.

4. “Blusukan”

Jokowi menjadi begitu melegenda karena kebiasaan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui keinginan masyarakat Jakarta sekaligus melihat langsung kinerja para pegawainya. Kita juga dituntut untuk sering “blusukan”. Apalagi area wewenang dan tanggungjawab kita sangat terjangkau untuk itu. Hanya saja makna dari blusukan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pegawai kita atau mengomentari setiap pekerjaan pegawai kita dengan gaya yang “menggurui”. Tetapi justru untuk merasakan kompleksitas urusan lapangan yang sehari-hari diha-

dapi pegawai. Pimpinan yang bijak akan ikut berempati dengan keruwetan tersebut dan ikut memberikan “penenang” berupa solusi yang mampu dipahami dan dikerjakan oleh pegawainya. Jangan sampai gara-gara kita sering turba (turun ke bawah) bahkan sidak, para pegawai malah merasa terintimidasi dan akan mempengaruhi loyalitas dan produktivitas mereka. Dengan blusukan kita akan mendapatkan fakta langsung tentang kondisi kantor kita termasuk keinginan para pegawai. Hal yang persis sama juga berlaku terhadap pemangku kepentingan kita. Dengan berdialog langsung kepada mereka, kita akan lebih mendalami ke-

butuhan dan ekspektasi mereka.

Perubahan Diawali Dengan Contoh Dari Pimpinan Tertinggi Yang Dilakukan Secara Konsisten (Istiqomah). Kepeloporan Dalam Prilaku Yang Baik Lebih Hebat Dari Berjuta Kata-Kata.

mereka.

5. Yang Pertama dan Konsisten

Banyak pakar SDM menyatakan bahwa perubahan diawali dengan contoh dari pimpinan tertinggi yang dilakukan secara konsisten (*istiqomah*). Kepeloporan dalam prilaku yang baik lebih hebat dari berjuta kata-kata. Saat kita ingin pegawai menjalankan prilaku tertentu sejatinya kita dikenal sebagai figur yang konsisten melakukan prilaku tersebut. Jika ingin membudayakan integritas, misalnya, maka kita harus menghindari

sejauh mungkin menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Begitu juga jika kita ingin pegawai bersinergi dalam bekerja tentunya kita tidak pilih kasih dan berlaku adil kepada setiap pegawai serta menjauhi untuk menjelek-jelekan pekerjaan unit lain. Dia harus ikhlas bekerja lebih lama dan lebih giat ketimbang pegawainya. Lebih tenang dan dewasa ketika ada masalah tak terduga terjadi. Sekali saja pimpinan berbuat kesalahan maka dia harus meyakinkan pegawainya (melalui perbuatan nyata) selama sehari-hari agar mereka memahami kekhilafan kita sebagai manusia biasa sehingga bisa memakluminya dan bukan mencap kita sebagai “omdo” (omong doang) atau NATO (*not action talk only*). Sebaliknya jika citra kita sudah “*excellent*” dimata pegawai maka kekhilafan/kelemahan kita akan dimaklumi bahkan ditutupi oleh pegawai atau orang-orang di sekitar kita. Kembali ke fenomena Jokowi membuktikan itu, apa saja yang dilakukannya dianggap tepat dan benar oleh kebanyakan orang.

6. Bugar

Melengkapi hal-hal di atas tentunya seorang pimpinan semestinya mempunyai penampilan yang meyakinkan dan ini sangat ditopang oleh kebugaran fisiknya. Berdirinya tegap dan kokoh, tidak mudah lelah walaupun kerja maraton, wajahnya selalu ceria dan optimis, ahli dalam salah satu cabang olahraga dan sebagainya. Semua ini tentunya ditopang oleh gaya hidup sehat dan seimbang yang dijalannya. Mengenai hal ini bisa dibaca artikel-artikel kesehatan karena penulis sadar belum memenuhi kriteria secara ideal.

Penulis yakin masih begitu banyak pengalaman-pengalaman yang telah dijalani oleh pembaca mengenai hal ini dan semoga bisa disebarluaskan melalui rubrik ini pada kesempatan yang lain.

*Penulis adalah Kepala BDK Malang

OLEH: KRISTIAN AGUNG PRASETYO

Sumber: www.123rf.com



SIAPA YANG MENIKMATI KENAIKAN PTKP

Pendahuluan

Pada awal tahun 2013, pemerintah memberikan bingkisan tahun baru bagi wajib pajak di Indonesia. Dibingkai di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batasan penghasilan yang tidak kena pajak. Presiden SBY dalam kesempatan meresmikan Rusunawa di Batam pada

tanggal 27 April 2012 menyatakan bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan di bawah Rp 24 juta setahun tidak perlu membayar pajak penghasilan. Angka ini merupakan kenaikan dari sebelumnya yang sejumlah Rp 15,8 juta per tahun. Presiden selanjutnya menambahkan bahwa tujuan diberlakukannya kenaikan ini adalah untuk meringankan beban pekerja khususnya mereka yang memiliki

gaji yang tidak terlalu besar sehingga tidak lagi terbebani oleh pajak. Tulisan ini ditujukan untuk melihat apakah manfaat itu bisa dicapai. Untuk itu, pertama akan dibahas tinjauan ringkas mengenai pajak penghasilan, filosofi dasar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan selanjutnya dilakukan studi kasus atas pengaruh PTKP atas pajak penghasilan yang dibayar oleh sebagian

PNS di lingkungan KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2009.

Kerangka Teoritis Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan penghasilan – disebut dengan Haig-Simons *income* – adalah peningkatan kemampuan riil seseorang untuk melakukan konsumsi produk dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian penghasilan merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dipakai dalam satu tahun ditambah dengan perubahan jumlah kekayaan pada periode yang sama. Karena yang dihitung adalah kemampuan riil, maka kenaikan gaji karena menyesuaikan dengan inflasi misalnya tidak dihitung sebagai penghasilan. Di dalamnya termasuk uang tunai – misalnya gaji – dan non tunai seperti manfaat asuransi kesehatan yang disediakan pemberi kerja. Termasuk pula disini seluruh *benefit* yang disediakan negara seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, kartu Jakarta Sehat, atau program lain semacam itu serta *capital income* (misalnya bunga, sewa, dan *capital gain*). Untuk menghitung penghasilan bersih, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan harus dikurangkan karena mengurangi kemampuan konsumsi.

Di dalam UU PPh di Indonesia, penghasilan didefinisikan sebagai adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lain negara lain definisi. Di Australia misalnya, definisinya berbeda. Disana, *Income Tax Assessment Act* tahun 1997 (ITAA97) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah *assessable income*. ITAA97 membagi *assessable income* menjadi *ordinary income* dan *statutory income*. *Ordinary income* didefinisikan sebagai penghasilan

sebagaimana dipahami pada umumnya, misalnya gaji.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *statutory income* adalah penghasilan yang tidak termasuk ke dalam *ordinary income* namun dikenakan pajak, contohnya royalti, bonus asuransi, *capital gain*, dan pesangon.

Tidak semua jenis penghasilan menurut Haig-Simons dikenakan pajak. Pasal 4 ayat (3) UU PPh misalnya mencatat serangkaian hal yang jelas menambah kemampuan konsumsi namun tidak dikenakan pajak. Selain itu ada pula pajak yang harus dibayar ketika terjadi penjualan modal tanpa memperhitungkan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang itu, misalnya PPh final atas penjualan saham atau tanah. Belum lagi kenyataan bahwa semua penghasilan diukur secara nominal, bukan riil sebagaimana dikehendaki Haig-Simons. Dari sini terlihat bahwa perbedaan antara definisi penghasilan menurut UU PPh dengan definisi Haig-Simons bisa menimbulkan kekuranganadilan.

Lalu mengapa penghasilan tetap dikenakan pajak jika sistemnya bisa jadi kurang adil? Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian utama semua pemerintahan di dunia adalah kesenjangan sosial. Di Indonesia, kesenjangan sosial ini nampaknya semakin hari semakin besar. Secara matematis, hal ini bisa dilihat dari semakin tingginya angka koefisien Gini. Koefisien Gini adalah satu angka yang mengukur ketimpangan penghasilan di mana 0 menunjukkan *complete equality* (penghasilan semua orang sama) dan 1 mengindikasikan *complete inequality* (seluruh penghasilan hanya dimiliki oleh satu orang saja). Angka koefisien Gini di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan yang parah. Indonesia sendiri pada tahun 2011 lalu mempunyai koefisien Gini sebesar 0,41 (lihat tabel), mendekati angka psikologis sebesar 0,5.²

Selain itu, Credit Suisse dalam *Global Wealth 2012* mencatat bahwa hanya terdapat 104 ribu orang kaya dari 155 juta orang dewasa di Indonesia – berarti kurang dari 0,07% – yang mempunyai

aset di atas USD 1 juta (sekitar Rp 9 milyar lebih). Pajak penghasilan ada untuk untuk mengurangi kesenjangan penghasilan seperti ini. Contoh mutakhir barangkali adalah konsensus *fiscal cliff* di Amerika Serikat.³ Saat itu Obama dan Kongres menyepakati kenaikan pajak penghasilan dan membatasi *exemption* serta *deduction* untuk wajib pajak kaya dengan penghasilan di atas USD 400 ribu setahun. Namun di pihak lain mereka memberikan perpanjangan pemberian kredit pajak dan *unemployment benefit* untuk golongan menengah ke bawah.

Mengapa Perlu PTKP?

Salah satu hal yang harus diperhatikan tentang pajak adalah konsep keadilan. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana beban pajak harus ditanggung oleh berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan tingkat kemakmurannya. Inilah yang disebut dengan *vertical equity*.⁴ Jika semakin makmur satu golongan masyarakat pajak yang harus dibayar semakin tinggi, maka berarti beban pajaknya dibagi secara progresif. Sistem pajak satu negara lebih progresif dibandingkan dengan negara lain jika tarif pajak efektifnya (pajak terutang dibagi total penghasilan) peningkatannya lebih cepat jika penghasilannya naik. Prinsip inilah yang dianut di Indonesia.

Di Indonesia, pasal 17 UU PPh menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan terdiri atas empat lapisan mulai dari 5% untuk lapisan terendah sampai dengan 30% untuk mereka yang

Tahun	Koefisien Gini
1999	0,31
2009	0,37
2010	0,38
2011	0,41

sumber: Sinaga, A. (2012)

berpenghasilan di atas Rp 500 juta. Selain itu di dalam pasal 7 ditambahkan aturan mengenai PTKP. Secara matematis, PTKP pada hakikatnya dapat dipandang sebagai lapisan tambahan di bawah

lapisan dengan tarif terendah sebesar 0%. Dengan demikian PTKP ada untuk mempertajam pemenuhan unsur *vertical equity* itu.

Satu hal yang harus diperhatikan bahwa aturan-aturan terkait dengan tarif PPh dan PTKP diatas menggunakan angka nominal sebagai batas atas dan batas bawah. Tentunya seiring dengan adanya inflasi, angka nominal ini semakin lama nilainya secara riil akan terdilusi, terutama jika tingkat inflasinya tinggi.⁵ Akibatnya, secara riil seiring dengan pertumbuhan laju inflasi semakin lama orang akan mengalami kenaikan lapisan pajak seiring dengan kenaikan penghasilannya secara nominal untuk menyesuaikan dengan laju inflasi. Meskipun naik, namun secara riil sesungguhnya tidak. Inilah yang disebut dengan *bracket creeping*.

Dengan demikian kalau memang tujuannya untuk memenuhi *vertical equity*, maka besarnya batas *bracket* harus senantiasa disesuaikan. Inilah yang dicoba dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan PTKP. Dirjen Pajak menegaskan bahwa PTKP memang dinaikkan mengikuti indeks biaya hidup dan upah minimum sesuai dengan kenaikan laju inflasi. Tujuannya supaya – sebagaimana ditegaskan Menteri Keuangan – kemampuan

finansial rakyat meningkat. Penyesuaian seperti ini oleh Dirjen Pajak dinyatakan – meskipun idealnya dilakukan tahunan – hanya akan dilakukan tiga sampai empat tahun sekali supaya secara administratif tidak merepotkan. Perkembangan besaran PTKP untuk diri wajib pajak sendiri terlihat pada tabel.

Selain terkait unsur keadilan, peningkatan PTKP diyakini mempunyai dampak positif bagi kondisi makro ekonomi Indonesia. Hal ini karena

peningkatan PTKP akan menambah *disposable income* masyarakat sehingga jumlah uang yang bisa dibelanjakan, ditabung, atau diinvestasikan meningkat. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional melalui peningkatan konsumsi dan tabungan. Bahkan peningkatan ini diyakini Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% meskipun ada potensi kerugian negara sebesar Rp 12 triliun dari sektor PPh. Namun demikian, Direktur P2Humas Ditjen Pajak meyakini bahwa penurunan penerimaan PPh ini akan diimbangi oleh peningkatan penerimaan PPN akibat kenaikan konsumsi meskipun besarnya belum diketahui dengan pasti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data gaji dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh PNS di lingkungan KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2009. Pengambilan dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Access 2013 dan Microsoft Excel 2013.

Analisis Data

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat pengaruh diberlakukannya PTKP baru terhadap beban pajak dengan menggunakan *repeated measures design*. Dengan teknik ini, untuk satu subjek penelitian diterapkan dua perlakuan yang berbeda dan dicatat perbedaannya. Dengan demikian pengaruh perbedaan perlakuan bisa diisolasi. Untuk itu

Dasar Hukum	Jumlah	Masa berlaku
UU No 8 tahun 1983	Rp 960.000	1 Jan 1984 s.d. 31 Des 1993
Keputusan Menkeu No 928/KMK.04/1993	Rp 1.728.000	1 Jan 1994 s.d. 31 Des 1994
UU No 10 tahun 1994	Rp 1.728.000	1 Jan 1995 s.d. 31 Des 1998
Keputusan Menkeu No 361/KMK.04/1998	Rp 2.880.000	1 Jan 1999 s.d. 31 Des 2000
UU No 17 tahun 2000	Rp 2.880.000	1 Jan 2001 s.d. 31 Des 2004
Keputusan Menkeu No 564/KMK.03/1998	Rp 12.000.000	1 Jan 2005 s.d. 31 Des 2005
Peraturan Menkeu No 137/PMK.03/2005	Rp 13.200.000	1 Jan 2006 s.d. 31 Des 2008
UU No 36 tahun 2008	Rp 15.840.000	1 Jan 2009 s.d. 31 Des 2012
Peraturan Menkeu No 162/PMK.011/2012		1 Jan 2013 s.d. sekarang

Pembahasan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah manfaat pemberian PTKP sebagaimana dijelaskan di atas bisa terpenuhi.

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus di KPP Pratama Tangerang Timur untuk penghasilan yang diterima oleh PNS di lingkungan kantor itu selama tahun 2009.

dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan PNS yang mempunyai masa kerja satu tahun penuh.
2. Pengumpulan data penghasilan PNS terpilih untuk tahun 2009.
3. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan selama tahun 2009 dengan memperhitungkan biaya jabatan sebagai *deductible item* dan PTKP sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 sebagai *personal exemption*.

4. Proses di atas diulangi lagi dengan menggunakan skema PTKP baru.
5. *Summarising* berdasarkan golongan PNS untuk melihat perbedaan PPh ps 21 per golongan.

Secara keseluruhan terdapat 79 PNS yang menjadi objek penelitian. Perinciannya sebagai berikut:

Total PNS ini meliputi satu orang pemegang jabatan Eselon III, sepuluh

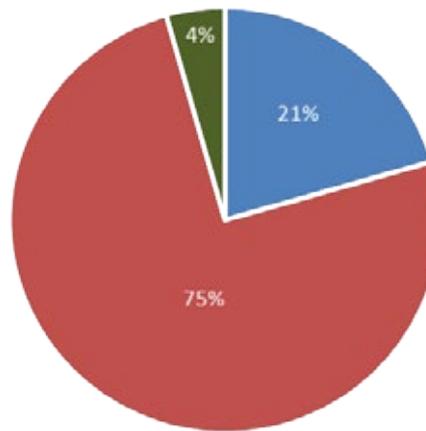
Gol.	Jumlah	Penghasilan
II	34	2,457,885,600
III	44	5,157,182,640
IV	1	221,580,000
Total	79	7,836,648,240

orang Eselon IV, Fungsional Pemeriksa dan Penilai PBB, serta pelaksana. Perhitungan PPh ps 21 per golongan sebagai berikut:

Melihat tabel di atas, dapat diketahui

Gol.	PPh		Selisih
	Skema Lama	Skema Baru	
II	118,098,280	87,955,350	30,142,930
III	430,619,396	365,529,412	65,089,984
IV	25,267,000	23,680,750	1,586,250
Total	573,984,676	477,165,512	96,819,164

bahwa dengan penerapan PTKP dengan skema baru, maka terjadi penurunan jumlah pajak terutang secara keseluruhan sebesar Rp 96 juta lebih, dari sebelumnya mencapai hampir Rp 574 juta turun menjadi sekitar Rp 477 juta. Ini berarti terdapat pengurangan penerimaan pajak sebesar 16,87%. Dari jumlah ini, yang mengalami penurunan pembayaran pajak terbesar adalah PNS golongan III sejumlah Rp 65 juta lebih. Ini berarti mencapai 75% dari seluruh penurunan beban PPh. Pegawai golongan II yang mempunyai penghasilan lebih rendah justru hanya menikmati penurunan beban pajak hanya sebesar 21% saja. Dengan demikian, nampaknya tujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan yang lebih



rendah dengan menaikkan PTKP dalam konteks ini belum mampu menunjukkan indikasi keberhasilan. Ketiga, berdasarkan studi yang dilakukan secara terbatas atas penghasilan yang diperoleh PNS di lingkungan KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2009, diketahui bahwa penurunan PPh ps 21 akibat penerapan aturan baru sebagian besar dinikmati oleh PNS golongan III. Di sisi lain, PNS golongan II yang berpenghasilan lebih rendah di kantor itu hanya menikmati penurunan beban pajak kurang dari separuh penurunan pajak yang dinikmati mereka yang berpenghasilan lebih tinggi.

Batasan dan Penelitian Lebih Lanjut

Artikel ini mempunyai beberapa batasan yang mungkin memperlemah hasil analisis. Kelemahan utama barangkali adalah keterbatasan *sample* yang dipergunakan.

Data yang dipakai hanya terbatas pada satu instansi vertikal pemerintah pada satu tahun pajak saja, dengan demikian ukuran *sample*-nya pun relatif kecil. Untuk meningkatkan akurasi penelitian, barangkali perlu dilakukan analisis atas data penghasilan untuk instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga non pemerintah. Bahkan jika memungkinkan dilakukan analisis atas data pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan oleh pengusaha kecil dan kaum profesional. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh meliputi seluruh jenis wajib pajak orang pribadi. Bagaimana pendapat Anda?

- 1 ITAA97 tidak memberikan panduan yang lebih spesifik tentang apa saja yang dimaksud dengan ordinary income. Namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Australia dalam FC of T v Dixon mengindikasikan bahwa karakteristik utama ordinary income adalah perulangan.
- 2 Bandingkan dengan Denmark yang mempunyai koefisien Gini sebesar 0,25 pada tahun 2008.
- 3 Istilah fiscal Cliff pertama kali dipergunakan oleh Walter Stern di New York Times pada tanggal 20 Oktober 1957 yang mengacu pada orang yang mempunyai pinjaman terlalu banyak untuk membeli rumah pertama.
- 4 Selain vertical equity, dikenal pula apa yang disebut dengan horizontal equity yang menyatakan bahwa jika ada dua orang yang mempunyai tingkat kemakmuran sama, maka beban pajaknya seharusnya sama.
- 5 Tingkat inflasi selama tahun 2012 dan tingkat inflasi year on year (Desember 2012 terhadap Desember 2011) sebesar 4,30 persen.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak

Why I



Teaching Reading at MOF

I teach English for STAN students and MOF officials, and I often hear them say that learning English is hard. I see that the major reason for the problems is their previous background on learning English, which is teacher-oriented method, book-centered method, for years and make them a little bit passive. Their focus on learning English is just to pass the exam and this leads them to anxiety. And no wonder that they think learning English is a heavy practice to memorize many grammatical rules and vocabulary. And reading class is definitely not the favorite of some participants. But I still have the enthusiasm to teach it since it is a rewarding activity for me.

In my view, teaching reading is one of the best practices for EFL (English as

a Foreign Language) students, because it is a kind of an exercise of reason. As an expert said, it is an exercise dominated by the eyes and the brain, and provides huge advantage for EFL students (Harmer, 2004).

In my context, I have experienced many activities dealing with reading practice. Mostly, the main objective is to understand a reading text or to get the important information from it. For this goal, I always convince my students and trainees that English text can be understood if they keep on reading it until the last sentence of the passage. For me, an English text can be comprehended even though there are new vocabulary and structures that they have never seen before. They just have to guess and predict the meaning of the context and train their brain to digest the information on the passage. I usually make an illustration for them: they are just learning how to get to Blok M by car, and I told them the way to get there and that they just need to drive according to the instruction. Do not stop over if they find something strange or need to know (it's the new vocabulary or structure), because the more often they did that, the longer it will be to get to the destination. To get the idea of what a text is about can be done in shorter time if they are skilled, or keep on reading for comprehension rapidly.

After they get the idea of the text, I usually ask some questions to check whether they can extract the information on the passage. It can be a combination between open-ended questions and Yes/No questions. This activity can be a practice for speaking for them.

In other objective, I can also use reading as communicative task, i.e. activity to foster my students ability to communicate in English. For example, I give a text, and they are asked to discuss it in small groups as the task assigned for them, such as:

- to get a clue in a case study,
- to rearrange the jumbled paragraphs into a good story,
- to discuss their stand points after reading certain issue,
- to discuss the moral value of a story

OLEH: EFI DYAH INDRAWATI

or news,

- to find the suspect in a crime story, etc

By doing so, I eventually lead the class into an active class discussion.

The last objective and also the most important for me is to stimulate them to pronounce better while reading aloud (another exercise for speaking). It's a good practice because I can monitor their progress in speaking by doing this. I can know easily whether they keep on improving or not. (I usually motivate them to practice reading aloud at home, read bedtime story, or recite a poem, or reading newspaper like a news anchor. It's a good exercise for pronunciation, stresses, and intonation). Indeed, reading a text aloud can indicate our speaking proficiency.

So, teaching reading is also a kind of teaching skills to my students. I like teaching reading, because it will also encourage me to keep on improving. In reading, we will continue to find something new: it can be some difficulty, some new skills, or more information that can widen our horizon. I am always amazed by MOF participants ideas and their fresh outlook when we discuss a reading passage. Classrooms are dynamic work environments, and no two days are ever the same. Perhaps that is because the participants are adult learners and therefore they are very cooperative in class. I think it takes a lot more tolerance to work in a stuffy office day after day, but being in a reading class is different: it's so much fun. One of the best things about my job is that it's never boring, and I almost never have to sit still for long.

*Writer is English Lecturer at Pusdiklat
Keuangan Umum



PU-SAP

OLEH: S U M I N I

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penye-

Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah Secara Nasional Telah Mendapati Titik Terang dengan Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PU-SAP).

lenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kuangan negara sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, menunjukkan bahwa seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dilaporkan pada laporan keuangan, berupa neraca, baik di Neraca Pemerintah Pusat maupun Neraca Pemerintah Daerah adalah bagian dari keuangan negara. Demikian juga dengan kas masuk dan kas keluar yang dilaporkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Laporan Arus Kas atas realisasi anggaran pendapatan maupun realisasi anggaran belanja juga merupakan bagian keuangan negara. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan hasil dari pelaksanaan keuangan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dan informasi dari pelaksanaan keuangan negara tiap tahun anggaran, disajikan dalam LKPP dan LKPD.

Beberapa pengamat keuangan negara dan masyarakat yang peduli terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Dae-

rah, tentu mengamati dengan baik apa yang dipertanggungjawabkan dalam isi laporan keuangan. Berapa besarnya realisasi pendapatan dan realisasi belanja Pemerintah Pusat di LRA, berapa besarnya aset di Pemda A, berapa besarnya kewajiban di Pemda B, berapa besarnya aset bersih yang terlihat dalam ekuitas dana di pemda C, berapa besarnya aset pemerintah di BUMN/BUMD, bahkan berapa besarnya Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Pusat saat ini, semua dapat diperoleh angkanya dari LKPP dan LKPD yang telah disusun pada tiap tahun anggarannya. Akan tetapi masih ada satu hal yang terus dipertanyakan sampai dengan hari ini **“mengapa tidak ada Laporan Keuangan Negara?”**

Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ditambah 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi/kabupaten/kota sama dengan laporan keuangan Negara? Kapan kita punya Neraca Negara? Berapa aset negara kita? Siapa yang harus menyajikan ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul di publik. Bahkan, ada yang salah paham saat membaca Neraca Pemerintah Pusat dalam LKPP Tahun 2011 (*audited*) dan langsung mengerutkan keningnya, “negara kita cuma punya Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun? Padahal bukan negara kita tapi Pemerintah Pusat kita karena angka itu tidak termasuk angka Aset Tetap di Pemerintah Daerah. Lantas, kapan Laporan Keuangan Negara bisa kita miliki? Pertanyaan dan tuntutan tersebut tentu saja berdasar. Keuangan Negara dan definisinya sudah secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam penjelasannya, mengatur penyajian Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kegiatan pemerintahan, analisis kebijakan fiskal dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Presiden, dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yang dikuasakan kepada: (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, (2) menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dan (3) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ruang lingkup keuangan negara yang dikuasakan pada Menteri Keuangan pada poin 1 dan yang dikuasakan pada menteri/pimpinan lembaga pada poin 2 tersebut, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujudnya. Sedangkan bagian keuangan negara pada poin 3 yang diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan APBN harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK juga selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penggabungan laporan keuangan secara nasional atau disebut juga dengan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional telah mendapati titik terang dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PU-SAP). PMK tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam rangka: (1) penyusunan sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dan (2) penerapan statistik keuangan pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik

keuangan pemerintah secara nasional. PMK ini dapat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyamaan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersusun dari sistem akuntansi pemerintahan yang sama akan sangat mendukung proses konsolidasi.

PU-SAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya Bagan Akun Standar (BAS) baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. SAP pada Pemerintah Pusat disusun oleh Menteri Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan SAP pada Pemerintah Daerah disusun oleh gubernur/bupati/walikota yang diatur dalam peraturan gubernur/bupati/walikota. Dengan sama-sama mendasarkan pada PU-SAP maka semestinya tidak terjadi kesenjangan dalam sistem. SAP pada Pemerintah Pusat menghasilkan LKPP, sedangkan SAP pada Pemerintah Daerah menghasilkan LKPD. LKPP dan LKPD, menurut PU-SAP masing-masing terdiri atas: (a) Neraca, (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Arus Kas (LAK), (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

PU-SAP mengatur BAS berbasis akrual yang membedakan antara BAS untuk Pemerintah Pusat, BAS untuk Pemerintah Daerah, dan BAS Nasional untuk tujuan konsolidasi akuntansi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BAS merupakan *tools* untuk mensinkronkan proses perencanaan dan penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya BAS, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat dipenuhi. BAS mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi, yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan lapo-

ran keuangan. Mengingat pentingnya peran kode BAS maka diperlukan standarisasi kode akun sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya. Panduan penyusunan BAS untuk Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah dicantumkan sampai level 3 (3 digit), sedangkan untuk pengembangan detilnya (digit ke-4 dan seterusnya), BAS untuk Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini untuk memberikan keseragaman pada level tertentu sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun BAS untuk konsolidasi, PMK Nomor 238/PMK.05/2011 ini telah memberikan pedoman dalam bentuk akun level 3. Sebagai contoh, untuk neraca konsolidasi, kode 1: Aset, kode 11: Aset Lancar, yang digunakan untuk mencatat Aset Lancar yang ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP, kode 111: Kas dan Setara Kas, digunakan untuk mencatat kas dan setara kas pada Pemerintah Pusat yang merupakan penjumlahan akun Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Pusat dan akun Kas pada Pemerintah Daerah (untuk lebih jelasnya dapat dilihat BAS untuk Pemerintah Pusat, BAS untuk Pemerintah Daerah dan BAS untuk konsolidasi dapat dilihat pada Bab III Bagan Akun Standar pada lampiran PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan).

Sejak digulirkannya reformasi pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah meskipun laporan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah. Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah mensyaratkan adanya konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belum dapat tersusunnya konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah disebab-

kan oleh perbedaan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam pengaturan kebijakan akuntansi dan Bagan Akun Standar. Oleh karena itu, dengan PU-SAP yang menyediakan kerangka sistem akuntansi berbasis akrual bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dapat diwujudkan. Pendekatan yang seragam dapat memfasilitasi pengertian yang lebih baik atas penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, yang akhirnya akan mendukung terlaksananya konsolidasi fiskal dan statistik pemerintah.

Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif akan aktivitas pemerintah dan pengaruh jangka panjang dari kebijakan yang diambil sehingga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah menekankan pada kesinambungan dan manajemen fiskal yang baik untuk menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Statistik Keuangan Pemerintah merupakan standar pelaporan ekonomi untuk pemerintahan berdasarkan standar internasional yang relevan. Standar internasional yang menjadi acuan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah adalah *Government Finance Statistics Manual* (GFSM) yang diterbitkan oleh Internasional Monetary Fund (IMF).

Dengan demikian, kehadiran PU-SAP dapat menjadi titik terang untuk mengeliminasi perbedaan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga upaya mewujudkan Statistik Keuangan Pemerintah tidak lagi sebatas harapan. Tentu, implementasi PU-SAP lebih penting lagi dan hal ini dibutuhkan upaya serius dan koordinasi yang intensif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semoga diberi kemudahan dalam melangkah.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

ROBOHNYA SURAU KAMI

OLEH : AGUS SUHARSONO

Ilustrasi: Gathot Subroto

Cerpen Robohnya Surau Kami masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Novel yang ditulis oleh Haji Ali Akbar Navis lebih dikenal dengan A.A. Navis yang lahir di Kampung Jawa, Padang, Sumatera Barat 17 November 1924 dan berpulang 22 Maret 2003. Novel luar biasa ini ditulis tahun 1956.

Begini Ceritanya

Sahdan, diceritakan kakek penunggu surau yang mati mengenaskan dengan cara mengorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Perbuatan nekat itu dipicu oleh sebuah bualan yang disampaikan oleh Ajo Sidi, seorang pedagang keliling. Diceritakan Haji soleh yang ahli ibadah di hari akhir harus masuk neraka. Ketika Tuhan bertanya kepada Haji Soleh apa yang dikerjakannya selama di dunia dengan bangga ia berkata 'Ya, Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembah-Mu, menyebut-nyebut nama-Mu. Bahkan dalam kasih-Mu, ketika aku sakit, nama-Mu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hati-Mu untuk menginsafkan umat-Mu.' Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia di bawa ke neraka. Di akhir cerita taulah Haji Saleh mengapa harus masuk neraka. Ia dan beberapa kenalannya yang taat beribadah ritual hidup di Indonesia yang dikaruniai kesuburan, mahakaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya. Tetapi penduduknya sendiri melarat bahkan sampai kepada keturunan-keturunannya. 'Sungguhpun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala.' Elak Haji Saleh.

Tuhan Mahatahu 'Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang.'

Begini Pelajarannya

Banyak sekali pelajaran yang bisa

kita petik dari cerpen tersebut. Kali ini saya akan mengambil sedikit hikmah yang saya dapat. Tidak cukup hanya beribadah ritual untuk masuk surga tetapi harus juga beribadah secara nyata, yaitu bekerja. Jika kerja adalah ibadah maka sebagaimana ibadah ritual yang ada syarat dan rukunnya demikian juga kerja harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Pekerjaan itu bisa apa saja, termasuk menjadi Pegawai Kementerian Keuangan, artinya juga harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jika saat ini kita sudah menjadi pegawai berarti sudah memenuhi syarat, demikian juga jika kita

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata rukun sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi apa rukun pekerjaan kita ?

menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional juga sudah memenuhi syaratnya. Hal itu sering dicantumkan dalam konsideran Surat Keputusan Mutasi, biasanya dalam menimbang disebutkan bahwa pegawai yang bersangkutan dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan baru sebagaimana ditetapkan dalam lajur lima, sehingga berhak mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam lajur enam. Apapun jabatan Anda maka secara sah Anda sudah memenuhi syarat dan lagi Anda sudah otomatis menerima tunjangan sebagaimana disebutkan dalam

lajur enam.

Begini Rukunnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata rukun sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi apa rukun pekerjaan kita ? Akan banyak pendapat tentang hal ini tapi setidaknya rukun yang paling utama adalah kita bekerja, tidak berpangku tangan. Termasuk di dalamnya adalah pura-pura sibuk tetapi tidak ada hasil nyata. Kadang berjam-jam waktu habis untuk sebuah rapat yang bertele-tele, tetapi hasilnya tidak ditindak lanjuti atau tidak menghasilkan kerja nyata.

Dari sudut pandang manajemen. Pekerjaan yang baik harus dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Perencanaan dilakukan pada awal tahun, untuk hal ini Kementerian Keuangan sudah menggunakan aplikasi *e-performance*. Paling tidak apa yang sudah ada dalam *e-performance* itulah yang menjadi rencana kerja satu tahun ke depan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan pekerjaan lain yang luput dari perencanaan tetapi muncul di tengah jalan. Tidak menjadi masalah jika bekerja kita laksanakan sebagai ibadah nyata.

Tahap pelaksanaan pada intinya ya bekerja titik. Tetapi sebagai organisasi yang besar agar ada kesamaan dan keseragaman dalam bekerja dan bekerja sama maka dibuatlah Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure: SOP*). SOP akan dalam banyak hal akan memudahkan tetapi bisa juga menyulitkan yaitu ketika terdapat suatu pekerjaan yang belum ada SOP-nya. Hal ini sering memunculkan polemik, siapa yang harus mengerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kembali awal jika bekerja dinilai sebagai ibadah nyata maka SOP harus dinilai sebagai alat bantu bukan pelaku utama. Ada atau tidak ada pekerjaan tetap harus dilaksanakan. Menenggok perjalanan sejarah organisasi kita, baru dekade akhir-akhir ini saja adanya SOP. Artinya berpuluh tahun lampau tidak ada SOP dan organisasi ini bekerja dengan baik. Jika saat ini muncul masalah karena

tidak adanya SOP artinya kita berjalan mundur jauh ke belakang. Mungkin saja memang tidak ada niat untuk beribadah nyata.

Jika tidak ada SOP maka manajemen kantor berlaku seperti dulu ketika belum dibuat SOP. Atasan sebagai pimpinan harus bisa mengerakkan bawahannya menyelesaikan pekerjaan tersebut, tanpa SOP. Kita harus sepakat tanpa SOP pekerjaan yang menjadi tugas kita tetap harus dilaksanakan. Bagi seorang muslim dapatlah digambarkan bagaimana kita harus beribadah dengan segala keterbatasan, misalnya sholat. Syarat mendirikan sholat adalah bersuci dengan wudlu, galipnya wudlu itu dengan air tetapi jika tidak tersedia air bolehlah bertayamum dengan debu. Lazimnya sholat itu berdiri, ruku', dan sujud. Tapi bagi yang tidak mampu berdiri boleh duduk, yang tak mampu duduk boleh berbaring. Bahkan bagi yang hanya mampu berbaring tapi tak kuasa mengerakkan tangan cukuplah dengan isyarat.

Jika ajaran itu kita kongkritkan dalam melaksanakan pekerjaan, tidaklah elok beralasan menunda pekerjaan dengan alasan tidak adanya SOP. Sebenarnya kendala melaksanakan pekerjaan bukan hanya masalah tidak adanya SOP, masih banyak kendala yang sering kita keluhkan. Mulai dari sarana maupun prasarana, sarana, dukungan atasan, bahkan semua hal bisa kita jadikan alasan jika tidak ada kehendak untuk melaksanakannya.

Kembali ke cerita Kakek penunggu surau dan Haji Sholeh yang harus masuk neraka. Mereka berdua taat menjalankan ibadah ritual tetapi lupa menjalankan ibadah nyata yaitu bekerja, harus menjadi cermin bagi kita untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah kita seperti itu? Atau kita termasuk yang lebih parah, tidak beribadah ritual maupun ibadah nyata. Harapannya tentu saja kita adalah orang yang menjalankan ibadah ritual maupun ibadah nyata.

Jika kita rasakan, bekerja sebagai rutinitas dan bekerja sebagai ibadah secara fisik tidaklah berbeda. Seorang Widyaiswara yang harus mengajar se-

lama 8 jamlat maka persiapan membuat bahan ajar, bahan tayang, maupun saat tatap muka di kelas sama saja. Hanya saja jika pekerjaan itu hanya demi melaksanakan surat tugas maka ia akan mendapatkan angka kredit dan gaji. Tetapi jika hal tersebut diniatkan juga sebagai ibadah maka ia akan mendapatkan pahala dan tidak mengurangi angka kredit dan gaji yang diterima. Yang membedakan keduanya adalah bagaimana niatnya, jika kita meniatkan pekerjaan rutin kita sebagai ibadah maka kita akan mendapatkan imbalan dunia maupun akherat. Mudah bukan?

Tahap yang terakhir

Memang beribadah ritual tidak mengeluarkan peluh, tidak juga membanting tulang. Tapi itulah yang menyebabkan surau itu roboh ditinggal bunuh diri penjaganya.

adalah evaluasi. Di depan kelas saya sering berkata bahwa sayalah pria paling tampan yang berdiri di kelas ini. Tentu saja banyak peserta yang tidak setuju. Tapi fakta membuktikan sayalah satu-satunya pria yang sedang berdiri di kelas tersebut. Artinya sayalah pria yang paling tampan, walaupun bisa juga yang paling jelek. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu tanpa ada ukuran atau pembandingnya. Misalnya dalam kasus pria paling tampan tersebut kemudian ada lima pria yang ikut berdiri maka akan ada pria paling tampan nomor satu, dua dan seterusnya. Demikian juga

dengan pekerjaan kita tidak bisa dinilai jika kita bekerja mengalir begitu saja tanpa rencana. Rencanalah ukuran kinerja kita untuk bisa dikatakan berhasil baik, sangat baik, atau jelek. Berdasarkan hasil tersebut kita akan dinilai di akhir tahun.

Inilah yang saat ini diamini oleh manajemen moderen dengan sebutan IKU. Sebagai sebuah standar apakah kinerja yang dilakukan dapat dikatakan berhasil atau tidak (Merah, Kuning atau Hijau). Dalam terminologi ibadah memang ada orang yang beribadah sebatas sebuah ritual rutinitas, namun ada juga yang lebih hakiki yaitu pada kualitas dari peribadatan tersebut. Bekerja juga demikian, apakah hanya sekedar untuk *get to excellent performance*. Setiap bekerja adalah beribadah, ibadah itu untuk Tuhan, maka sudah sepatutnya setiap pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Tidak sekedar untuk IKU.

Begini Harusnya

Tahun 1956 AA Navis sudah mengingatkan kita dalam cerpennya bahwa surau kita bisa roboh karena penunggunya hanya rajin beribadah ritual tetapi melupakan ibadah nyata yaitu bekerja (kesholehan sosial). Seharusnya kita bekerja merupakan wujud dari ibadah juga jadi harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jika itu sudah menjadi niat dan tekat kita maka segala kendala tidak akan menyurutkan langkah kita. Agar pekerjaan kita baik paling tidak harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Memang beribadah ritual tidak mengeluarkan peluh, tidak juga membanting tulang. Tapi itulah yang menyebabkan surau itu roboh ditinggal bunuh diri penjaganya. Hal itu jugalah disinyalir sebagai robohnya Indonesia yang kaya raya tapi masih banyak kemiskinan. Kita tidak beribadah hingga bercucuran peluh. Ada satu hal yang bisa kita kerjakan yaitu beribadah nyata dengan bekerja keras, agar tidak roboh kantor kita.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak

HIGHLY EFFECTIVE TRAINING

OLEH : GATHOT SUBROTO



Sebagai lembaga yang menyelenggarakan diklat di lingkungan Kementerian Keuangan, BPPK dituntut dapat menyelenggarakan diklat yang baik. Ukuran baik disini bisa beragam, bergantung pada sudut pandangnya. Dari sisi penyelenggaraan jika diklat itu selesai sesuai rencana, dari sisi Widyaiswara jika materi yang disampaikan diterima peserta, sedangkan dari sisi peserta jika ia mendapat ilmu yang bisa diamalkan setelah selesai diklat. Itu ukuran standarnya, kita bisa meningkatkannya lagi selain baik juga harus efektif. Efektif artinya ada akibatnya, ada dampaknya, atau dapat membawa hasil. Dengan demikian ukuran diklat tidak berhenti pada telah selesainya diklat tapi ada dampaknya tidak setelah mengikuti diklat.

Untuk menuju tujuan tersebut Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan *Short Term Training-PHRDP III JICA* dengan tema *Highly Effective Training* yang diadakan tiga angkatan selama tahun 2012. Pesertanya Widyaiswara dan pejabat struktural di lingkungan BPPK.

Highly Effective Training diadakan karena diklat ini merupakan penerapan NLP untuk para *trainer*. NLP adalah singkatan dari *Neuro Linguistic Programming*, *Neuro* adalah cara berpikir atau cara mengambil informasi dari luar, *Linguistic* adalah bahasa, *Programming* adalah berbagai program atau strategi kita dalam berpikir dan berperilaku. NLP bisa

diterapkan dalam berbagai segi kehidupan, termasuk juga dalam diklat.

Highly Effective Training diampu oleh Hingdranata Nikolay, CEO and *Master Trainer of Inspirasi Indonesia*. Banyak pelajaran yang bisa dipetik peserta. Salah satunya bagi para Widyaiswara adalah empat

elemen sukses *trainer* yaitu sukses seorang *trainer* adalah tanggung jawabnya sendiri, dari pemikiran, perkataan, dan tindakannya; Selalu berorientasi selalu pada target yang jelas di setiap programnya; mempunyai fleksibilitas dalam pemikiran dan tindakannya; dan membangun dan menjaga hubungan atas dasar kepercayaan (*trust*) dan manfaat dengan pihak yang terlibat dalam programnya.

Kata Mereka

Taufik Cahyo Sudrajat Widyaiswara dari Pusdiklat KNPB sangat terkesan dengan kiranya *Highly Effective Training*. Dihubungi melalui telepon ia bersyukur ikut dipanggil. Hal yang paling berkesan adalah semua materi disampaikan dengan menyenangkan dan langsung dipraktikkan. Dampaknya ilmu yang didapat melekat dalam jangka panjang. Terdapat enam metode untuk meningkatkan daya pengaruh selama mengajar yaitu cerita, *quotation*, analogi, *anchor*, *framing/reframing*, dan *nested looping*. Tapi bagi Widyaiswara paling muda yang dimiliki BPPK ini metode yang paling sering dilakukan adalah analogi, *anchor*, dan *nested looping*.

Nested looping bisa digambarkan seperti kita sedang menyaksikan sebuah tanyangan sinetron di televisi. Pada saat menegangkan tiba-tiba muncul tulisan bersambung. Maka keesokan harinya kita

sudah tidak sabar untuk mengetahui apa kelanjutan dari cerita tersebut. Metode ini sangat menarik diterapkan dalam diklat, hari berikutnya peserta sudah penasaran untuk mengetahui kelanjutan pelajaran sebelumnya.

Selain itu Topix –nama kerennya– mengatakan bahwa selama diklat dapat memperoleh tambahan ilmu tidak hanya dari *trainer* tetapi dari sesama peserta diklat. Memang masing-masing peserta harus unjuk kebolehan menerapkan ilmu yang diajarkan pada saat itu juga. Hal ini rupanya memicu kreatifitas yang tidak terduga, sehingga kita bisa saling belajar satu dengan lainnya. Ibarat logam yang saling mengesek maka keduanya akan sama-sama tajam.

Sebuah kejutan terjadi dalam diklat tersebut, ketika semua peserta harus mempraktekkan ilmu yang baru saja dipelajari. Ichsan Nafarin Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai tampil memukau saat perkenalan karena memakai topeng separo wajah bagaikan Bang Napi di acara sebuah stasiun televisi.

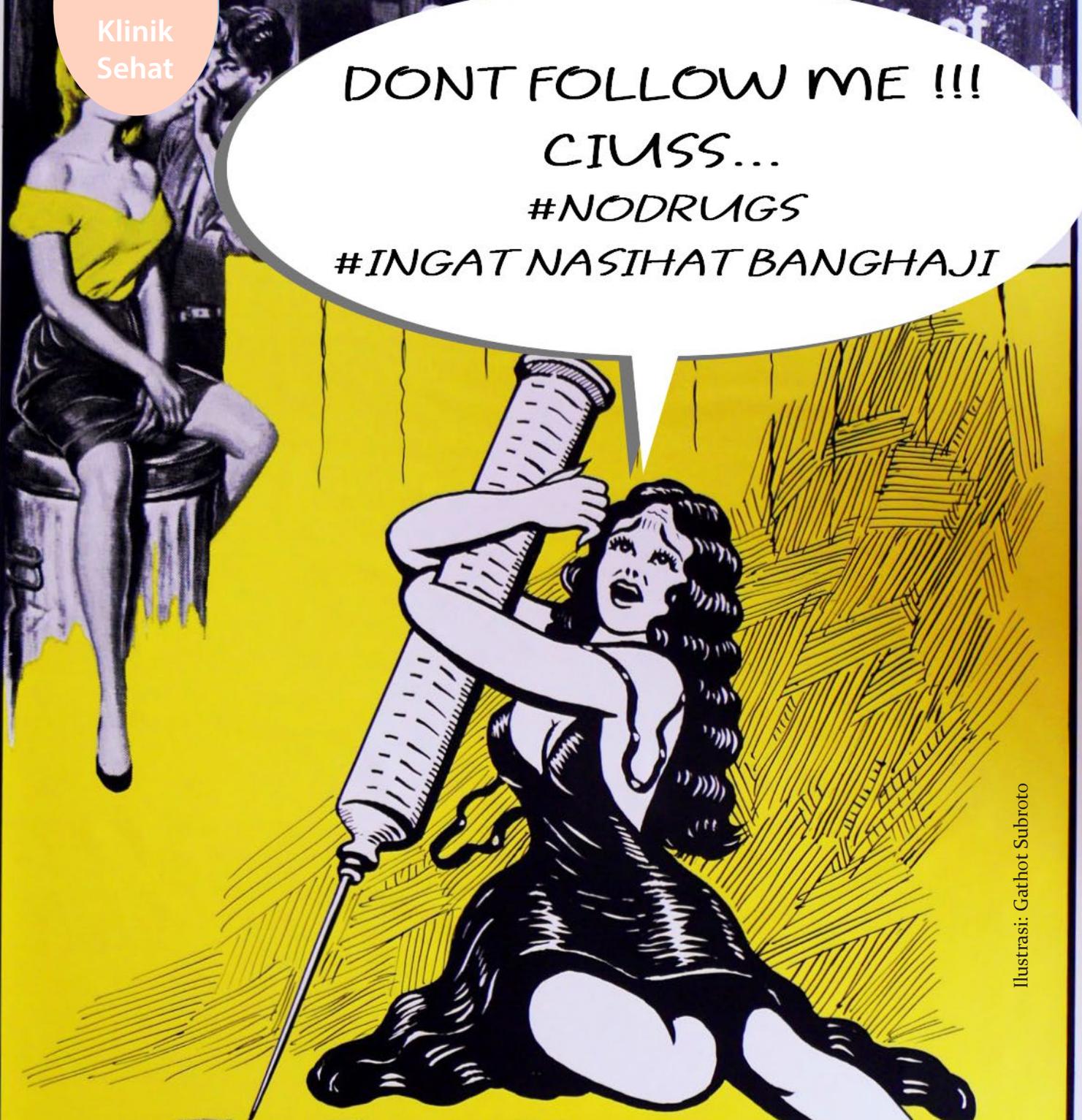
Pada keduanya ketika ditanya apakah menerapkan semua ilmu yang didapat? Memang tidak semua, mungkin belum tapi keduanya mengakui banyak ide dan terobosan untuk membuat diklat menjadi lebih menyenangkan. Hati yang senang akan menerima materi dengan mudah dan peserta akan terkesan pada diklat yang diikuti.

Beda dengan teman-teman di Pusdiklat Pajak. Melihat penampilan Hingdranata Nikolay yang cukup bergaya dengan kursi bar-nya, tidak lama setelah itu setiap kelas di Pusdiklat Pajak juga disiapkan kursi bar. Setiap Widyaiswara juga dipesankan masing-masing satu blazer untuk mengajar. Profesionalisme bukan hanya mengenai mengerjakan sesuatu dimana kita terbaik di situ, tetapi menjadi terbaik di sesuatu yang kita kerjakan (Hingdranata Nikolay).

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak

Klinik
Sehat

DONT FOLLOW ME !!!
CIUSS...
#NODRUGS
#INGAT NASIHAT BANGHAJI



Ilustrasi: Gathot Subroto

OLEH: dr. EDUARD TAMBUNAN

Waspada Narkoba!

Pendahuluan

Sudah saatnya kita meningkatkan kewaspadaan menghadapi zat narkotika. Akibat buruknya sudah banyak kita ketahui. Korban banyak berjatuh mulai pelajar, mahasiswa, selebritis, pegawai, aparat dan lainnya. Hal ini karena terjadinya perubahan gaya hidup, globalisasi, industrialisasi dengan disertai cepatnya arus informasi dan perpindahan penduduk. Mudahnya menyembunyikan zat narkotika serta kecanggihan pemasok diperkirakan sebagai penyebab peningkatan penyalahgunaan zat. Diperkirakan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dengan perkiraan terdapat sekitar 7% dari penduduk Jakarta sebagai pengguna. Efek langsung dari penyalahgunaan narkotika yang menggunakan alat secara bersama yang mengakibatkan penularan penyakit HIV atau AIDS, penyakit hepatitis dan juga penyakit kelamin. Indonesia yang dahulu hanya sebagai tempat transit sekarang sudah menjadi pasar mafia narkotika.

Proses tingkat ketergantungan narkotika

Tidak semua orang yang baru mencoba mengonsumsi narkotika menjadi ketergantungan. Ketergantungan zat adiktif pada umumnya disebabkan oleh adanya interaksi beberapa faktor termasuk sifat farmakologi (ilmu yang berhubungan dengan obat-obatan-red) zat itu sendiri, faktor individu dan lingkungan. Bila pada tahap coba-coba yang diperoleh adalah kenikmatan narkotika, maka narkotika selanjutnya dipakai untuk bersenang-senang (tahap pemakaian sosial). Peningkatan berikutnya adalah pemakaian situasional misalnya narkotika dipakai untuk mengatasi stress, depresi atau agar lebih percaya diri. Namun bila mana terus menerus mengonsumsi narkotika minimal selama 1 (satu) bulan atau disertai gangguan fungsi sosial, dapat dikatakan sudah menyalahgunakan narkotika (*abuse*). Terakhir, tingkat ketergantungan (*addiction*) yang ditandai dengan adanya toleransi (peningkatan dosis untuk mendapat efek yang sama) serta timbul gejala putus zat (rasa nyeri atau gejala lainnya akibat dihentikannya perngkonsumsian narkotika. Sumber: BNN) bila

pemakaian dihentikan atau dikurangi dosisnya. Bahkan ada yang tidak mampu menahan dorongan kuat/sugesti untuk selalu memakai narkotika walaupun disadari bahaya akan mengancam nyawanya sendiri (kompulsif). Pada tahap ini pengguna berusaha untuk mendapatkan narkotika dengan cara apapun.

Ciri-ciri individu penyalahguna narkotika

- Rasa ingin tahu yang kuat dan ingin mencoba
- Tidak bersikap tegas terhadap tawaran/pengaruh teman sebaya
- Penilaian diri yang negatif
- Rasa kurang percaya diri dalam menghadapi tugas
- Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya berlebihan
- Cepat menjadi bosan dan merasa tertekan, murung dan merasa tidak sanggup berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari
- Hambatan atau penyimpangan psikoseksual dengan akibat kegagalan atau tidak terjadinya identifikasi seksual yang memadai
- Prestasi belajar atau kerja yang menurun
- Cenderung memiliki gangguan jiwa, seperti kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dari pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stress atau sebaliknya yaitu hiperaktif
- Cenderung mengabaikan peraturan-peraturan
- Tidur larut malam (begadang)
- Kurang suka berolah raga
- Cenderung makan berlebihan
- Suka melancarkan protes sosial
- Mempunyai persepsi bahwa hubungan dalam keluarga kurang dekat, walaupun seringkali kenyataannya tidak demikian
- Adanya anggota keluarga lain yang tergolong peminum alkohol yang berat atau memakai obat secara berlebihan
- Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau memakai obat secara berlebihan
- Sudah mulai merokok pada usia

yang lebih dini daripada rata-rata perokok lainnya

- Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religius.
- Gejala dini pada penyalahguna narkotika
- Prestasi di sekolah secara tiba-tiba menurun mencolok
 - Pola tidurnya berubah: pagi susah dibangunkan, malam suka begadang
 - Selera makan kurang
 - Banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan bahwa ia menggunakan obat. Banyak mengurung diri di kamar dan menolak diajak makan bersama-sama anggota keluarga lainnya
 - Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainya dibandingkan sebelumnya
 - Sekali-sekali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara pelo dan jalan sempoyongan
 - Mungkin didapatkan luka bekas suntikan pada tubuhnya (*Needle track sign*)
 - Malas mandi, dan berganti pakaian

Pencegahan

Melihat banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dibanding manfaat, terutama saat henti obat, sebaiknya tidak pernah menyentuh atau menyalahgunakan zat-zat tersebut diatas. Perlu kerjasama dalam penanggulangan dengan melibatkan orang tua, guru dan tokoh agama dan peran serta masyarakat mencegah agar anak, pemuda dan orang yang berpotensi agar tidak menggunakan narkotika.

Melakukan pemeriksaan urine untuk kasus tertentu, di sekolah, kantor, tempat hiburan dan lain-lain. Pada yang sudah menggunakan obat dilakukan pengobatan dan ajakan untuk menghentikan kebiasaan mengonsumsi obat.

Bagi yang sudah memasuki tahap kecanduan dilakukan rehabilitasi dan pengobatan dibawah pengawasan dokter sesuai dengan undang-undang no 35 th 2009 tentang narkotika.

Say no to drug

Heroin, morfin

Opium atau candu, ekstrak tanaman *papaver somniferum* (poppy) telah dikenal sejak 3500 tahun yang lalu. Opium memiliki sifat narkotik, yang berarti mematikan rasa analgesik, sedatif dan depresan umum, serta diketahui mengandung lebih dari 20 jenis alkaloid. Salah satu diantara alkaloid itu, mempunyai efek yang dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi penderitaan diberi nama morfin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani Morpheus. Narkotika merupakan zat psikoaktif atau adiktif yang bekerja secara selektif melalui reseptor opioid. Heroin merupakan opium yang paling sering disalahgunakan dan lebih poten (kuat) dan larut di dalam lemak dibanding morfin. Karena sifat ini, heroin lebih cepat melalui sawar darah otak dan bekerja lebih cepat dari morfin. Heroin biasanya disuntikkan, disedot, dihisap atau dirokok. Suntik langsung ke pembuluh darah, suntikan intravena, memberikan intensitas serta cepatnya bermula rasa euforia.

Ekstasi

Ekstasi dikemas dalam bentuk tablet dikonsumsi melalui mulut atau dalam bentuk bubuk dikonsumsi melalui hisapan melalui hidung atau dengan rokok. Bekerja di otak dengan meningkatkan aktifitas sekurang-kurangnya tiga macam neurotransmitter, yaitu serotonin, dopamine dan norepinephrine. Ketika terjadi penggunaan ekstasi neurotransmitter ini dilepas dari tempat simpanannya di sel neuron, terutama memicu serotonin sehingga meningkatkan aktifitas otak yang mengatur suasana hati, tidur, rasa nyeri, emosi dan nafsu makan. Ekstasi mempunyai efek yang kuat pada sistem kardiovaskular dan kemampuan tubuh mengatur suhu badan, sehingga pada pemakai aktifitas fisik dapat meningkat, tetapi bila tidak dibarengi dengan penyesuaian kegiatan jantung dapat menyebabkan cedera jantung atau komplikasi kardiovaskular lainnya. Pada pengguna yang mengalami henti obat sering ditemukan mengalami depresi, ansietas, serangan panik, gangguan tidur (insomnia), depersonalisasi, derealisasi, mengalami paranoid. Dan bila ditemukan over dosis ditandai dengan irama jantung menjadi cepat, tekanan darah meningkat, rasa lemah, otot kram dan serangan panik.

Kokain

Efek kokain pada penggunaannya ialah segera dan sangat menyenangkan dan berlangsung singkat (30 – 60 menit), dikonsumsi dengan melalui oral, intranasal, intravena atau melalui inhalasi. Kokain menimbulkan rasa euforia yang intens, kuat dan singkat dan penggunaannya merasa energik. Seperti halnya kopi, kokain membuat orang merasa tidak mengantuk dan mengurangi rasa lapar. Efek psikologi kokain mencakup rasa hebat, berkekuatan dan merasa meningkat kemampuan, bercampur dengan rasa cemas dan gelisah. Kokain merupakan zat adiktif dengan ketergantungan yang kuat. Karena sifatnya yang kuat untuk mencandu, ketergantungan psikologis sudah dapat terjadi setelah menggunakan satu kali. Sehingga pengguna akan melakukan apa saja, mencuri dan lain sebagainya untuk dapat memperoleh kokain. Upaya penghentian penggunaan akan menimbulkan depresi yang hebat sehingga pengguna terpaksa mengonsumsi lebih banyak kokain untuk mengatasi depresi ini. Bila dipaksa dihentikan (intoksikasi) akan muncul gejala disforik, ansietas, iritabilitas, fatigue, dan hipersomnolen.

Mariyuana, ganja

Mariyuana merupakan obat terlarang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Berasal dari tumbuhan *canabis sativa*, yang telah dikenal di Asia dan Cina sekitar 4000 tahun yang silam. Benda ini biasanya digunakan dengan cara dirokok seperti sigaret atau dalam cangklong (pipa), juga diseduh sebagai teh atau digunakan sebagai penyedap dalam makanan, sehingga zat yang paling aktif pada mariyuana yaitu THC (delta 9 tetrahydrocannabinol) dapat cepat melalui paru-paru ke aliran darah, yang membawa zat ini ke organ-organ tubuh termasuk otak. Efek yang terjadi di otak adalah mempengaruhi reseptor cannabinoid yang mempunyai efek rasa senang, memori, pikiran, konsentrasi, persepsi sensorik dan waktu, serta gerak terkoordinasi. Pada penggunaan jangka panjang mariyuana menyebabkan perubahan di otak pada tempat yang banyak mengandung reseptor cannabinoi, paling tinggi di ganglia basal, *hipokampus* dan *cerebellum*. Gejala henti obat yang ditemukan gelisah, insomnia dan anoreksia, dan mual (mual) ringan. Ini semua ditemukan pada pengguna mariyuana dosis tinggi. Pada asap mariyuana juga didapatkan 50–70 % lebih banyak *hydrocarbon carcinogenic* dibanding tembakau, sehingga kemungkinan mendapatkan kanker paru dan leher lebih tinggi dibandingkan tembakau.



Sumber: www.techwench.com

TELPON GRATIS, PAKE VOIP aja..

OLEH: SUHARYADI & M. ICHSAN

Sejarah VOIP

Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Teknologi ini mengubah suara menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan data, bukan melalui sirkuit analog telepon biasa.

Sejarah Perkembangan VoIP berawal dari penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Selanjutnya, pada tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) berhasil memperkenalkan jaringan internet, di mana komputer satu dengan yang lain dapat berkomunikasi melalui jaringan telepon. Pada tahun 1973, para pendiri ARPANET berhasil mengirimkan sinyal suara melalui jaringan internet yang merupakan awal pengenalan teknologi VoIP.

Teknologi VoIP mulai berkembang meluas sekitar tahun 1995. Pada awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanyalah eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Eksperimen ini dimulai oleh perusahaan Vocaltech dan diikuti oleh Microsoft dengan program Netmeeting-nya. Pada saat itu jaringan komputer internet masih sangat lambat, sehingga pemakaiannya sangat terbatas



Sumber: talk.vmobile.eu

3CX



Sumber: www.freenew.net

pada pusat penelitian yang memiliki bandwidth besar.

Sistem koneksi VoIP mengalami perkembangan. Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP. Jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan dengan Privat Automated Branch exchange (PABX) atau jaringan analog telepon biasa. Jadi, komunikasi antara komputer dengan pesawat telepon (extension) di kantor bisa dilakukan. Bentuk komunikasi tidak hanya suara saja, melainkan dapat berbentuk tulisan (chatting) atau jika jaringannya cukup besar bisa digunakan untuk Video Conference. Dalam bentuk yang lebih lanjut komunikasi ini lebih dikenal dengan IP Telephony yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan bentuk komunikasi suara (VoIP).

Protokol VoIP

Voice over IP telah diimplementasikan dalam berbagai macam jalan menggunakan protocol berbayar (proprietary) dan open standard atau bebas. Contoh protokol jaringan yang digunakan untuk mengimplementasikan VoIP meliputi:

- H.323
- Media Gateway Control Protocol (MGCP)
- Session Initiation Protocol (SIP)
- Real-time Transport Protocol (RTP)
- Session Description Protocol (SDP)
- Inter-Asterisk eXchange (IAX)

Protokol H.323 adalah salah satu dari Protokol VoIP yang penerapannya ditemukan secara luas untuk lalu lintas jarak jauh, seperti layanan Local Area Network (LAN). Namun, dengan ditemukannya protokol baru seperti MGCP dan SIP, penyebaran H.323 semakin terbatas. Secara khusus, Session Initiation Protocol (SIP) telah mendapatkan penetrasi pasar luas VoIP.

SIP adalah protokol open standard yang dipublikasikan oleh IETF, RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sesi ko-

munikasi data media lain seperti video dan text. Disebutkan sebagai negosiasi sesi komunikasi, karena SIP merupakan signalling protocol, bukan media transfer protocol. Artinya SIP tidak menghantar data media (voice, video dan text), melainkan hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi saja dan memanfaatkan protokol lain seperti RTP sebagai media transfer protokol.

Pemanfaatan VoIP

Pemanfaatan paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan LAN seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Syaratnya, komputer yang terhubung tersebut mempunyai kartu suara yang dihubungkan dengan speaker dan mikropon. Dengan dukungan perangkat lunak khusus, kedua pemakai komputer dapat saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain.

Perkembangan berikutnya adalah penggabungan jaringan PABX dengan jaringan VoIP. Disini dibutuhkan VoIP gateway. Gambarannya adalah lawan bicara menggunakan komputer untuk menghubungi sebuah office yang mempunyai VoIP gateway. Pengembangan lebih jauh dari konfigurasi ini berbentuk penggabungan PABX antara dua lokasi dengan menggunakan jaringan VoIP. Apapun bentuk jaringan selama memakai protokol TCP/IP maka kedua lokasi dapat saling berhubungan. Yang paling kompleks adalah bentuk jaringan yang menggunakan semua kemungkinan yang ada dengan berbagai macam bentuk jaringan yang tersedia seperti tampak pada gambar berikut:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, saat ini telah memanfaatkan teknologi VoIP sebagai salah satu media komunikasinya. Pemanfaatan teknologi VoIP tak lepas dari tersedianya infrastruktur teknologi informasi di semua unit kerja baik pusat maupun daerah. Infrastruktur ini berupa jaringan intranet yang menghubungkan semua unit kerja

dengan kapasitas bandwidth yang besar. Saat ini, teknologi VoIP dimanfaatkan sebagai alat komunikasi agent call center BPPK, komunikasi acara live streaming antara teknisi di lokasi acara dengan teknisi server pusat dan komunikasi antar pegawai pada umumnya.

VoIP BPPK ini utamanya dimanfaatkan pada jaringan intranet atau WAN Kementerian Keuangan. Namun demikian, VoIP BPPK dapat digunakan juga dari jaringan internet. Ini didukung dengan adanya jembatan penghubung antara internet dengan intranet (WAN Kemenkeu) yaitu Virtual Private Network (VPN) client. Model pemanfaatan VoIP bersamaan dengan VPN client tampak pada gambar berikut:

Pada dasarnya masing-masing pengguna VoIP terhubung ke server VoIP BPPK baik melalui jaringan secara langsung menggunakan jaringan intranet maupun tidak langsung menggunakan internet melalui media VPN client. Bagi pengguna VoIP yang berada di luar area intranet, dapat menggunakan akun internet Kementerian Keuangan untuk masuk ke jaringan intranet melalui VPN client yang tersedia pada device-nya. Adanya VPN ini, memungkinkan untuk terus dapat berkomunikasi sepanjang terhubung jaringan internet maupun intranet tidak terbatas di lokasi kerja saja.

Pemanfaatan VoIP di BPPK semakin meluas dengan kompatibilitas perangkat yang semakin baik. VoIP BPPK telah mendukung penggunaan berbagai jenis dan tipe perangkat klien seperti personal komputer, laptop, smartphone, iphone, IP telephony, ipad dan sebagainya. Pada sisi klien, aplikasi VoIP yang dapat digunakan beragam tergantung dari jenis dan tipe perangkat yang digunakan. Aplikasi yang tersedia untuk klien diantaranya X-lite, 3CX, VMobile dan Bria. Beberapa aplikasi ini tersedia bebas atau free, sehingga dapat digunakan tanpa perlu merogoh kocek.

Keunggulan VOIP

Keunggulan teknologi VoIP bila dibandingkan dengan telepon PSTN yang paling menonjol adalah faktor biaya



yang murah. Apalagi untuk organisasi yang besar dan letak geografis kantor yang tersebar antar daerah atau pulau dengan terhubung oleh jaringan intranet ataupun internet. Semakin besar organisasi dengan cabang-cabang di daerah yang telah terhubung dalam jaringan internet ataupun intranet akan terasa besar manfaatnya, terutama untuk menghemat biaya komunikasi antar cabang atau lokasi.



Sumber: <http://www.counterpath.net>

Masih ada keuntungan lain yang dapat dirasakan, diantaranya adalah:

- Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Infrastruktur jaringan data seperti LAN, Wide Area Network (WAN) dan internet selain untuk jaringan VoIP dapat dibangun pada jaringan data yang ada dengan menambahkan beberapa perangkat keras ataupun lunak pendukung. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara.
- Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Kemajuan teknologi sekarang ini memungkinkan penggunaan bandwidth yang sangat kecil untuk voice. Teknik pemampatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan bandwidth sekitar 8kbps.
- Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah

ada. Dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa.

- Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP Rakyat.
 - Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa, IP phone handset, laptop, smartphone, dan sebagainya.

Kelemahan dari VoIP

Terlepas dari keunggulan VoIP yang telah diungkap sebelumnya, VoIP juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah:

- Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Ini merupakan efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional.

Namun jika koneksi internet menggunakan bandwidth besar maka kualitas suara akan jernih dan tidak terputus-putus.

- Ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara atau sebaliknya dan jeda jaringan mengakibatkan adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP. Kondisi ini tidak terasa jika menggunakan bandwidth yang besar.
- Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet perlu janji untuk saling berhubungan.
- Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT (Network Address Translation), maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan.
- Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet.
- Peralatan relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX (IP telephony gateway) relatif berharga mahal. Diharapkan dengan makin populernya VoIP ini maka harga peralatan tersebut juga mulai turun harganya.
- Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Perlu dilakukan pengaturan bandwidth agar jaringan di perusahaan tidak menjadi jenuh akibat pemakaian VoIP.

Kesimpulan

Dengan segala potensi yang ada, terutama sekali faktor biaya, VoIP sangat berpotensi dikembangkan sebagai media komunikasi antar pegawai di lingkungan BPPK. Dari sisi infrastruktur, semua unit kerja telah tergabung dalam satu kesatuan Wide Area Network Kementerian Keuangan atau intranet. Dari sisi kapasitas bandwidth, telah mencukupi untuk kebutuhan VoIP semua unit kerja baik pusat maupun daerah. Ini merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan lebih baik lagi. Kedepannya, VoIP diharapkan dapat menekan biaya komunikasi telepon kantor.

*Suharyadi adalah Pelaksana Pada Bagian TIK Sekretariat BPPK

*M. Ichsan adalah Pranata Komputer Pada Sekretariat BPPK

Maret-April 2013

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Diklat Prajabatan Gol. II Periode II	18 Maret - 5 April 2013
Diklat Prajabatan Gol. II Periode III	8 April - 26 April 2013
Diklat Prajabatan Gol. II Periode IV	29 April - 17 Mei 2013
Ujian Dinas Tingkat I Periode I	1 April - 12 April 2013

PUSDIKLAT PAJAK

Diklat KUP Dasar	4 - 8 Maret 2013
TOT Perpajakan II	4 - 6 Maret 2013
Diklat Penyegaran Juru Sita Angk. II	4 - 8 Maret 2013
Diklat Penyegaran Juru Sita Angk. III	18 - 22 Maret 2013
Diklat Penyegaran Juru Sita Angk. IV	15 - 19 April 2013
Diklat Penyegaran Juru Sita Angk. V	22 - 26 April 2013
DTSS Juru Sita Pajak Angk. I	1 - 12 April 2013
DF Pemeriksa + DTSS AR Dasar Angk. I	11- 22 Maret 2013
DF Pemeriksa + DTSS AR Dasar Angk. II	8 - 19 April 2013
DF Pemeriksa + DTSS AR Dasar Angk. III	22 April - 3 Mei 2013
DTSS Ekstensifikasi	1 - 5 April 2013

PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Angk. IV	4 - 8 Maret 2013
Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Angk. V	4 - 8 Maret 2013
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (mengulang) Angk. I	6 - 8 Maret 2013
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (mengulang) Angk. II	6 - 8 Maret 2013
Diklat Dasar Tingkat III Perbendaharaan	11 Maret - 2 April 2013
DTSS Intermediate Training for Budget Official (DJA) Angk. I	18 - 22 Maret 2013
DTSS Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Angk. I	18 - 22 Maret 2013
ToT PBJ Tingkat Dasar Angk. II	18 - 22 Maret 2013
ToT PBJ Tingkat Menengah I	1 - 5 April 2013
ToT PBJ Tingkat Menengah II	22 - 26 April 2013
DTSS Kuasa Pengguna Anggaran Angk. II	25 - 30 Maret 2013
DTSS Kuasa Pengguna Anggaran Angk. III	1 - 5 April 2013
DTSS Pejabat Pembuat Komitmen Angk. I	1 - 5 April 2013
DTSS Bendahara Pengeluaran Angk. II	1 - 16 April 2013
DTSS Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Angk. I	1 - 12 April 2013
ToT Government Financial Statistics (GFS)	3 - 5 April 2013
DTSS Budget Analyst Training Angk. I	8 - 19 April 2013
DTSS Budget Analyst Training Angk. II	8 - 19 April 2013
DTSS Budget Analyst Training Angk. III	29 April - 11 Mei 2013
DTSS Kapita Selektta Anggaran Perbendaharaan ANgk. I	15 - 19 April 2013
DTSS Verifikasi & Rekonsialisasi LPJ Bendahara (Staf KPPN) Angk. I	15 - 17 April 2013
DTSS Pengenalan Penyusunan APBN Angk. I	17 - 19 April 2013
DTSS Bendahara Penerimaan Angk. I	22 - 26 April 2013
DTSS Penyusunan Kontrak PBJ	22 - 26 April 2013
Penyegaran Bendahara Penerimaan (DJKN) Angk. I	22 - 26 April 2013
DTSS Basic Training for Budget Official Angk. II	22 April - 3 Mei 2013
DTSS Pengendalian Keuangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Angk. I	29 April - 3 Mei 2013

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Penyegaran Standar Akuntansi Pemerintahan Angkatan I	5 - 8 Maret 2013
DTSS Analisis Perekonomian Daerah Tingkat Lanjutan	11 - 14 Maret 2013
Diklat Aset/Debitor Tracing	18 - 22 Maret 2013
DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Pemula	19 Mar - 5 Apr 2013
DTSS Penilaian Properti Dasar	19 Mar - 17 Apr 2013
Diklat Ilmu Kebijakan Publik	25 - 28 Maret 2013
DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan Bmn (Bagi Pengguna Barang)	1 - 5 April 2013
DTSS Pejabat Lelang Angkatan I	2 April - 3 Mei 2013
DTSS Pengetahuan Lelang (Bagi Pelaksana)	8 - 12 April 2013
DTSS Pengelolaan BMN (Bagi Pengelola)	16 - 30 April 2013
DTSS Penatausahaan BMN (untuk Pengguna Barang)	16 - 24 April 2013
Diklat Legal Due Diligent	22 - 25 April 2013
Penyegaran (SIMAK BMN) Bagi Pengguna	29 April - 3 Mei 2013

K
A
L
E
N
D
E
R

D I K L A T

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

Diklat Analisis Jabatan	25 - 28 Maret 2013
Diklat Competency Profiling	25 - 28 Maret 2013
Diklat Audit Tata Kelola TIK	18 - 22 Maret 2013
Diklat Business English	18 - 22 Maret 2013
Diklat Free Open Source Software	18 - 22 Maret 2013
Diklat Microsoft Excel - Tingkat Lanjutan	18 - 26 Maret 2013
Diklat Persiapan Purnabhakti	18 - 22 Maret 2013
Diklat Manajemen SDM - Tingkat Dasar	18 - 27 Maret 2013
Diklat Audit TIK - Tingkat Dasar	18 - 22 Maret 2013
Diklat Penyusunan Perjanjian/Kontrak Internasional	13 - 15 Maret 2013
Diklat Islamic Finance - Tingkat Dasar	13 - 15 Maret 2013
Diklat Analisis Keuangan dan Bisnis	13 - 15 Maret 2013
Diklat Kebijakan Publik	11 - 15 Maret 2013
Diklat Legal Drafting (BKF)	05 - 07 Maret 2013
Diklat Manajemen Risiko	04 - 08 Maret 2013
Diklat Manajemen Utang	04 - 11 Maret 2013
Diklat Microsoft Access - Tingkat Dasar	04 - 08 Maret 2013
Diklat Sekretaris Pimpinan	04 - 07 Maret 2013
Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer - Tingkat Dasar	04 - 08 Maret 2013
Diklat Teori Ekonomi Makro - Tingkat Lanjutan	16 - 19 April 2013
Diklat Business English	15 - 19 April 2013
Diklat Pemrograman Web Dasar	15 - 19 April 2013
Diklat Tata Naskah Dinas	15 - 19 April 2013
Diklat Teknik Cepat Pembuatan Risalah Banding & Bas	15 - 19 April 2013
Diklat Audit TIK - Tingkat Dasar	15 - 19 April 2013
Diklat Critical Thinking For Internal Auditor (ITJEN)	09 - 11 April 2013
Diklat Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS	08 - 12 April 2013
Diklat Evaluasi Pasca Diklat	08 - 12 April 2013
Diklat Financial Statistic: Minitab, Excel, E-Views	08 - 12 April 2013
Diklat Islamic Finance - Tingkat Menengah	17 - 19 April 2013
Diklat Akuntansi Keuangan Syariah	22 - 26 April 2013
Diklat IT Risk Management	22 - 25 April 2013
Diklat Teknik Intelijen - Tingkat Dasar (Itjen)	22 Apr - 03 Mei 2013
Diklat Toefl PBT Preparation	22 Apr - 13 Mei 2013
Diklat Training Need Analysis (Pegawai BPPK)	22 - 26 April 2013
Diklat Kebijakan Publik: Regulatory Impact Analysis	30 Apr - 03 Mei 2013
Diklat Manajemen SDM - Tingkat Dasar	29 Apr - 08 Mei 2013
Diklat Microsoft Word & Powerpoint - Tingkat Lanjutan	29 Apr - 07 Mei 2013
Diklat Pengelolaan Kinerja Organisasi	29 Apr - 03 Mei 2013

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Workshop Rules Of Origin	4 - 8 Maret 2013
DF Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angk. II	13 Mar - 12 Apr 2013
DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut	13 Mar - 3 Apr 2013
DTSD Kepabeanan dan Cukai Angk. II	18 Mar - 22 Mei 2013
DTU Kesamaptaan Angk. II	13 Mar - 17 Apr 2013
DTU Kesamaptaan Angk. III	22 April - 27 Mei 2013
Workshop Frontliner Indonesian Airport Customs Angk. II	8 - 12 April 2013
DTSS Intelijen Analisis Angk. I	8 - 19 April 2013
DTSS Layanan Informasi Angk. I	8 April - 2 Mei 2013
Workshop Perjanjian Internasional di Bid Kepabeanan Angk. II	15 - 19 April 2013
DTSS Jurusita Angk. I	15 April - 2 Mei 2013
DTSS Intelijen Taktis Angk. II	22 April - 3 Mei 2013
DTSS Audit Forensik	22 April - 3 Mei 2013

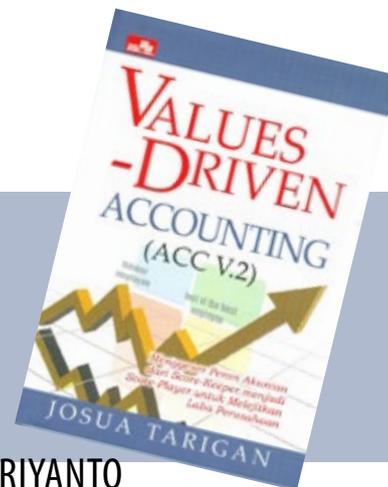
Keterangan

DTSD : Diklat Teknik Substantif Dasar
 DTSS : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi
 DTU : Diklat Teknik Umum
 DF : Diklat Fungsional

Info lebih lanjut hubungi

Call Center Halo BPPK 021-7264984
 atau klik www.bppk.depkeu.go.id

Judul Buku	: Values-Driven Accounting (Acc. V.2)
Sub Judul Buku	: Menggeser Peran Akuntan dari Score-Keeper menjadi Score-Player untuk Melejitkan Laba Perusahaan
Penulis / Alih Bahasa	: Josua Tarigan
Penerbit / Cetakan	: Elex Media Computindo/2010
Tebal	: xiv + 146 halaman
ISBN	: 978-979-27-7112-1



OLEH : RIYANTO

Values-Driven Accounting

Bagi organisasi, akuntansi telah lama dikenal menjadi kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Dalam konteks ini, akuntansi sering kali hanya berbicara mengenai ketaatan pada aturan atau compliance sehingga akuntan dikenal hanya sebagai scorekeeper. Konsep ini disebut akuntansi tradisional, yang oleh penulis disebut akuntansi v.1. Dalam kondisi perubahan lingkungan yang signifikan, sudah saatnya akuntan tidak hanya berperan sebagai scorekeeper, melainkan sebagai scoreplayer di tengah-tengah penentuan keputusan bisnis dan strategik organisasi. Seorang scoreplayer adalah seorang yang bukan hanya bertindak sebagai scorekeeper, tetapi juga sebagai scoremaker, yakni seseorang yang berperan dalam mencetak laba organisasi.

Peran scoreplayer dapat dilakukan dengan terlibat dalam peningkatan profitabilitas atau aspek lain yang dapat memberikan value kepada organisasi, inilah yang dimaksud dengan value-driven accounting atau akuntansi v.2. Pemikiran akuntansi v.2 akan menawarkan aspek berpikir akuntansi secara strategis, bukan hanya dari sisi teknis saja. Oleh karena itu, buku ini tidak menyajikan jurnal dan cara penyusunan laporan keuangan, buku ini lebih banyak memberikan ide strategis kepada akuntan agar dapat lebih terlibat dalam peran yang di-drive oleh value.

Bab satu akan diawali dengan pembahasan mengenai kisah compliance drivers (akuntansi v.1) dan value drivers (akuntansi v.2). Value drivers sangat penting karena dalam kondisi persaingan saat ini, organisasi bisnis tidak hanya dituntut untuk menjadi organisasi yang biasa-biasa saja, tetapi dituntut untuk berpikir dalam aspek value creation. Artinya bagaimana mendesain organisasi sehingga dapat menjadi value creation bagi

karyawan, pelanggan, dan pemegang saham.

Pada bab dua, pembaca akan diajak untuk kembali menengok kembali konsep akuntansi v.1, dimulai dari mengenali kondisi keuangan organisasi sampai cara penyusunan laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas). Semua laporan tersebut mengacu pada aspek compliance, yaitu taat kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah dalam hal pajak, maupun auditor. Dalam konteks ini, akuntansi dinamakan sebagai bahasa bisnis.

Bab tiga membahas tentang akuntansi sebagai bahasa strategik, yakni mengenai value creation. Value creation adalah sesuatu yang bersifat high level dan merupakan paradigma yang perlu dimiliki oleh manajemen tingkat atas. Persepsi dan fokus dalam akuntansi perlu digeser dari compliance driver menjadi value driver atau dari technical view menjadi strategic value. Dengan tidak mengurangi pentingnya akuntansi sebagai compliance driver, peranan akuntansi dapat di-leverage hingga menjadi agen yang berperan sebagai value creation.

Bab empat akan mulai membahas bagaimana akuntansi dapat memberikan value kepada organisasi. Value yang dibahas terfokus pada aspek profitabilitas. Jadi akuntan tidak hanya berpikir mengenai laba buku tetapi harus berpikir sampai pada laba pasar. Dalam hal inilah akuntan akan berperan sebagai scoremaker, dimana akuntan tidak hanya dituntut jago ilmu akuntansi saja tetapi juga paham tentang dunia marketing, SDM, teknologi informasi, dan manajemen strategi.

Bab lima membahas peran akuntan sebagai scoreplayer pada aspek performance. Keterlibatan akuntan sebagai scoreplayer dapat dilakukan dengan (a) menggeser fokus pada cost menjadi pada performance;

(b) menggeser konsep ABC (activity based costing) tradisional menjadi time-driven ABC; (c) menggeser paradigma technical cost menjadi level strategik dalam koridor strategic cost management, dan (d) menggeser fokus analisis manajemen ke arah pricing dibandingkan fokus pada cost.

Bab enam membahas peran akuntan sebagai scoreplayer dalam aspek quality, bukan hanya sebagai scorekeeper dalam aspek quality cost. Untuk dapat terlibat dalam aspek ini, akuntan mau tidak mau harus paham tentang quality cycle, CIP (continuous improvement program) dan konsep kualitas yang lain.

Dalam bab terakhir, penulis membahas mengenai mental akuntan sebagai scoreplayer atau value-driven accountant. Mental ini dipandang penting oleh penulis, karena perubahan paradigma ini membutuhkan modal mental yang kuat dan berdaya tahan tinggi, untuk mengantisipasi layunya semangat di tengah jalan proses perubahan paradigma.

Materi buku ini menarik karena menggugah pemikiran baru tentang akuntansi. Akuntansi ternyata tidak hanya berhenti pada tersusunnya laporan keuangan dan analisisnya saja, yang lebih penting justru kebermanfaatannya dan kebermaknaannya bagi organisasi. Akuntansi tidak hanya mengolah data lampau saja, tetapi juga dapat digunakan untuk meraih capaian-capaian di masa depan, tidak hanya capaian yang bersifat keuangan saja, tetapi juga capaian yang lebih luas dimensinya. Satu hal saja yang kurang dari buku ini, yaitu bagian dalam buku ini tidak colourfull, apalagi kertas digunakan adalah kertas warna buram, sehingga pembaca cepat letih membacanya karena dihadapkan pada warna tulisan dan tabel yang monoton.

*Penulis adalah Widyaiswara pada BDK Cimahi

Kang Edu



Oleh: Bimo



Rapat Dinas Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

foto: Eros Lassa Mursalin

Mengambil tema “Redefinisi Pelayanan dan Kinerja BPPK yang berorientasi pada Outcomes melalui Penyempurnaan Strategi Pengelolaan Training” Rapat Dinas BPPK tahun 2012 dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardjyo. Rapat yang berlangsung selama 3 hari dan dihadiri para pejabat eselon I, II, III dan perwakilan Widyaiswara BPPK tersebut, menghasilkan kesepakatan mengenai apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan BPPK ke depan untuk menyempurnakan strategi pengelolaan training.



**NOW AVAILABLE
ON MOBILE VERSION**

Grab the latest Training Info on your gadget



Log on to

www.bppk.depkeu.go.id

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
[@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)
[@BPPKlive](https://twitter.com/BPPKlive)

A close-up photograph of a human hand in a clenched fist, striking the word 'KORUPSI' (Corruption) which is painted in large, red, distressed letters on a grey concrete surface. The background shows a blue banner with the word 'STOP!' in white, and a patch of green grass at the top.

STOP!

KORUPSI

EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 14/2013

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>